

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial identik dengan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Untuk itu perlu adanya upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial membentuk panti-panti sosial yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mampu menanggulangi dan mengendalikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut melalui program-program kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan melalui pelayanan yang berkualitas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam melaksanakannya membutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaku utama, dimana didalamnya peran pekerja sosial sangat menentukan. Pekerja sosial di tiap-tiap panti sosial mengetahui akan peranan dan tugas-tugasnya menjadi seorang pekerja sosial sehingga memiliki tata cara program kerja sendiri dalam usaha-usaha menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial di berbagai daerah. Pekerja sosial dalam melaksanakan praktek program kerjanya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memiliki kendala yang

disebabkan antara lain karena besarnya permasalahan yang tidak seimbang dengan jangkauan pelayanan, keterbatasan SDM, dana dan prasarana dalam menunjang kualitas pengelolaan dan pelayanan yang diberikan belum semua dilaksanakan secara profesional dan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Adanya kondisi tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di panti dengan di dukung oleh pekerja sosial yang kompeten dan profesional, yang kegiatannya dibagi berdasarkan jenjang jabatan pekerja sosial. Internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di panti sosial secara profesional, mensyaratkan pekerja sosialnya pun harus memiliki latar belakang dibidang kesejahteraan sosial. Jabatan fungsional keahlian atau profesional adalah “jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya”.<sup>1</sup>

Salah satunya adalah pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi memiliki tugas menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial, khususnya dalam menangani masalah gelandangan, pengemis dan orang telantar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panti Sosial Bina Karya, pekerja sosialnya berjumlah 15 orang dan jumlah warga binaan sosial persatu angkatan berjumlah 300 orang. Keadaan tersebut mengakibatkan jumlah pekerja sosial yang tersedia dengan jumlah warga binaan sosial yang dilayani menjadi tidak sebanding.

---

<sup>1</sup>Biro organisasi dan kepegawaian, *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/2007 tentang pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007, hlm. 3.

Berdasarkan data dari daftar normatif pegawai Panti Sosial Bina Karya, pekerja sosial yang berpendidikan S1 kesejahteraan sosial hanya ada 2 orang. Kondisi latar belakang pendidikan yang dimiliki pekerja sosialnya sendiri kebanyakan bukan dari S1 kesejahteraan sosial sehingga, belum dapat dikatakan tenaga yang profesional dan kontribusi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal. Jika ingin membentuk internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial yang profesional selama bekerja di PSBK, ia harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial secara langsung melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial juga diharuskan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, dalam hal ini memiliki pendidikan yang berlatar belakang pekerjaan sosial atau telah menjalankan pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial. Ia juga harus berpengalaman dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Atas asumsi ini yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Bertitik tolak pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka permasalahan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah para pekerja sosial mengetahui tentang tugas dan fungsinya di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah pekerja sosial memperoleh pembekalan dan pembinaan kinerja tugas dan fungsi dari atasan untuk meningkatkan kinerja secara profesionalisme?
3. Apakah pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” sudah melaksanakan tugas dan fungsinya?
4. Faktor-faktor apa yang menghambat tugas dan fungsi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
5. Bagaimana proses internalisasi pekerja sosial di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Internalisasi Tugas Dan Fungsi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi”. Fokus penelitian ini adalah proses internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya.

Adapun tujuan khusus penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tugas dan fungsi yang diketahui oleh pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan kedua, untuk

mengetahui pembekalan dan pembinaan kinerja tugas dan fungsi yang diperoleh pekerja sosial dari atasan untuk meningkatkan kinerja secara profesionalisme. Tujuan ketiga, untuk mengetahui tugas dan fungsi yang dilaksanakan pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur”. Tujuan keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat para pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan kelima, untuk mengetahui proses internalisasi pekerja sosial di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi penelitian baik secara akademik maupun secara praktis. Manfaat secara akademik adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru bagi perkembangan kajian ilmu sosiologi khususnya dibidang sosiologi pembangunan dan perencanaan pembangunan kota/desa. Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam upaya menanggulangi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial baik di kota maupun desa. Pada manfaat praktisnya, adanya hasil penelitian ini antara lain: *pertama* diharapkan dapat menggugah kepedulian orang lain untuk menolong orang yang tidak beruntung. *Kedua*, secara khusus, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pekerja sosial dalam pengadaan dan peningkatan kegiatan usaha-usaha pembinaan sosial selanjutnya.

### **E. Tinjauan Penelitian Sejenis**

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para peneliti mengenai peran dan tugas pekerja sosial. Mengacu kepada penelitian terdahulu pada tema peran pekerja sosial dalam melaksanakan tugas pembinaan atau rehabilitasi, penulis pada posisi lain melihat bagaimana internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya. Secara tidak langsung, para pekerja sosial dalam proses pelaksanaan tugas memiliki hambatan tertentu yang belum tentu mereka atasi sendiri seperti penelitian yang dilakukan oleh Suminto menyoroti tentang pelaksanaan “peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta”.<sup>2</sup>

Permasalahannya adalah bahwa di dalam proses rehabilitasi sosial, para pekerja sosial memiliki posisi yang sangat strategis bagi terbentuknya penyandang cacat tubuh yang mandiri. Posisi strategis dimaksud adalah bahwa para pekerja sosial berwenang penuh untuk melakukan intervensi terhadap klien melalui berbagai peranan yang dimiliki. Peranan pekerja sosial itu sendiri dalam penerapannya mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas, yaitu meliputi : individu-keluarga, kelompok dan organisasi sosial masyarakat. Konsep/istilah “peranan pekerja sosial” yang dipakai dalam penelitian ini, secara operasional pengertiannya mengacu pada ketentuan buku panduan Pekerja Sosial terbitan Departemen Sosial yang sampai sekarang ini masih dijadikan pegangan seluruh pekerja sosial di PRSBD

---

<sup>2</sup>Lihat Suminto, *Peranan Pekerja Sosial Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh (Studi Di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta)*, (Tesis, Depok: Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2001).

“Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PRSBD “Prof. Dr. Soeharso” telah berusaha melaksanakan peranannya menurut ketentuan Buku panduan, namun tidak semua peranan tersebut dapat terpenuhi.

Hal ini disebabkan ada beberapa peranan yang di tingkat mezzo (seperti : pencari informasi, evaluator, pembentuk opini, elaborator, pencatat tehni prosedural, pengikut dan pengatur kompromi) dan ditingkat makro (peranan sebagai penggerak) tidak dapat / kurang relevan pelaksanaannya dalam kehidupan panti (seperti PRSBD). Peranan-peranan tersebut lebih relevan di luar panti. Di dalam pelaksanaan dalam profesionalisme pekerja sosial di PRSBD “Prof. Dr. Soeharso” masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Muda/ Sarjana Non Profesi Pekerja Sosial. Di samping masalah ketidakprofesionalan, para pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya juga dihadapkan berbagai kendala, seperti : Faktor klien (tingkat kemampuan yang berbeda, sensitif, tidak disiplin, dll), faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau tambah jumlahnya.

Ada penelitian lain yang dilakukan oleh Yusuf Ali Marsaoly tentang “peranan pekerja sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia di panti sosial Tresna Werdha “Budi Mulia” Jakarta Timur”.<sup>3</sup> Dalam abstraknya,

---

<sup>3</sup>Lihat Yusuf Ali Marsaoly, Peranan Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Lanjut Usia (Studi di Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Mulia” Jakarta Timur), (Tesis, Jakarta: Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011).

mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya populasi lanjut usia akhir-akhir ini memerlukan penanganan yang lebih serius baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi-organisasi sosial. Melalui kebijakan pemerintah bagi para lansia yang tidak mempunyai keluarga maupun yang mempunyai keluarga tetapi kurang memperoleh perhatian maka para lansia tersebut di santrumi melalui sistem Panti.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lansia, dimana pekerja sosial mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan para lanjut usia. Dikatakan penting dan strategis karena merekalah yang berhadapan langsung dengan klien yang dilayani sehingga permasalahan yang di alami klien dengan segera mereka mengetahuinya. Selain daripada itu, dalam melaksanakan peranannya, para pekerja sosial di Panti Sosial Tresna Werdha” Budi Mulia” diperhadapkan pada berbagai kendala seperti tidak tersedianya tenaga profesional di Panti seperti dokter, psikolog, ahli gizi, sehingga tugas yang seharusnya ditangani oleh para profesional tersebut di ambil alih oleh pekerja sosial.

Permasalahan khusus yang dihadapi pekerja sosial adalah tidak seimbangny rasio antara jumlah pekerja sosial dengan lansia yang dilayani, sehingga dipertanyakan apakah para pekerja sosial dapat melaksanakan peranannya secara optimal dengan kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan yang dilakukan pekerja sosial dalam kegiatan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lansia, dan mengetahui hambatan yang ditemui oleh pekerja sosial dalam melaksanakan peranan-peranan tersebut. Penulis menggunakan kerangka



Zastrow, yaitu bahwa ada 12 peranan yang dilakukan pekerja sosial dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi-organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah.

Kerangka yang digunakan adalah kerangka menurut Lowy, serta Compton dan Galaway guna melihat peran Pekerja Sosial. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pekerja sosial di PSTW “Budia Mulia” meskipun dengan keterbatasan pendidikan profesional pekerja sosial telah berusaha melaksanakan peranannya. Peranan yang telah mereka laksanakan dalam memenuhi kebutuhan lansia adalah antara lain selaku koordinator : yakni mengkoordinir kegiatan dan masalah yang ada; yakni menengahi konflik yang terjadi antara klien, fasilitator kelompok : yaitu membantu kelompok dalam pemecahan masalah yang dihadapi, dan instruktur : yakni membimbing/melatih para lansia untuk pengembangan sikap mental dan keterampilan para lansia.

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui oleh pekerja sosial terdiri dari beberapa hal antara lain: kondisi lansia, kondisi lembaga antara lain : tidak tersedianya tenaga dokter/perawat, psikolog, ahli gizi, dan profesionalitas atau tingkat pendidikan dan pelatihan pekerja sosial, belum tersedianya tempat pelatihan keterampilan yang memadai, serta dana untuk operasional kegiatan yang masih minim. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pekerja Sosial belum maksimal melaksanakan peranannya, karena terbentur pada beberapa faktor hambatan, baik tingkat pendidikan profesi, faktor klien, maupun kondisi lembaga itu sendiri. Saran yang dapat diajukan adalah : Perlunya peningkatan

profesionalisme para pekerja sosial, perlu kerjasama antar sesama pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan peranannya, perlunya membangun jaringan kerjasama dengan organisasi sosial atau lembaga lain yang menangani atau mendukung pelayanan terhadap lansia seperti psikolog, dokter, ahli gizi, dan lain-lain, serta perlunya hubungan dengan keluarga lansia perlu dilakukan secara efektif oleh para pekerja sosial guna membantu pemecahan masalah yang dihadapi lansia.

Pada penelitian kali ini, penulis mencoba mengkaji internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya dengan ranah yang berbeda pula, yaitu mengupas proses internalisasi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penulis disini akan berupaya untuk menelaah pustaka atau membandingkan penelitian-penelitian sejenis yang terdahulu yang ditulis oleh Suminto, Yusuf Ali Marsaoly dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan posisi studi yang dikaji penulis saat ini dengan penelitian-penelitian sejenis tersebut. Adanya pengkajian atau perbandingan ini nantinya akan diketahui seberapa penting studi yang dilakukan oleh penulis, sehingga memang diperlukan penelitian ini. Untuk melihat lebih jelas perbandingannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I.1**  
**Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis**

Nama Pengarang dan Judul Penelitian		Persamaan	Perbedaan
Neny Mulyaningsih: Internalisasi Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Bina Karya PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi.	Suminto: Peranan pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh (studi di pusat rehabilitasi sosial Bina Daksa “Prof. Dr. soeharso” Surakarta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian mengarah pada pekerja sosial yang bertugas melakukan proses rehabilitasi di pusat rehabilitasi sosial Bina Daksa “Prof. Dr. soeharso” Surakarta.</li> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> <li>• Membahas tentang pelaksanaan dalam profesionalisme pekerja sosial ketika di dalam masih mejadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Non Profesi Pekerja Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian mengarah pada pekerja sosial melakukan proses rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat tubuh sedangkan penulis lebih menyoroti pekerja sosial melakukan proses rehabilitasi sosial kepada gelandangan pengemis dan orang telantar.</li> <li>• Analisis yang dilakukan lebih ke tugas yang dilakukan pekerja sosial dengan membandingkan buku panduan peranan</li> <li>• Lokasi penelitian dilakukan di pusat rehabilitasi sosial Bina Daksa “Prof. Dr. soeharso” Surakarta sedangkan penulis lokasi penelitiannya dilakukan di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi.</li> </ul>
	Yusuf Ali Marsaoly: Peranan pekerja sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia (studi di panti sosial Tresna Werdha “Budi Mulia” Jakarta Timur).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian tentang pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di panti sosial Tresna Werdha “Budi Mulia” Jakarta Timur.</li> <li>• Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>• Mengupas tentang Pekerja Sosial belum maksimal melaksanakan peranannya, karena terbentur pada beberapa faktor hambatan, baik tingkat pendidikan profesi dan faktor klien. Selain itu, permasalahan khusus yang dihadapi pekerja sosial adalah tidak seimbang rasio antara jumlah pekerja sosial dengan klien yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek penelitian tentang pekerja sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia.</li> <li>• Penelitian Yusuf Ali Marsaoly menggunakan kerangka Zastrow, kerangka menurut Lowy, serta Compton dan Galaway guna melihat peran Pekerja Sosial. Penelitian kali ini, menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu internasional menurut peter L. Berger dan menggunakan penjelasan menurut zastrow, Leonora Sarafica de Guzman dalam menganalisa tugas dan fungsi pekerja sosialnya.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari data peneliti tahun 2012

Pada tabel I.1 merupakan perbandingan dari penelitian menurut Suminto, Yusuf Ali Marsaoly dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Terlihat jelas

adanya perbedaan mulai dari tujuan, subyek dan kerangka konsep penelitian. Pada penelitian Suminto, menyoroti tentang pelaksanaan peranan para pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh di PRSBD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. Permasalahannya adalah bahwa di dalam pelaksanaan profesionalisme pekerja sosial ketika di dalam masih menjadi persoalan, karena sebagian besar dari mereka berlatar belakang pendidikan SLTP/SLTA/Sarjana Muda/ Sarjana Non Profesi Pekerja Sosial dan dihadapkan dengan kendala dari faktor birokrasi (kurang koordinasi), maupun sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat mendukung kegiatan operasional dan belum mendapatkan ganti atau tambah jumlahnya.

Tidak seperti penanganan gelandangan, pengemis dan orang telantar di dalam koordinasi pekerja sosial dengan antar seksi terjalin dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Ali Marsaoly, lebih kepada mendeskripsikan yang dilakukan pekerja sosial dalam melaksanakan peranannya. Yusuf Ali Marsaoly menggunakan kerangka Zastrow, kerangka menurut Lowy, serta Compton dan Galaway guna melihat peran Pekerja Sosial.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pekerja Sosial**

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya Pasal 1 disebutkan bahwa “Pekerja Sosial adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi lainnya”.<sup>4</sup> Pekerja sosial disini dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian, keterampilan dan telah menempuh pendidikan pekerjaan sosial bekerja di salah satu panti seperti pekerja sosial yang bekerja di panti sosial bina karya bertugas untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Profesi pekerja yang paling penting adalah keterampilan profesional pekerja sosial mencakup pengungkapan dan pemahaman masalah dan intervensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari pengetahuan pekerjaan sosial.

Pekerjaan profesional menggunakan pendekatan-pendekatan sistematis berdasarkan sejumlah pengetahuan dan penelitian profesi pekerjaan sosial mempunyai komitmen terhadap kebijakan dan praktiknya tanpa memandang golongan ekonomi, dan dalam praktik profesi ini mempunyai standar yang akuntabel. Menurut Zastrow dalam Abu Huraerah, “pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi ini, bisa diketahui tugas pokok fokus utama pekerjaan sosial adalah pada peningkatan

---

<sup>4</sup>Biro organisasi dan kepegawaian, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 Jabatan fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Departemen Sosial R.I, 2008, hlm. 3.

<sup>5</sup>Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora buku pendidikan anggota IKAPI, 2008, hlm. 38.

kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.

Praktik pekerjaan sosial sangat berbeda dari pemberian bantuan amal. Dalam banyak hal, perbedaan pekerjaan sosial profesional mirip dengan perbedaan antara dokter medis profesional dan praktisi medis non profesional. Dalam melakukan pekerjaannya pekerja sosial tunduk dibawah kode etik profesi dan bertanggungjawab kepada organisasi tempat ia berpraktik, komunitas/warga binaan sosial, dan profesi itu sendiri. Menurut Leonora Serafica- de Guzman dalam Abu Huraerah, menyatakan adanya 3 fungsi pokok pekerjaan sosial, yaitu:

*“Pertama, fungsi Restoratif. Pekerja sosial melakukan fungsi restoratif terhadap bagian-bagian yang tidak berfungsi. Kedua, fungsi preventif/pencegahan. Fungsi pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial. Ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dalam pekerjaan sosial difokuskan kepada pengembangan keberfungsian sosial orang / klien secara optimal dan pengasuhan, sehingga dapat terrealisasi potensi-potensinya dan meningkat pula kemampuannya”.*<sup>6</sup>

Fungsi restoratif ini mencakup kegiatan penyembuhan dan rehabilitasi, khususnya terhadap kemampuan klien dalam berinteraksi secara positif dan memadai dengan lingkungan sosialnya. Kegiatan penyembuhan mencakup kegiatan identifikasi dan pengontrolan. Sedangkan kegiatan rehabilitasi mencakup bentuk kegiatan yang diwujudkan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sendiri yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Fungsi pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial. Menurut Albert R. Roberts, “upaya pencegahan yang dilakukan harus difokuskan pada sejumlah bidang risiko diantaranya pekerja sosial harus dapat bertanggung jawab dalam upaya perlindungan terhadap informasi kerahasiaan klien, isu-isu batasan dan konflik kepentingan”.<sup>7</sup> Pada fungsi pengembangan ini juga berkaitan dengan cara-cara yang efektif untuk mengatasi berbagai macam tantangan, kesulitan dan tekanan kehidupan. Menurut Edi Suharto, “Pengembangan meliputi berbagai pelayanan sosial berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak telantar yang diperlakukan salah sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah”.<sup>8</sup>

Secara prakteknya, pekerja sosial (peksos) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa peranan yang belum sesuai dengan ketentuan prinsip dasar sehingga belum dapat memuaskan semua pihak (warga binaan sosial, keluarga warga binaan sosial, maupun masyarakat pengguna jasa). Kondisi ini disebabkan oleh faktor Warga Binaan Sosial (WBS), faktor prosedur birokrasi, faktor sarana dan prasarana pendukung, faktor dari peksos sendiri. Ia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketika memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga

---

<sup>7</sup>Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene terjemahan Juda Damanik, Buku pintar pekerja sosial, Jakarta: Gunung Mulia, 2008, hlm. 67

<sup>8</sup>Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 37.

binaan sosial haruslah sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial. Prinsip dasar dalam pekerjaan sosial diantaranya:

“Keyakinan akan harkat dan martabat setiap manusia, prinsip ini menetapkan cara pendekatan dan hubungan antara pekerja sosial dengan klien yang dibantunya. Pekerjaan sosial harus dapat menghargai dan memberikan perhatian kepada manusia sebagai individu, tapi juga sebagai anggota kelompok dan warga masyarakat. Pekerja sosial yang menangani harus mampu mengidentifikasi diri pada situasi klien, mengarahkan serta tidak mendikte kegiatan-kegiatan klien. Di dalam pekerjaan sosial juga harus memiliki keyakinan akan kesempatan yang sama bagi semua orang yang hanya dibatasi oleh kemampuan individu masing-masing serta harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa”<sup>9</sup>.

Warga Binaan Sosial (WBS) memiliki permasalahan yang kompleks sehingga perlu adanya upaya pembinaan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Teknik-teknik yang dilakukan para pekerja sosial dalam menggali permasalahan yang dialami WBS ini pertama-tama ia harus melakukan pendekatan berkomunikasi dan melakukan wawancara dengan WBS. Melalui wawancara ia pun akan memperoleh data, informasi tentang WBS tersebut. Ia juga harus melakukan penyuluhan sosial sebagai bentuk komunikasi berupa penyampaian informasi atau pesan-pesan lainnya yang terkait sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial. Teknik-teknik pekerja sosial diantaranya “melakukan komunikasi, penyuluhan sosial, wawancara, pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, supervise, pendayagunaan sumber”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, *Standardisasi pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), 2000, hlm. 6.

<sup>10</sup>Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, *Panduan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen sosial RI*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 1998, hlm. 18



## 2. Interaksi Sosial

Menurut Gillin dan Gillin yang dikutip Soekanto “interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia”.<sup>11</sup> Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia selalu hidup bersama-sama dengan orang lain dan tidak pernah lepas dari sesamanya. Satu sama lain saling berinteraksi, saling membantu, mendidik, dan membutuhkan. Ketika hidup dalam suatu masyarakat, setiap manusia memiliki berbagai tugas kehidupan yang harus dilaksanakan baik tugas sebagai individu, anggota keluarga, anggota kelompok, anggota masyarakat maupun warga Negara.

Sama halnya dengan pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya juga mempunyai tugas dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidaklah mudah, karena dihadapkan pada rintangan-rintangan dan hambatan. Dalam menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan, pekerja sosial perlu berkomunikasi dengan salah satu pakar yang ahli dibidangnya. Menurut Soerjono Soekanto, “komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut”.<sup>12</sup>

Sejak pekerja sosial dipekerjakan di dalam badan-badan sosial supaya bisa lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu adanya kerjasama dengan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 61.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 67.

antar seksi, agar mampu mengkoordinasi kegiatan dan pelayanan yang diberikan. Pekerja sosial juga harus melakukan kontak sosial dengan warga binaan sosial untuk dapat memahami latar belakang permasalahan yang dihadapi dan mengetahui tingkah laku warga binaan sosial yang dibimbingnya dalam lingkungan sosial tempat ia berada. Pekerja sosial nantinya bisa membantu memecahkan permasalahan, mengubah situasi sosial (lingkungan) agar warga binaan sosialnya dapat menyesuaikan diri dengan baik dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya, sesuai dengan status dan peranan sosial yang disandangnya. Para pekerja sosial dipekerjakan di dalam badan-badan sosial dan mendapatkan upah, maka bayaran dari klien seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan badan sosial.

### **3. Tindakan Sosial**

Menurut weber dalam kamanto, “suatu tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain”.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan dari weber tidak kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan para pekerja sosial yang ada di PSBK terlihat bahwa dalam bertindak melaksanakan tugasnya diarahkan hanya untuk kepentingan secara pribadi ingin mendapatkan nilai materil semata. Secara garis besar penjelasan mengenai tindakan merupakan suatu tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan dapat bermanfaat untuk orang lain.

---

<sup>13</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 12.

Masing-masing pekerja sosial di PSBK memiliki uraian tugas berdasarkan jenjang jabatan yang diembannya. Orintasi pertolongan pekerja sosial dalam melaksanakan pekerjaan sosial dipusatkan kepada kepentingan warga binaan sosial yang ditolongnya. Jadi, semua kegiatan lebih diarahkan untuk kepentingan pemecahan masalah yang dihadapi warga binaan, bukan kepentingan pekerja sosialnya. Menurut Weber dalam Lawang, “tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional”.<sup>14</sup>

Menurut Weber dalam George Ritzer, di antara dua tipe tindakan rasional terdiri dari:

“Pertama ialah rasionalitas alat-tujuan atau tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya; pengharapan-pengharapan itu digunakan sebagai ‘kondisi-kondisi’ atau ‘alat-alat’ untuk pencapaian tujuan-tujuan sang aktor sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional. Kedua adalah tindakan rasionalitas nilai terkait dengan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran berikut tak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, juga berbagai bentuk nilai lainnya terlepas dari prospek-prospek keberhasilannya”.<sup>15</sup>

#### **4. Internalisasi**

Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi bagi para pekerja sosial profesional. Pekerja sosial apabila dapat membentuk internalisasi dengan baik maka pekerja sosial tersebut dapat menjadi tenaga profesional. Menurut Peter L. Berger, proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum, atau langkah yaitu:

---

<sup>14</sup> Doyle Paul Johnson diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 220.

<sup>15</sup>George Ritzer terjemahan oleh Saut Pasaribu, *Teori Sosiologi Dari sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012, hlm. 216.

“Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Obyektivasi adalah disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan yang eksternal terhadap para produsen itu sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif”.<sup>16</sup>

Pada proses eksternalisasi disini, pekerja sosial melakukan proses penyesuaian diri secara terus menerus dengan dunia sosial dilingkungan tempat ia bekerja sebagai seorang pekerja sosial. Meskipun proses eksternalisasi ini berlangsung terus menerus, bukan berarti aktivitas yang dilakukan dapat terus-menerus mengalami perubahan. Disandangnya menjadi pekerja sosial itu kemudian akan dihadapkan dengan berbagai ketentuan yang berlaku yang harus dilaksanakan selama ia menjadi pegawai dalam suatu lembaga.

Transformasi produk-produk pekerja sosial ini tidak saja berasal dari pekerja sosial itu sendiri, tetapi dihadapkan pada suatu faktisitas diluar dirinya yang disebut dengan konsep obyektivasi. Kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dunia yang diproduksi pekerja sosial memperoleh sifat realitas obyektif. Berdasarkan realitas obyektif yang terbentuk inilah, manusia selanjutnya mengalami proses internalisasi yang mencerminkan terjadinya realitas subjektif. Menurut Berger dan Lukman yang dikutip oleh Hanneman Samuel, realitas dapat didefinisikan menjadi sebagai berikut.

“Realitas merupakan kualitas yang melekat pada penomena yang kita anggap berada di luar kehendak kita. Maksudnya, realitas merupakan fenomena yang bersifat eketernal,

---

<sup>16</sup> Peter L. Berger terjemahan oleh Hartono, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 4

umum dan mempunyai kekuatan yang memaksa kesadaran masing-masing individu. Terlepas dari individu itu suka atau tidak suka mau atau tidak mau, realitas tetap ada.”<sup>17</sup>

Pekerja sosial apabila terus melakukan kegiatan pengulangan pada aktivitas yang dilakukannya maka ia pun akan menjadi terbiasa dengan tindakan-tindakannya tersebut dan akan menjadi suatu kesadaran subyektif. Proses internalisasi ini terkonstruksi melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh pekerja sosial melalui interaksi dengan rekan pekerja sosial lain sehingga dapat membentuk internalisasi dengan baik dalam realitas subjek yang dilakukannya. Menurut Peter L. Berger, “Proses-proses yang menginternalisasi dunia yang terobyektivasi secara sosial adalah proses-proses yang juga menginternalisasi identitas-identitas yang ditetapkan secara sosial dan individu disosialisasi menjadi pribadi dan menempati dunia yang ditetapkan”.<sup>18</sup>

Proses internalisasi akan terbentuk proses masuknya pengetahuan dan kesadaran kedalam tataran batin subjek dirinya dan kemudian melahirkan butir kesadaran baru yang bermakna subyektif bagi dirinya. Menurut Peter L. Berger, “makna subjek merupakan hasil dari pikiran-pikiran dan tindakan manusia yang dipelihara sebagai suatu kenyataan (realitas) oleh pikiran dan tindakannya tersebut”.<sup>19</sup> Internalisasi disini juga bisa dikatakan berhasil jika bisa belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain secara professional yang kemudian menumbuhkan

---

<sup>17</sup>Hanneman Samuel, *Peter L Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012, hlm. 14.

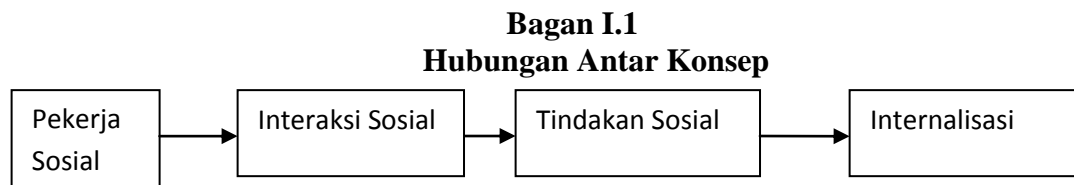
<sup>18</sup> Peter L. Berger terjemahan oleh Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>19</sup>Peter L. Berger dan Thomas Lucman diterjemahkan oleh Hasan Basari, *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 29.

kesadaran akan melakukan kegiatannya tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara profesional sehingga bermakna bagi dirinya.

### **G. Hubungan Antara Konsep Pekerja Sosial, Interaksi Sosial, Tindakan Sosial, dan Internalisasi**

Pada hubungan keterkaitan antar konsep dalam konteks internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial, penulis mencoba untuk mengaitkan antara pekerja sosial, interaksi sosial, tindakan sosial dan internalisasi. Pekerja sosial perlu melakukan interaksi sosial dengan antar pekerja sosial, Warga Binaan Sosial, Staf lainnya dan salah satu pakar yang ahli dibidangnya guna memperlancar tindakan sosial yang dilakukan pekerja sosial dalam pelaksanaan tugas agar dapat terbentuknya proses internalisasi yang paham dan sadar dari segi berbuat sesuai ketentuan dan tuntutan yang diperlukan sebagai pekerja sosial yang profesional. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi bagi para pekerja sosial profesional. Pekerja sosial apabila dapat membentuk internalisasi dengan baik maka pekerja sosial tersebut dapat menjadi tenaga profesional. Berikut bagan hubungan antar konsep dapat dilihat pada bagan I.1 dibawah ini:



Sumber: Hasil olahan Penulis, 2013

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, “penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa”.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus karena untuk menjelaskan program, peristiwa, dan proses secara mendalam yang tujuannya untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya yaitu dengan melakukan langkah-langkah: pengamatan langsung, wawancara dengan informan, dan dokumen. Oleh sebab itu, penulis melakukan beberapa langkah dengan menjalani aktivitas dalam melakukan penelitian, seperti aktivitas dalam menentukan lokasi dan subjek penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, triangulasi data (keabsahan data), dan teknik analisis data.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pekerja sosial yang memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis dan orang telantar. Dalam penelitian ini penulis memiliki 14 orang informan kunci dan 4 orang informan lain sebagai pendukung.

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 6.

**Tabel I.2**  
**Daftar Subjek Penelitian**

Informan Kunci		Informan Pendukung	
CK	Pekerja sosial penyelia	LA	koordinator pekerja sosial
SN	Pekerja sosial penyelia	AR	Kepala Panti
SW	Pekerja sosial penyelia	KK	Kepala Kepegawaian Kementerian Sosial RI
NS	Pekerja sosial penyelia	AF	Kepala Bagian PMKS Dinas Sosial Bekasi
NY	Pekerja sosial penyelia		
MT	Pekerja sosial penyelia		
NM	Pekerja sosial penyelia		
YW	Pekerja sosial penyelia		
IG	Pekerja sosial penyelia		
TH	Pekerja sosial pelaksana lanjutan		
DR	Pekerja sosial pelaksana lanjutan		
KM	Pekerja sosial pelaksana lanjutan		
ND	Pekerja sosial pelaksana lanjutan		
AM	Pekerja Sosial Madya		

Hasil olahan penulis, 2013

Pada tabel I.2 memperlihatkan daftar subjek penelitian sebagai informan yang dibutuhkan penulis dalam memperoleh data. Dapat diketahui bahwa jumlah seluruh informan dalam penelitian ini yaitu 18 orang. Penulis memilih beberapa informan tersebut dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Untuk memperoleh gambaran internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya berlangsung, terdapat informan kunci dari pekerja sosial di unit / seksi / instalasi yang secara teknis terlibat langsung di dalam proses rehabilitasi sosial panti sosial bina karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Informan kunci mengenai pembahasan penelitian, mengambil 14 orang informan dari pekerja sosial.

Selain informan kunci, terdapat pula informan lain sebagai informan pendukung yang menunjang penelitian ini. Informan terdiri dari 4 orang. Informan



pendukung diantaranya 1 orang koordinator pekerja sosial, 1 orang kepala panti, serta ditambah 2 orang lagi informan dari pejabat pemerintah dari kepala kepegawaian Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentang internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya, penulis mengambil lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” Bekasi. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di sana, karena Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” Bekasi merupakan panti sosial yang membina gelandangan, pengemis dan orang telantar. Tugas dan fungsi pekerja sosialnya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada gelandangan, pengemis dan orang telantar. Waktu melakukan penelitian dimulai dari Tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.

### **4. Peran Peneliti**

Pada penelitian ini penulis berperan sebagai partisipan total dalam memperoleh data di lokasi penelitian dengan ikut terlibat apa yang dikerjakan oleh pekerja sosial. Menurut John W. Creswell, ”partisipan total ialah penulis mendapatkan pengalaman langsung dari partisipan”.<sup>21</sup> Penulis sendiri merupakan peserta magang di Panti Sosial Bina Karya ”Pangudi Luhur” Bekasi pada tanggal 27 Agustus sampai 26 Oktober 2012. Selama magang, penulis ditempatkan di

---

<sup>21</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 268.

bagian Pekerja Sosial. Penulis disediakan waktu untuk turun langsung di lapangan dengan cara berbaur dengan para pekerja sosial dan menggali data sebanyak mungkin. Penelitian tentang pekerja sosial pun berlangsung dari sejak awal penulis magang di panti sosial bina karya. Penelitian ini dilakukan setiap hari saat Jam kerja berlangsung dari Jam 07.30-16.00 WIB. Durasi yang dihabiskan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini selama sepuluh bulan.

Bagi penulis, pekerja sosial merupakan pegawai yang bekerja membina gelandangan, pengemis dan orang telantar secara teknis dilapangan. Untuk mendapatkan data yang lebih dalam lagi mengenai pekerja sosial, penulis pun melakukan penelitian lebih lanjut setelah masa magang berakhir. Tidak hanya itu, agar data yang terkumpul lebih variatif penulis juga melakukan pengamatan dan penelusuran di Panti Sosial Bina Karya terutama pada saat pekerja sosial sedang melakukan kegiatan pembinaan sosial dalam menangani kasus para warga binaan sosial guna untuk memudahkan melakukan pengamatan.

## **5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif meliputi mengumpulkan informan melalui observasi, dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak, dan adanya dokumentasi. Langkah awal yang dilakukan penulis sebelum melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan beberapa informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Untuk informan pendukung dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial, penulis mendapatkan surat izin dalam melakukan penelitian. Penulis memberikan

pendekatan dengan calon informan agar dapat meminta izin kesediaan untuk diwawancarai, serta menjelaskan maksud dan tujuan dalam wawancara tersebut.

Sebelum mengumpulkan data dengan metode yang telah ditetapkan tersebut, penulis melakukan pendekatan kepada beberapa informan kunci dengan membangun hubungan baik dan akrab sehingga membentuk suatu kepercayaan untuk memperoleh informasi yang akurat. Sebelumnya penulis sudah mengetahui keberadaan informan, nama, tempat tinggal, dan juga latar belakang informan. Hal ini menyebabkan penjangkauan yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik yang ingin dibina tidak begitu sulit.

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara berhadap-hadapan dengan informan. Dalam wawancara kualitatif menurut John W. Creswell menjelaskan bahwa, “peneliti dapat melakukan *face to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu)”.<sup>22</sup> Narasumber yang akan penulis wawancarai adalah pekerja sosial, pembina pekerja sosial serta pimpinan panti sosial bina karya.

Menurut Esterberg dalam sugiyono, “mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur”.<sup>23</sup> Dalam upaya pengumpulan data, penulis melakukan wawancara terstruktur, penulis menyusun beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menunjang data-data yang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 267.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 233.

dibutuhkan dalam melakukan pengamatan mengenai internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya. Terhadap informan pendukung dari kepala kepegawaian Kementerian Sosial RI, wawancara dilakukan dikantor kementerian sosial RI dengan membuat janji terlebih dahulu dan membawa surat izin yang telah dibuat. Begitupun ketika melakukan wawancara kepala bagian PMKS Dinas Sosial Bekasi, wawancara dilakukan diruang kepala bagian PMKS Dinas Sosial dengan membuat janji terlebih dahulu dan membawa surat izin yang telah dibuat sama seperti melakukan wawancara dengan kepala kepegawaian Kementerian Sosial RI.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, terdapat observasi yang dilakukan oleh penulis. Dalam observasi kualitatif, penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan dan kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut secara lengkap dan akurat. Dalam melakukan pengamatan ini, penulis mencatat dan memotret beberapa aktivitas dalam lokasi penelitian. Observasi dilakukan langsung oleh penulis di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" dengan mengamati pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi membina gelandangan dan orang telantar.

Terakhir, yaitu mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian. Untuk pengambilan data sekunder, penulis mengambil data dari dokumentasi yang dimiliki oleh Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang nantinya akan penulis jadikan acuan sebagai penambah informasi untuk memperjelas penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga didukung beberapa studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder, seperti buku, skripsi, tesis, dan

artikel. Dokumentasi pribadi penulis yaitu berupa buku harian atau catatan kecil selama melakukan penelitian.

## **6. Triangulasi Data**

Peneliti melakukan metode triangulasi, yaitu cek ulang data dari satu sumber dengan sumber lainnya. Untuk mengetahui apakah hasil wawancara kepada pekerja sosial secara akurat atau tidak, maka penulis melakukan kroscek melalui pengujian, dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Tahapan-tahapan dalam melakukan pengecekan akan keabsahan data yang diperoleh pertama, penulis membandingkan data berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Seperti, saat melihat pekerja sosial dalam melaksanakan proses pembinaan kepada warga binaan di PSBK Pangudi Luhur, penulis tidak langsung memutuskan tindakan yang dilakukan oleh mereka itu sudah sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial, untuk menyakinkan opini, penulis meminta konfirmasi dengan mewawancarai Pembina dan Kepala Panti.

Kedua, pemeriksaan data yang telah diperoleh dari responden dengan membandingkan hasil wawancara informan kunci. Contohnya, saat penulis sedang mewawancarai beberapa narasumber, mengaku bahwa dalam melaksanakan tugas membina warga binaan sosial yang ada di PSBK ini sudah baik. Penulis pun disini melakukan kroscek dengan menanyakan kepada warga binaan sosial yang menjadi anak bimbingannya untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala bagian Kepegawaian Kementerian Sosial RI, Kepala Kepegawaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Bekasi, Kesatuan Pamong Praja dan Kepolisian Resort Bekasi untuk mengetahui kinerja dan sikap yang selama ini dilaksanakan oleh para pekerja sosial tersebut. Jika hanya mengandalkan hasil pengamatan dan wawancara informan, dikhawatirkan akan terjadi ketidakabsahan data. Ketiga, membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. Seperti saat ingin mengetahui program rehabilitasi, penulis tidak hanya mengandalkan hasil wawancara dengan informan maupun informan kunci. Selain dilakukan melalui observasi dan wawancara, penulis juga membandingkan dengan data sekunder, yaitu sumber yang berasal dari dokumentasi yang dimiliki oleh Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” Bekasi, buku-buku tentang standarisasi direktorat pelayanan tuna sosial menjadi seorang pekerja sosial dan buku khusus tentang pekerja sosial.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai uraian yang akan dilaksanakan dalam penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan ke dalam bab dan sub bab. Di bawah ini adalah sistematika penulisannya :

Pada **BAB I**, penulis menjabarkan latar belakang dilakukannya penelitian yang membawa penulis akan ketertarikan untuk meneliti mengenai internalisasi tugas dan fungsi Pekerja Sosial dalam membina gelandangan dan orang telantar. Selanjutnya dari latar belakang tersebut, ditarik permasalahan utama penelitian

dengan dijabarkan empat pokok perumusan permasalahan. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, penulis menjabarkan tujuan dan signifikansi penelitian yang dijalankan bagi penulis. Dalam bab pendahuluan juga dijabarkan tinjauan pustaka sejenis yaitu penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan masukan dan menjadi acuan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk menginterpretasikan secara sosiologis fenomena yang diteliti, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai analisis. Setelah kesemuanya dapat dijabarkan, penulis merumuskan metode penelitian yang terdiri dari subjek peneliti, peran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, dan teknik pengumpulan data. Sub bab terakhir dari pendahuluan yaitu sistematika penulisan penelitian.

Pada **BAB II**, penulis melakukan kajian awal dalam memperoleh gambaran mengenai gambaran umum Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur”. Pada bagian bab ini di bagi kedalam delapan sub bab yaitu pengantar, sejarah singkat berdirinya Panti Sosial Bina Karya, Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Karya, tugas dan fungsi pekerja sosial, program kerja pekerja sosial, program pengangkatan karier pekerja sosial, warga binaan angkatan II tahun 2012 di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”, dan kesimpulan.

Pada **BAB III** ini, penulis akan membahas tentang pelaksanaan kerja tugas dan fungsi pekerja sosial, yang terdiri dari pengantar, tugas dan fungsi pekerja sosial, pelaksanaan tugas pokok fungsi pekerja sosial, proses pendidikan pelatihan dan pembinaan pekerja sosial, faktor penghambat dan pendukung Pekerja Sosial dalam

melaksanakan tugas, upaya pekerja sosial dalam mengatasi hambatan kerja, proses internalisasi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas, fungsinya dan kesimpulan.

Pada **BAB IV** ini, penulis akan membahas analisis hasil penelitian, merupakan internalisasi pekerja sosial terhadap tugas dan fungsinya Pada bab ini, penulis membagi menjadi 6 subbab. Pada subbab *pertama*, pengantar. Pada subbab *kedua*, tugas dan fungsi pekerja sosial. Pada subbab *ketiga*, interaksi sosial antar Pekerja Sosial, warga Binaan Sosial dan staf lainnya. Pada subbab *keempat*, tindakan sosial pekerja sosial dalam melaksanakan tugas. Pada subbab *kelima*, Internalisasi pekerja sosial terhadap tugas fungsinya. Pada subbab *keenam*, kesimpulan.

Kemudian pada **BAB V** merupakan bab terakhir yaitu berupa kesimpulan akan hasil penelitian yang telah dijalankan dan juga saran bagi beberapa pihak yang penting untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kehidupan mendatang.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PANTI SOSIAL BINA KARYA**

#### **“PANGUDI LUHUR”**

##### **A. Pengantar**

Bab ini menguraikan gambaran umum Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”. Sejak adanya keputusan Mensos RI No. 14/HUK/KEP/1994 tentang penamaan UPT Pusat/Panti/Sasana dinamakan Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi sampai saat ini. Panti sosial tersebut merupakan salah satu unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. Yang mempunyai tugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial gelandangan dan pengemis.

Struktur organisasi dan tata kerja Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” mengacu pada peraturan menteri s0osial Republik Indonesia nomor: 106/HUK/2009. Jumlah karyawan yang bekerja di Panti Sosial Bina Karya sebanyak 56 orang. Namun, dari 56 karyawan yang menjadi pekerja sosial hanya 15 orang atau  $\pm 27\%$  pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial.

Tugas pekerja sosial adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan sosial gelandangan dan orang telantar yang berada di dalam panti. Pekerja sosial memiliki program kerja yang mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan pekerja sosial sesuai kewenangan per jenjang jabatan di Panti Sosial Bina Karya.

Pekerja sosial agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya maka perlu adanya upaya program pengangkatan karier pekerja sosial.

Berdasarkan karakteristik seperti itu, maka salah satu sub-bab membahas tentang program kerja pekerja sosial. Pembicaraan mengenai program kerja pekerja sosial menjadi penting untuk dikupas dalam bab ini. Bagaimana program kerja pekerja sosial di Pantii Sosial Bina Karya selama ini sehingga pekerja sosial dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pekerja sosial hingga saat ini. Di tiap perjenjang jabatan pekerja sosial memiliki ketentuan uraian tugas.

Paling penting disini adalah mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang mereka rasakan selama bekerja di pantii mengikuti peraturan dan disiplin kerja sesuai dengan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan optimalitas kinerja pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka dipandang perlu dilaksanakan “program pembinaan karier pekerja sosial” baik yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS) maupun Instansi yang mengangkat pekerja sosial. Semua itu akan dibahas secara rinci dalam masing-masing sub-bab.

### **B. Profil Pantii Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”**

Sejak adanya keputusan Mensos RI No. 14/HUK/KEP/1994 tentang penamaan UPT Pusat/Pantii/Sasana dinamakan Pantii Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi sampai saat ini. Pantii Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” adalah salah satu unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI (Kepmensos. No. 59/Huk/2003). Yang mempunyai

tugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial gelandangan dan pengemis yang bersifat *preverentif, rehabilitatif* dalam bentuk resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang telantar agar mampu mandiri berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

**Gambar II.1**  
**Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”**



Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Tanggal 26 September 2012

Gambar II.1 merupakan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) terletak di Desa Margahayu Jln. H. Moelyadi Joyomartono Bekasi Timur, Jawa Barat. Luas tanah panti sebesar  $153.615\text{m}^2$ , luas PSBK keseluruhan adalah  $51.616\text{m}^2$ , Tanah ukuran bangunan yakni  $44.412\text{m}^2$ , Luas tanah ukuran sarana seluas  $4.204\text{m}^2$ , tanah kosong pertanian yakni  $3.000\text{m}$ , jumlah pondok yakni ada 29 blok, dan 1 blok ada 5 pintu, rumah dinas ada 34. Adapun batas-batas wilayah Panti Sosial Bina Karya (PSBK) antara lain: sebelah barat berbatasan dengan perumahan BTN Margahayu, sebelah timur berbatasan dengan Jl. H. Moelyadi Djojomartono, Sebelah Selatan berbatasan dengan RT006/RW010 Bulak Kapal, sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman penduduk RT002/RW010.

Kantor Panti Sosial Bina Karya terdiri dari 2 lantai yaitu lantai pertama sebelah kanan digunakan untuk ruang pekerja sosial dan ruang seleksi/penerimaan, sebelah kiri digunakan untuk ruang rapat dan dibelakang ruang rapat ada ruangan psikologi dan koperasi. Kemudian lantai kedua ada perpustakaan, ruang kepala panti, ruang Tata Usaha, ruang Program &Advokasi Sosial, ruang Rehabilitasi Sosial, mushola dan *pantry*. Untuk menuju lokasi Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” yang khususnya menangani gelandangan, pengemis dan orang telantar dari pertama masuk lurus terus, kemudian belok kiri sampailah di pintu masuk panti sosial bina karya.

Sebelah kanan pintu gerbang masuk panti terdapat pos jaga satpam. Sebelah kiri sesudah pintu masuk panti terdapat gedung aula sebagai ruang keterampilan menjahit serta ruang kelas klien dan poliklinik. Di ruang poliklinik ada dua ruang rawat inap, ruang obat dan ruangan pendaftaran pasien, serta ruang kamar perawat.

Dalam panti terdapat ruang keterampilan las besi, ruang bengkel motor, ruang keterampilan sablon, ruang keterampilan salon, gudang natura, ruang keterampilan bengkel mobil, ruang keterampilan olahan pangan, ruang keterampilan pertukangan kayu serta ruang keterampilan tempe dan tahu. Dalam panti terdapat bangunan sementara tempat tinggal para klien. Ada aster, anggrek, cempaka, dahlia, cemara, beringin dan angsana.

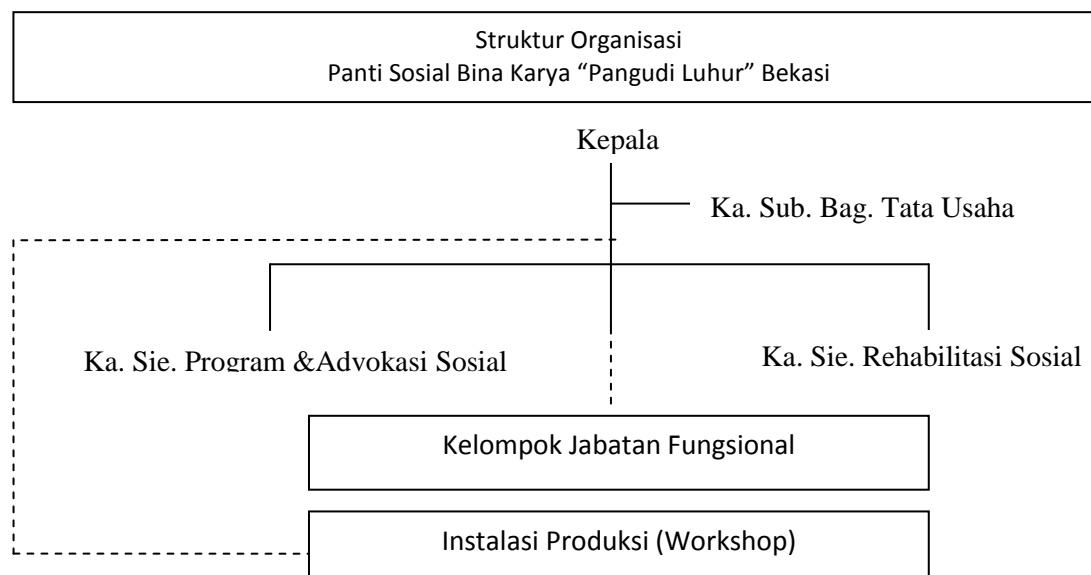
Tiap bangunan masing-masing memiliki  $\pm$  20-30 unit kamar. Untuk masing-masing kamar terisi oleh satu keluarga atau untuk bujangan maksimal terisi 4 orang. Jumlah warga binaan yang ada di Panti Sosial Bina Karya angkatan

ke II pada tahun 2012 sebanyak 268 orang. Selain bangunan tempat tinggal para klien juga disediakan macam-macam fasilitas yang ada dipanti terdapat musholla 1 unit, 1 lapangan, 1 empang, TPA 1 unit, MCK 6 unit dengan 20 pintu kamar mandi dimasing-masing bangunan.

### C. Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”

Pada struktur organisasi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” mengacu pada peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor: 106/HUK/2009. Terdiri dari kepala panti, Ka. Sub. Bag. Tata Usaha, Ka. Sie. Program & Advokasi Sosial, Ka. Sie. Rehabilitasi Sosial, kelompok jabatan fungsional dan instalasi produksi (workshop). Jumlah seluruh pegawai staf Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” sebanyak 56 orang.

#### Bagan II.1 Struktur Organisasi Panti sosial bina karya “Pangudi Luhur”



Sumber : Dokumentasi Pribadi milik TU

Pada bagan II.1 terlihat bahwa di dalam struktur organisasi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” urutan pertama adalah kepala panti. Di bawah kepala panti adalah kepala Sub. Tata Usaha. Jumlah karyawan yang bekerja di bagian tata usaha terdapat 18 orang staf. Di bawah Ka. Sub. Bag. Tata Usaha yakni Kepala seksi program advokasi sosial dan Ka. Sie. Rehabilitasi Sosial.

Jumlah karyawan yang bekerja di seksi Program &Advokasi Sosial terdapat 5 orang staf. Jumlah karyawan yang bekerja di seksi rehabilitasi sosial terdapat 11 orang staf. Kelompok Jabatan fungsional tertuang pada pasal 6 pada peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor : 106/HUK/2009 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di lingkungan departemen sosial menyebutkan bahwa :

“(1) kelompok Jabatan Fungsional dalam panti terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja panti. (3) tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab pada kepala panti. (4) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang ditetapkan oleh kepala panti”.<sup>24</sup>

Koordinator Jabatan Fungsional dan jabatannya sebagai pekerja sosial madya. Di bawah koordinator Jabatan Fungsional terdapat 13 orang yang terdiri dari Pekerja Sosial penyelia ada 9 orang dan Pekerja Sosial pelaksana lanjutan ada 4 orang. Yang menjabat sebagai kepala instalasi produksi (workshop) adalah pekerja sosial madya. Yang menjabat sebagai Penyuluh sosial muda ada 1 orang staf.

---

<sup>24</sup> Dokumentasi milik Program Advokasi Sosial (PAS).

**Tabel II.1**  
**Data Pekerja Sosial Di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”**

Tingkat Profesi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Pekerja Sosial Terampil Pelaksana Pemula			
Pekerja Sosial Terampil Pelaksana			
Pekerja Sosial Terampil pelaksana lanjutan		4	4
Pekerja Sosial Terampil Penyelia	6	3	9
Pekerja Sosial Ahli Pertama			
Pekerja Sosial Ahli Muda			
Pekerja Sosial Ahli Madya	1	1	2
<b>Jumlah</b>	7	8	15

Sumber : Dokumentasi Pribadi Milik TU

Berdasarkan tabel II.1 memperlihatkan bahwa jumlah Pekerja Sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya sebanyak 15 orang. Pekerja Sosial pelaksana lanjutan berjumlah 4 orang, yang menjadi Pekerja Sosial Penyelia berjumlah 9 orang dan yang menjadi Pekerja Sosial Madya berjumlah 2 orang. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya Pasal 6 Bab IV Jenjang Jabatan dan Pangkat disebutkan bahwa “Jabatan Fungsional Pekerja Sosial terdiri dari pekerja sosial tingkat terampil dan pekerja sosial tingkat ahli”.<sup>25</sup>

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pekerja Sosial tingkat ahli adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik

<sup>25</sup> Biro organisasi dan kepegawaian, *Op. Cit.*, hlm. 7.

analisis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial”.<sup>26</sup> Peringkat Pekerja Sosial pertama golongan III/A-III/B dengan pendidikan (S1), peringkat Pekerja Sosial muda dengan golongan III/C-III/D berpendidikan (S1) dan pekerja sosial madya dengan golongan IV/A-IV/B berpendidikan (S1). Tingkat Pekerja sosial Madya di PSBK “Pangudi Luhur” adalah LA dan AM.

Di samping itu, “Pekerja Sosial tingkat terampil yang mempunyai kualifikasi teknik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial”.<sup>27</sup> Pekerja sosial tingkat terampil terdiri dari pekerja sosial pelaksana pemula golongan IIA-IIB, pekerja sosial pelaksana golongan IIC-IIID, pekerja sosial pelaksana lanjutan dengan golongan IIIA-IIIB (tetapi tidak bergelar S1) dan pekerja sosial penyelia dengan golongan IIIC-IIID (tetapi juga tidak bergelar S1). Pekerja Sosial Penyelia diantaranya CK, SN, SW, NS, NY, MT, NM, YW dan IG. Pekerja Sosial Pelaksana lanjutan adalah TH, DR, KM dan ND. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang jabatan fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya pasal 3 menyebutkan bahwa:

“(1) Pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. (2) pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



#### D. Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial

Tugas pokok pekerja sosial menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 pasal 4 menyebutkan bahwa “tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial”.<sup>29</sup> Selanjutnya, pada Bab IV tentang jenjang Jabatan dan Pangkat pasal 6 berbunyi:

“(1) Jabatan fungsional pekerja sosial terdiri dari pekerja sosial tingkat terampil dan pekerja sosial tingkat ahli. (2) Jenjang Jabatan pekerja sosial tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pelaksana pemula, pekerja sosial pelaksana, pekerja sosial pelaksana lanjutan, pekerja sosial penyelia. (3) Jenjang jabatan pekerja sosial tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pertama, pekerja sosial muda, pekerja sosial madya”.<sup>30</sup>

**Tabel II.2**  
**Data obyektif dan latar belakang Pekerja Sosial fungsional**

No	Nama	Pendidikan	Agama	Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dra. Laila Kurniati A	S1 STKS Bandung, Kesejahteraan Sosial	Islam	Pekerja Sosial Madya	Koordinator Jabatan Fungsional
2.	Drs. Alimin	S1 STKS Bandung, Kesejahteraan Sosial	Islam	Pekerja Sosial Madya	Kepala Instalasi produksi
3.	Suhartiningsih, Bsw	DIII STKS Bandung, Kesejahteraan Sosial	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
4.	Cahya Kirani	SMPS Negeri Surakarta	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
5.	Sri Wibowo Murtini	SMKK Negeri Surakarta	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
6.	Nana Sutisna	SMEA	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
7.	Nuni Suryati	SMA Negeri Bekasi	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
8.	Martina Tarigan	SMA Subsidi katolik	Katolik	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
9.	Nana Sumarna	SPMA Neg. Bogor	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
10.	Yustina Winarti	SMPS Tarakanita Yogyakarta	Katolik	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
11.	Indra Guntur	SMA Negeri 1 Bekasi	Islam	Pekerja Sosial Penyelia	Trampil
12.	Tri Hartati, S. Sos	STISIP Widuri	Islam	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Trampil
13.	Dedeh Rusmini	SMA PGRI Cikampek	Islam	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Trampil
14.	Kusmirah	SMA (Ujian Persamaan) Bekasi	Islam	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Trampil
15.	Nia Dania	SMA Bahariwan '45 Jakarta	Islam	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Trampil

Sumber : Dokumentasi Pribadi Milik TU

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Berdasarkan tabel II.2 terlihat bahwa pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan Sarjana hanya terdapat 2 orang saja atau (13%) dari 15 pekerja sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”. Dengan kondisi tersebut, para pekerja sosial ahli ini harus dapat mengatur dan membina pekerja sosial yang terampil. Ikhtisar Jabatan pekerja sosial madya yang tertera dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 yakni melaksanakan pengungkapan dan pemahaman masalah, evaluasi terminasi dan rujukan serta melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial.

Uraian tugas yang ada didalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 tersebut antara lain: pengungkapan dan pemahaman masalah, evaluasi terminasi dan rujukan, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, barulah evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial. Ikhtisar jabatan pekerja sosial penyelia dan pelaksana lanjutan yang terdapat dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 adalah melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, melakukan evaluasi terminasi dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjutan. Uraian tugasnya sendiri yang terdapat dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 diantaranya: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), evaluasi terminasi dan rujukan. Bimbingan dan pembinaan lanjutan.

### **E. Program Kerja Pekerja sosial**

Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pekerja Sosial di unit kerjanya dan menetapkan Surat Tugas yang mengatur tiga hal yaitu: penugasan rutin dimana penetapan surat tugasnya berlaku untuk masa 1 (satu) tahun berlaku dari Januari sampai dengan Desember yang mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan pekerja sosial sesuai kewenangan per jenjang jabatan, penugasan insidental (sewaktu-waktu) bahwa penetapan surat tugasnya berlaku untuk setiap penugasan misal mengikuti seminar, dan diklat. Terakhir adalah penugasan surat tugasnya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pekerja Sosial sesuai jenjang jabatannya, maka Pekerja Sosial dapat melakukan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah. Para pekerja sosial selama bekerja di panti mengikuti peraturan dan disiplin kerja sesuai dengan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mereka jika tidak disiplin, kepala panti akan memberikan sanksi seperti teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administratif, tidak dinaikkan gaji berkala, tidak naik pangkat, terakhir adalah pemecatan.

Kepala panti juga akan melakukan pengawasan dengan monitoring terhadap kinerja seluruh pekerja sosial dan akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh para pekerja sosial. Apabila kinerja pekerja sosial kurang bagus, tidak disiplin atau kompetensinya kurang maka akan diingatkan untuk memperbaiki diri. Surat tugas rutin yang dilaksanakan pekerja sosial diberikan setahun sekali berlaku dari Januari sampai dengan Desember.

Dalam rangka mengoptimalkan karier pekerja sosial untuk mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam kenaikan jabatan dan pangkat, maka dalam pengangkatannya harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja di masing-masing unit kerja dengan jumlah pekerja sosial per jenjang jabatan. Pekerja Sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” terdiri dari pelaksana lanjutan, pekerja sosial penyelia, dan pekerja sosial madya. Rincian kegiatan Pekerja pelaksana lanjutan, pekerja sosial penyelia, dan pekerja sosial madya sesuai dengan jenjang jabatan terdapat pada bab V pasal 7 menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

Tabel II.3

**Rincian Kegiatan Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan**

Jabatan	No	Butiran Kegiatan
Pekerja sosial pelaksana lanjutan	1.	melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait dalam persiapan resosialisasi.
	2.	Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat luas.
	3.	Melaksanakan identifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan melalui pertemuan dengan masyarakat.
	4.	Melaksanakan kegiatan pemberian motivasi kepada calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	5.	Melaksanakan wawancara penentuan kelayakan menerima pelayanan calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	6.	Melaksanakan rujukan calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga pelayanan lain.
	7.	Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta.
	8.	Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta.
	9.	Mensosialisasikan rencana pemecahan masalah kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	10.	Memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bimbingan fisik.
	11.	Memberikan motivasi kepada penerima program penerima kesejahteraan sosial dalam bimbingan keterampilan.
	12.	Memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam resosialisasi.
	13.	Melaksanakan kegiatan bimbingan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	14.	Mengidentifikasi hambatan pelaksana kegiatan bimbingan psikososial terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	15.	Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengembangan masyarakat penerima program kesejahteraan sosial.
	16.	Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan advokasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	17.	Memberikan supervisi kepada pekerja sosial di bawahnya dalam pendampingan bimbingan fisik.
	18.	Memberikan supervisi kepada pekerja sosial di bawahnya pendampingan bimbingan keterampilan.
	19.	Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
	20.	Melaksanakan kegiatan rujukan penerima program kesejahteraan sosial.
	21.	Menyusun laporan kegiatan evaluasi, terminasi dan rujukan penerima program kesejahteraan sosial.
	22.	Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program kesejahteraan sosial dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan sosial.
	23.	Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk bimbingan dan pendampingan secara individual.
	24.	Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima pelayanan program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk koordinasi dengan pihak terkait.

Sumber: Buku Pedoman keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004

Pada tabel II.3 terlihat jelas bahwa rincian tugas pekerja sosial pelaksana lanjutan sebanyak 24 kegiatan. Rincian uraian kegiatan pekerja sosial

disederhanakan oleh para pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya dengan rincian kegiatan sebagai berikut Program kerja pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur Bekasi antara lain: *Pertama*, Para pekerja sosial melakukan kegiatan Pendekatan awal. *Kedua*, pengungkapan dan pemahaman masalah. *Ketiga*, penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi). *Keempat*, pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi). *Kelima*, evaluasi terminasi dan rujukan. *Keenam*, bimbingan dan pembinaan lanjutan. Program kerja tersebut dilaksanakan oleh para pekerja sosial.

Pekerja sosial pelaksana lanjutan juga dapat melakukan supervisi kepada pekerja sosial pelaksana yang ada dibawahnya dalam pendampingan bimbingan fisik dan pendampingan bimbingan keterampilan. Pekerja sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya tidak ada pekerja sosial pelaksana, maka pekerja sosial pelaksana lanjutan tidak dapat melakukan supervisi. Pekerja Sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya hanya ada pekerja sosial pelaksana lanjutan, penyelia dan madya.

Pekerja Sosial pelaksana lanjutan tersebut, bertugas membina dan membimbing para warga binaan sosial secara langsung dilapangan agar dapat berdaya mulai dari malakukan konsultasi dengan pihak terkait dalam persiapan resosialisasi, mengidentifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan, pemberian motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, resosialisasi, dan melakukan wawancara penentuan kelayakan menerima pelayanan calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial. Serta, melaksanakan rujukan calon penerima

program pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga pelayanan lain. Pekerja sosial pelaksana lanjutan juga melaksanakan kegiatan temu bahas penyusunan rencana pemecahan masalah dan hasil asesmen masalah, kebutuhan serta sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta.

Hasil dari melaksanakan kegiatan temu bahas penyusunan rencana pemecahan masalah dan hasil asesmen masalah tersebut, nantinya peksos dapat mensosialisasikan rencana pemecahan masalahnya. Ia kemudian barulah melaksanakan kegiatan bimbingan resosialisasi, bimbingan dan pembinaan lanjut dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan sosial dan pendampingan secara individual, serta dalam bentuk koordinasi dengan pihak terkait. Ia juga melakukan mengidentifikasi hambatan pelaksana kegiatan bimbingan psikososial, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengembangan masyarakat penerima program kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan advokasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial. Upaya identifikasi tersebut, nantinya dapat dievaluasi program pelayanan kesejahteraan sosialnya secara menyeluruh dan disusun dalam laporan kegiatan evaluasi, terminasi dan rujukan penerima program kesejahteraan sosial.

**Tabel II.4**  
**Rincian Kegiatan Pekerja Sosial Penyelia**

Jabatan	No.	Butiran Kegiatan
Pekerja sosial penyelia	1.	Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial terhadap pihak yang berpengaruh terhadap program penerima pelayanan kesejahteraan sosial.
	2.	Memberikan supervisi dalam kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja sosial dibawahnya.
	3.	Melaksanakan evaluasi kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	4.	Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta.
	5.	Menyusun rencana pemecahan bersama penerima pelayanan kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan bimbingan fisik.
	6.	Menyusun rencana pemecahan masalah bersama penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan bimbingan keterampilan.
	7.	Menyusun rencana pemecahan masalah bersama penerima program kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan resosialisasi.
	8.	Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima pelayanan kesejahteraan sosial sebagai penyaji rencana kegiatan bimbingan fisik, keterampilan dan resosialisasi.
	9.	Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta.
	10.	Memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bimbingan sosial.
	11.	Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial terhadap penerima program penerima kesejahteraan sosial.
	12.	Memberikan supervisi kepada pekerja sosial dibawahnya dalam resosialisasi.
	13.	Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk menggali dan mengkaitkan dengan sistem sumber yang tersedia.
	14.	

Sumber: Buku Pedoman keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004

Berdasarkan tabel II.4 terlihat jelas bahwa rincian kegiatan Pekerja sosial penyelia sebanyak 14 kegiatan. Uraian kegiatannya telah disederhanakan oleh pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya sehingga uraian tugasnya sama dengan Pekerja Sosial Pelaksana lanjutan. Uraian tugasnya diantaranya **Pertama**, Para pekerja sosial melakukan kegiatan Pendekatan awal. **Kedua**, pengungkapan dan pemahaman masalah.

**Ketiga**, penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi). **Keempat**, pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi). **Kelima**, evaluasi terminasi dan rujukan. **Keenam**, bimbingan dan pembinaan lanjutan. Program kerja tersebut dilaksanakan oleh para pekerja sosial.



Pekerja sosial penyelia dapat melakukan supervisi kepada pekerja sosial dibawahnya yakni pekerja sosial pelaksana lanjutan dalam kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dan resosialisasi. Tujuan ia melakukan supervisi tersebut, agar dapat memantau kinerja para pekerja sosial pelaksana lanjutan secara maksimal dan apabila kinerja pekerja sosial pelaksana lanjutan terbilang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, maka ia pun dapat memberikan arahan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Jika pekerja sosial pelaksana lanjutan mengalami permasalahan ketika melaksanakan tugas menyeleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dan resosialisasi maka pekerja sosial penyelia akan turut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

**Tabel II.5**  
**Rincian Kegiatan Pekerja Sosial Madya**

Jabatan	No.	Butiran Kegiatan
Pekerja sosial penyelia	1.	Memberikan supervisi dalam kegiatan asesmen masalah, kebutuh`an sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan kepada Pekerja Sosial.
	2.	Melaksanakan evaluasi proses asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
	3.	Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
	4.	Memberikan konsultasi dalam pengkajian kebijakan dan perencanaan program pelayanan kesejahteraan sosial.
	5.	Melaksanakan pengkajian kebijakan program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkatan makro.
	6.	Menyusun rencana program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkat makro.
	7.	Menyusun konsepsi pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial.
	8.	Melaksanakan uji coba model pelayanan kesejahteraan sosial.
	9.	Merumuskan dan mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial untuk tingkatan makro.
	10.	Melaksanakan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkatan makro.
	11.	Menyusun laporan hasil evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkatan makro.
	12.	Mempublikasikan laporan hasil evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkatan makro.

Sumber: Buku Pedoman keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:  
Kep/03/M.PAN/1/2004

Pada tabel II.5 terlihat bahwa pekerja sosial madya sebanyak 12 kegiatan. Uraian tugas pekerja sosial berdasarkan daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” tahun 2012 adalah pengungkapan dan pemahaman

masalah, evaluasi terminasi dan rujukan, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, barulah evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial. Para pekerja sosial madya ini harus dapat mengatur dan membina pekerja sosial yang terampil. Pekerja sosial madya tidak dapat terjun langsung kelapangan dalam membina warga binaan, karena yang bertugas langsung dilapangan membina warga binaan sosial adalah pekerja sosial terampil.

Pekerja sosial terampil jika tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi ketika melakukan pembinaan kepada warga binaannya maka barulah pekerja sosial ahli madya akan membantu para pekerja sosial terampil dalam melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah. Tugas pekerja sosial madya adalah melakukan pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial. Serta, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial dan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial.

#### **F. Program Pengangkatan Karier Pekerja Sosial**

Baik buruknya kinerja suatu pelayanan kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah sangat tergantung pada kinerja yang ditampilkan oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk meningkatkan kinerja pekerja sosial dapat dilakukan melalui suatu pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang baik dan profesional. Karier pekerja sosial adalah riwayat jabatan yang harus dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial selama masa tugasnya yang disusun berdasarkan pola pembinaan karier yang telah ditetapkan. Pembinaan karier merupakan suatu

rangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dilaksanakan dalam rangka meningkatkan optimalitas kinerja pekerja sosial.

Kedudukan pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi lainnya. Kedudukan pekerja sosial adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai Negara Sipil. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara umum diarahkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier.

Kaitan dengan pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme disamping terdapat jabatan-jabatan struktural juga terdapat jabatan-jabatan fungsional (salah satu diantaranya Jabatan Fungsional Pekerja Sosial). Untuk meningkatkan optimalitas kinerja pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka dipandang perlu dilaksanakan “program pembinaan karier pekerja sosial”. Baik yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS) maupun Instansi yang mengangkat pekerja sosial.

Departemen Sosial yakni dengan adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) Gelar adanya diklat sertifikasi (wajib) ini pesertanya calon/pekerja sosial ahli non s1/DIV Kesejahteraan sosial atau calon/pekerja sosial terampil non SMPS/SMK Kesos. Tujuannya agar meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam pelaksanaan kegiatan baik tingkat ahli ataupun terampil.

Kemudian adanya Diklat penjenjangan (wajib) ini pesertanya adalah pekerja sosial yang akan atau telah menduduki jabatan setingkat lebih tinggi.

Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta dalam melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan. jenis jenjang jabatannya terdiri dari jenis terampil diantaranya diklat pekerja sosial pelaksana pemula, diklat pekerja sosial pelaksana, diklat pekerja sosial pelaksana lanjutan, diklat pekerja sosial penyelia. Jenis diklat ahli antara lain diklat pekerja sosial pertama, diklat pekerja sosial muda, diklat pekerja sosial madya.

Dalam pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme pekerja sosial diadakan Diklat teknis substantif yang pesertanya pekerja sosial semua jenjang jabatan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Jenis diklatnya yakni diklat asesmen, diklat penyusunan laporan, diklat pengembangan kualitas pelayanan, dan diklat perencanaan sosial. Pendidikan gelar yakni pendidikan Diploma IV (DIV) pekerjaan sosial jurusan klinis dan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, pendidikan spesialis 1 (SP1) jurusan klinis dan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (dibuka mulai tahun 2006), Pendidikan spesialis 2 (SP2) setara Strata 3 (S3), penyelenggaraan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (sedang dalam tahap persiapan), sosialisasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS), bimbingan teknis pembentukan/pemantapan Tim Penilai dan sekretariat angka kredit pekerja sosial, penerbitan modul dan majalah pekerjaan sosial, layanan perpustakaan elektronik, studi banding pekerja

sosial, sistem informasi pekerja sosial, penyusunan standar kompetensi pekerja sosial, penyusunan dan penetapan etika pekerja sosial.

### **G. Kesimpulan**

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa sejak adanya keputusan Mensos RI No. 14/HUK/KEP/1994 tentang penamaan UPT Pusat/Panti/Sasana berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi sampai saat ini. Panti Sosial Bina Karya (PSBK) terletak di Desa Margahayu Jln. H. Moelyadi Joyomartono Bekasi Timur, Jawa Barat. Yang mempunyai tugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial gelandangan dan pengemis yang bersifat *preverentif, rehabilitatif* dalam bentuk resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang telantar agar mampu mandiri berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Struktur organisasi dan tata kerja Panti Sosial Bina Karya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI No. 106/HUK/2009. Jumlah seluruh pegawai staf Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” sebanyak 56 orang terdiri dari kepala panti, kepala sub. Tata Usaha, kepala seksi program advokasi sosial dan Ka. Sie. Rehabilitasi Sosial. Jumlah karyawan yang bekerja di bagian tata usaha terdapat 18 orang staf. Jumlah karyawan yang bekerja di seksi Program & Advokasi Sosial terdapat 5 orang staf. Jumlah karyawan yang bekerja di seksi rehabilitasi sosial terdapat 11 orang staf.

Pekerja Sosial pelaksana lanjutan berjumlah 4 orang, yang menjadi Pekerja Sosial Penyelia berjumlah 9 orang dan yang menjadi Pekerja Sosial

Madya berjumlah 2 orang. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya Pasal 6 Bab IV Jenjang Jabatan dan Pangkat disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Pekerja Sosial terdiri dari pekerja sosial tingkat terampil dan pekerja sosial tingkat ahli. Peringkat Pekerja Sosial pertama golongan III/A-III/B dengan pendidikan (S1), peringkat Pekerja Sosial muda dengan golongan III/C-III/D berpendidikan (S1) dan pekerja sosial madya dengan golongan IV/A-IV/B berpendidikan (S1). Tingkat Pekerja sosial Madya di Pangudi Luhur adalah LA. dan AM.

Pekerja sosial tingkat terampil terdiri dari pekerja sosial pelaksana pemula golongan IIA-IIB, pekerja sosial pelaksana golongan IIC-IID, pekerja sosial pelaksana lanjutan dengan golongan IIIA-IIIB (tetapi tidak bergelar S1) dan pekerja sosial penyelia dengan golongan IIIC-IIID (tetapi juga tidak bergelar S1). Pekerja Sosial Penyelia diantaranya CK, SN, SW, NS, NY, MT, NM, YW, dan IG. Pekerja Sosial Pelaksana lanjutan adalah TH, DR, KM, dan ND .

Tugas pokok pekerja sosial menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang jabatan fungsional pekerja sosial dan angka kreditnya pada Bab II Pasal 4, menyebutkan bahwa tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Jabatan para pekerja sosial ahli (madya) memiliki ikhtisar Jabatan yang tertera dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 yakni pengungkapan dan pemahaman

masalah, evaluasi terminasi dan rujukan serta melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial. Uraian tugas yang ada didalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 tersebut antara lain: pengungkapan dan pemahaman masalah, evaluasi terminasi dan rujukan, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, barulah evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial.

Ikhtisar jabatan pekerja sosial penyelia dan pelaksana lanjutan yang terdapat dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 adalah melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, melakukan evaluasi terminasi dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjutan. Uraian tugasnya sendiri yang terdapat dalam daftar uraian tugas pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi tahun 2012 diantaranya: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), evaluasi terminasi dan rujukan. Bimbingan dan pembinaan lanjutan.

Para pekerja sosial selama bekerja di panti mengikuti peraturan dan disiplin kerja sesuai dengan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Surat Tugas yang mengatur tiga hal yaitu: penugasan rutin dimana penetapan surat tugasnya berlaku untuk masa 1 (satu) tahun berlaku dari Januari sampai dengan Desember yang mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan

pekerja sosial sesuai kewenangan per jenjang jabatan, penugasan insidental (sewaktu-waktu) bahwa penetapan surat tugasnya berlaku untuk setiap penugasan misal mengikuti seminar, dan diklat. Terakhir adalah penugasan surat tugasnya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pekerja Sosial sesuai jenjang jabatannya, maka Pekerja Sosial dapat melakukan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah.

Berdasarkan buku Pedoman keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 bahwa rincian kegiatan pekerja sosial pelaksana lanjutan sebanyak 24 kegiatan, uraian tugas pekerja sosial penyelia sebanyak 14 kegiatan, dan uraian tugas pekerja sosial madya sebanyak 12. Namun, uraian kegiatannya telah disederhanakan oleh pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya sehingga uraian tugasnya sama dengan Pekerja Sosial Pelaksana lanjutan. Dalam upaya meningkatkan optimalitas kinerja pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka Departemen Sosial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS) maupun Instansi yang mengangkat pekerja sosial melaksanakan program pembinaan karier pekerja sosial tersebut.



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN KERJA TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL**

#### **A. Pengantar**

Bab tiga ini coba menjawab salah satu pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan apakah para pekerja sosial mengetahui tentang tugas dan fungsinya di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur”. Selain membahas mengenai tugas dan fungsi pokok pekerja sosial yang telah diketahui pekerja sosial, di sini juga menceritakan pembekalan dan pembinaan kinerja tugas dan fungsi apa saja yang diberikan dari atasan untuk meningkatkan kinerja secara profesionalisme. Pada sub-bab selanjutnya, akan dibahas secara rinci mengenai pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) “Pangudi Luhur” dalam melaksanakan kerja tugas fungsinya dan proses internalisasi pekerja sosial terhadap tugas dan fungsinya, Faktor-faktor apa yang menghambat tugas dan fungsi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik dari diri sendiri dan lembaga PSBK.

#### **B. Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial**

Fungsi umum Pekerja Sosial yaitu menolong dan membantu para klien yang mengalami masalah dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan maupun pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi Pekerja sosial tersebut bisa sebagai broker (perantara) dalam mengkaitkan klien dengan sistem sumber-sumber seperti pelayanan kesehatan. Fungsi pekerja sosial juga bisa sebagai supervisor,

moderator, fasilitator, dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat struktural dan instansi terkait. Peksos juga bisa sebagai motivator pendorong dan pemberi motivasi serta menjadi pendamping instruktur memberikan bimbingan kepada warga binaan. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan mental spiritual dan bimbingan keterampilan. Seperti yang dipaparkan oleh pekerja sosial yang berinisial NM selaku pekerja sosial penyelia sebagai berikut:

“fungsi umum Pekerja sosial itu memberikan bimbingan kepada warga binaan, bisa sebagai supervisor, fasilitator, moderator”.<sup>31</sup>

Sejauh ini, Para Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Karya telah mengetahui tugas pokok dan fungsi pada umumnya sesuai dengan yang tertera didalam Pasal 4 menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya. Dalam memberikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan binaan sosial, pekerja sosial memiliki 7 unsur uraian meliputi: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah/asesman, penyusunan rencana pemecahan masalah/rencana intervensi, pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, bimbingan dan pembinaan lanjut. Uraian tugas yang selama ini diketahui para pekerja sosial dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial tersebut, berdasarkan uraian tugas yang ada di Panti Sosial Bina Karya. Unsur uraian tugas pekerja sosial yang ada di PSBK disesuaikan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

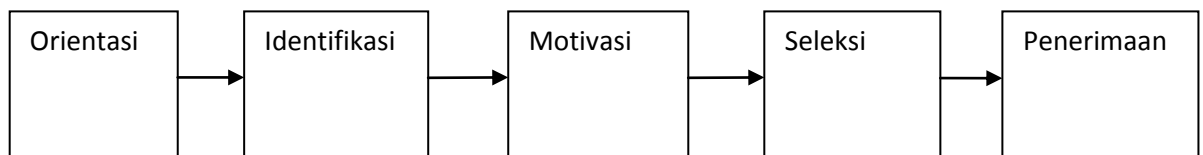
---

<sup>31</sup> Wawancara dengan NM pada tanggal 23 Oktober 2012.

dan angka kreditnya. Berikut penuturan pekerja sosial yang berinisial CK yang menjabat sebagai pekerja sosial penyelia:

“Tugas yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah pertamanya melakukan pendekatan awal dengan mengidentifikasi Warga Binaan Sosial untuk memperoleh data yang lebih rinci, motivasi dan seleksi, pengungkapan dan pemahaman masalah/asesman, penyusunan rencana pemecahan masalah/rencana intervensi, pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, bimbingan dan pembinaan lanjut. Unsur uraian tersebut tertuang di buku keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya”.<sup>32</sup>

### **Bagan III.1 Pendekatan Awal**



Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2013

Pada bagan III.1 terlihat bahwa pendekatan awal meliputi kegiatan orientasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi. Pendekatan awal adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan/dukungan/bantuan, dan peranserta dalam pelaksanaan program, termasuk upaya memperoleh gambaran pontensialitas sumber-sumber pelayanan, dan untuk mendapatkan calon Warga Binaan Sosial (WBS). Pada kegiatan Orientasi dan konsultasi disini para pekerja sosial melakukan kegiatan pengenalan program pelayanan kepada pemerintah daerah, instansi-instansi teknis yang terkait untuk mendapatkan pengesahan/pengakuan, dukungan/bantuan dan peransertanya dalam pelaksanaan program. Tujuan orientasi dan konsultasi adalah diperolehnya dukungan bantuan serta kemudahan-kemudahan dari berbagai instansi, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat dalam bentuk kerjasama.

<sup>32</sup> Wawancara dengan CK pada tanggal 24 Oktober 2012.

Dalam melakukan kegiatan Orientasi dan konsultasi ini, pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat tugas dari PSBK. Pihak Panti Sosial Bina Karya menugaskan para peksos melaksanakan kegiatan Orientasi dan konsultasi tidak hanya dalam satu tempat. Tiap pekerja sosial telah ditugaskan untuk melakukan kegiatan orientasi dan konsultasi kesuatu tempat yang harus dikunjungi dengan berpencar ke berbagai tempat berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pihak PSBK. Selama ini, pekerja sosial melaksanakan tugas pendekatan awal sebagaimana mestinya dengan baik. Seperti kutipan wawancara dengan pekerja sosial berinisial SN selaku pekerja sosial penyelia menuturkan bahwa:

“Dalam melakukan kegiatan Orientasi dan konsultasi, kita-kita para pekerja sosial ditugaskan tidak hanya dalam satu tempat melainkan keberbagai tempat untuk mendapatkan dukungan bantuan serta kemudahan-kemudahan dari berbagai instansi, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat dalam bentuk kerjasama. Ada yang ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, dan banyak lagi dech pokoknya”.<sup>33</sup>

Setelah peksos melakukan kegiatan Orientasi dan konsultasi, ia akan melakukan identifikasi. Identifikasi ialah kegiatan upaya untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang potensi lingkungan, termasuk sumber-sumber pelayanan, pasaran kerja dan usaha, serta fasilitas. Adanya identifikasi ini bertujuan agar tersedianya sumber-sumber potensial yang dapat didayagunakan untuk pelayanan, baik sumber alami, manusiawi maupun sosial, termasuk nilai-nilai positif tatanan kehidupan bermasyarakat setempat yang mendukung perubahan melalui proses pembangunan. Pekerja sosial mengetahui sumber-sumber yang melatarbelakangi keberadaan penyandang masalah sosial gelandangan dan pengemis ini untuk

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan SN pada tanggal 23 Oktober 2012.

diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data permasalahan guna menetapkan calon WBS tersebut.

Para pekerja sosial juga memberikan motivasi merupakan kegiatan pengenalan program pengenalan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menumbuhkan kemauan/keinginan dan semangat untuk menjadi WBS. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mendorong kemauan serta kemampuan calon penerima pelayanan, hasil penetapan kegiatan identifikasi untuk mengikuti program pelayanan. Motivasi ini diberikan agar calon warga binaan sosial tumbuh rasa percaya diri dan harga dirinya dalam kehidupan sosialnya. Misalnya memberikan motivasi agar para WBS yang menjadi peserta bimbingan keterampilan bisa hadir dan mengikuti bimbingan keterampilan dengan baik.

Pekerja sosial barulah melakukan proses seleksi yaitu kegiatan pengelompokan/klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak diterima menjadi calon penerima pelayanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial yang kesadaran dan tanggung jawabnya tidak diragukan lagi, sehingga dalam mengikuti program pelayanan dibekali kemauan dan kemampuan yang mantap dalam upaya memperbaiki kualitas hidupnya secara normatif. Berikut salah satu pekerja sosial pelaksana lanjutan yang berinisial KM mengungkapkan:

“Seleksi merupakan kegiatan untuk menentukan calon WBS yang memenuhi syarat atau tidak. Jika Calon WBS yang memenuhi syarat dapat diterima dan diberikan

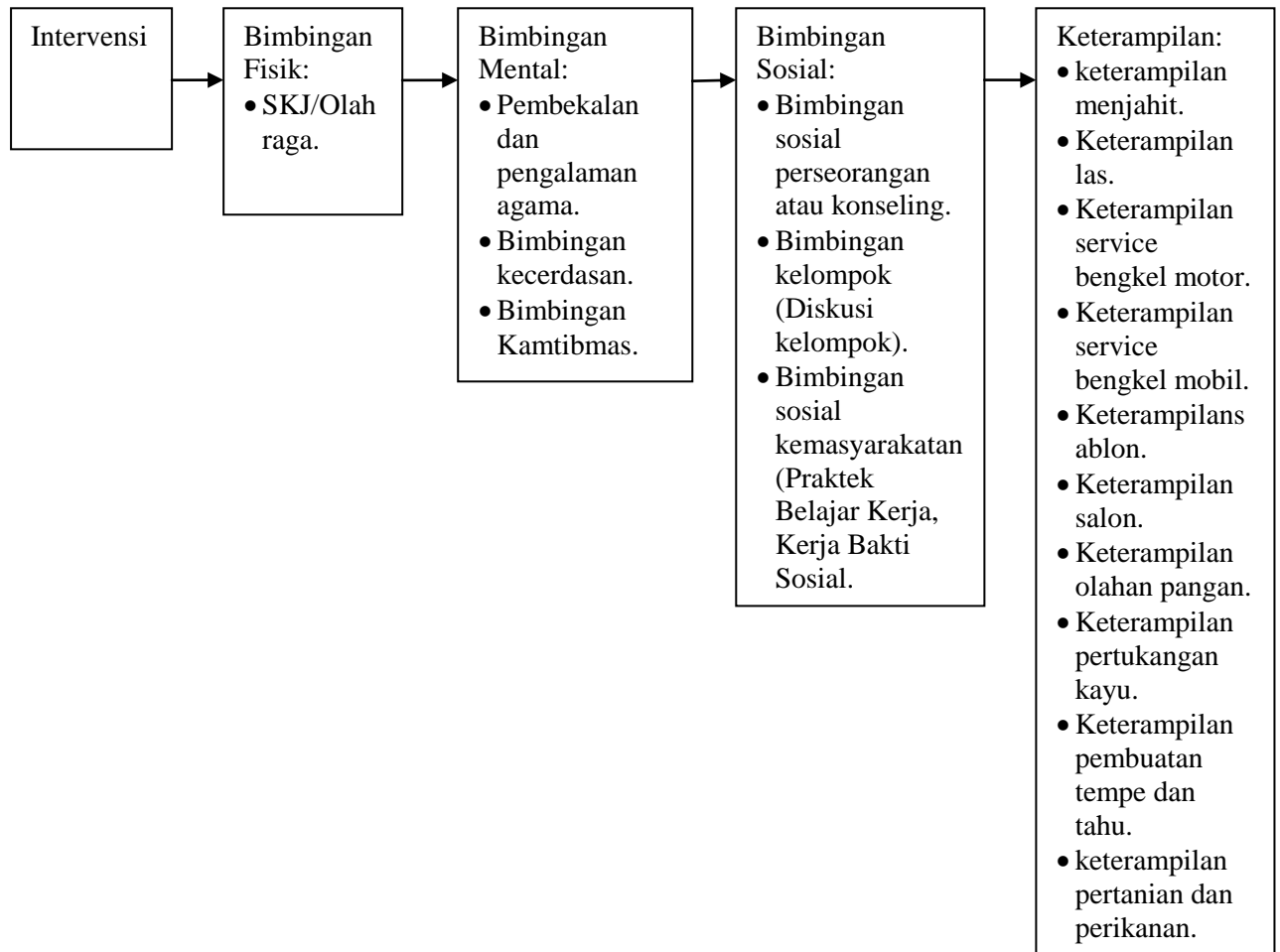
penempatan dalam pondok serta diberikan akomodasi, peralatan masak dan tempat tidur, serta yang tidak memenuhi syarat dirujuk sesuai kondisi PMKSnya”<sup>34</sup>.

Warga Binaan Sosial yang telah mengikuti tahap seleksi akan dilakukan proses penerimaan. Kegiatan Penerimaan secara operasional adalah serangkaian kegiatan administratif maupun teknis yang meliputi registrasi yang merupakan kegiatan administratif pencatatan dalam buku induk agar nantinya pekerja sosial dapat memberikan Nomor Induk kepada WBS tersebut dan mengkomplikasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan informasi/biodata WBS secara lengkap supaya peksos juga bisa melakukan pengungkapan dan pemecahan masalah serta agar dapat melakukan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan pada saat WBS hasil seleksi secara syah diterima sebagai WBS di panti. Peksos tersebut akan melakukan kegiatan pengelompokan bakat dan minat para penerima pelayanan dipadukan dengan program bimbingan, khususnya bimbingan keterampilan kerja praktis yang sudah diprogramkan untuk menumbuhkan semangat dan kecintaan dalam mengikuti bimbingan kerja guna terciptanya kelancaran, daya guna dan hasil guna pelayanan di bidang penempatan penerima pelayanan mengikuti bimbingan keterampilan kerja sesuai bakat dan minatnya serta penyaluran usaha/kerja yang sudah dipersiapkan/diprogramkan.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan KM Pada tanggal 15 Oktober 2012.

### Bagan III.2 Proses Rehabilitasi Sosial



Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2013

Pada bagan III.2 memperlihatkan bahwa dalam proses rehabilitasi sosial meliputi kegiatan intervensi, bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan keterampilan. Dalam melakukan pemecahan masalah (intervensi) dilaksanakan setelah melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil pengungkapan dan pemahaman masalah tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil pengungkapan dan pemahaman masalah dilakukan tidak hanya diawal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri dengan proses

pelayanan. Pelaksanaan proses kegiatan sesuai dengan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah tersebut sebagai rencana pemecahan masalah yang nantinya akan dilaksanakan sebuah kegiatan. seperti kegiatan bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan.

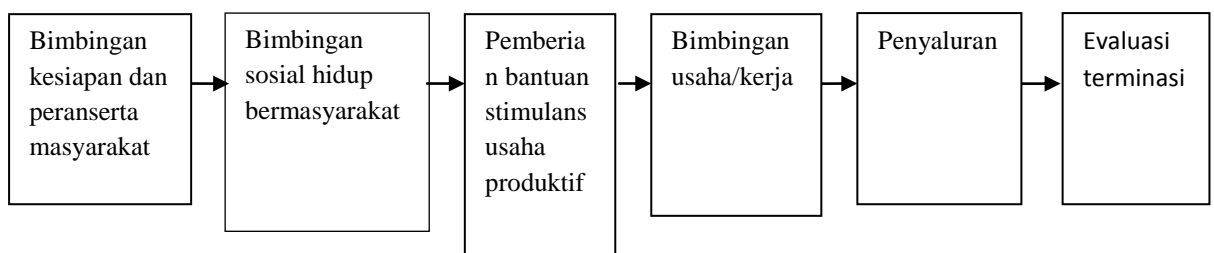
Dalam kegiatan bimbingan fisik, pekerja sosial memberikan bimbingan penanaman kedisiplinan yang dapat berupa latihan-latihan jasmani berupa olahraga dan penyampaian pengetahuan kepada WBS untuk menjaga, merawat dan meningkatkan kesehatan, ketahanan fisik/tubuh mereka agar kondisi ini mendukung kemampuannya. Pada bimbingan mental sendiri, peksos memberikan bimbingan keagamaan agar para Warga Binaan Sosial dapat meningkatkan kemampuan menjalankan ibadah agama, meningkatnya ketahanan sosial WBS terhadap pengaruh buruk lingkungan sosialnya dan mampu berintegrasi sosial secara wajar. Pekerja sosial juga memberikan bimbingan sosial kepada WBS untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan motivasi diri secara mantap bagi setiap penerima pelayanan untuk dapat bertata kehidupan dan penghidupan layak di dalam tatanan hidup bermasyarakat secara normatif dalam arti sudah diwarnai dengan pulihnya harga diri, percaya diri, kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial, penyesuaian diri serta penguasaan keterampilan kerja untuk dapat bermata pencaharian layak. WBS juga diberikan bimbingan keterampilan oleh peksos supaya nantinya WBS bisa memiliki keterampilan kerja praktis untuk dapat hidup bermata pencaharian/penghasilan secara normatif guna membiayai diri atau keluarganya sehingga penerima pelayanan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan



nasional. Berikut pekerja sosial berinisial IG selaku pekerja sosial penyelia mengungkapkan:

“Dalam melaksanakan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial memang mengutamakan profesi pekerja sosial tentunya di lengkapi dengan profesi lain seperti instruktur luar keterampilan yang jumlah dan kualitasnya akan diatur dalam standar SDM. Proses rehabilitasi sosial ini meliputi intervensi, bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan”.<sup>35</sup>

### **Bagan III.3 Tahap Resosialisasi**



Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2013

Pada bagan III. 3 merupakan tahap resosialisasi mencakup serangkaian kegiatan meliputi : bimbingan kesiapan dan peranserta masyarakat, bimbingan sosial hidup bermasyarakat, pemberian bantuan stimulasi usaha produktif, bimbingan usaha/kerja, penyaluran dan evaluasi terminasi. Tujuan pekerja sosial memberikan bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat adalah untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk dapat menerima dan dapat memperlakukan penerima pelayanan secara wajar sebagai anggota masyarakat serta berperanserta aktif membantu proses pemulihan harga diri, percaya diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial, penyesuaian diri, bermata pencaharian layak. Peksos barulah melakukan bimbingan sosial hidup bermasyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan

<sup>35</sup>Wawancara dengan IG pada tanggal 24 Oktober 2012.

kemauan dan kemampuan motivasi diri secara mantap bagi setiap penerima pelayanan untuk dapat bertata kehidupan dan penghidupan layak di dalam tatanan hidup bermasyarakat sebagaimana warga/anggota masyarakat lainnya secara normatif.

Dalam bimbingan usaha/kerja, WBS akan diikutsertakan kedalam Praktek Belajar Kerja (PBK) yang diharapkan nantinya WBS tersebut dapat memiliki wirausaha sendiri dan memiliki kepercayaan diri dengan memiliki suatu keahlian sehingga bisa bekerja di perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam tahap ini, pekerja sosial menjelaskannya secara detail mengenai perkembangan warga binaan sosial dan menyakinkan tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar warga binaan sosial yang menjadi anak didiknya serta organisasi terkait, seperti Dinas Sosial agar bersedia menerima dan memperlakukan mereka secara wajar. Berikut pekerja sosial berinisial SN selaku pekerja sosial penyelia mengungkapkan:

“Warga binaan sosial akan melakukan praktek belajar kerja agar sebelum mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, WBS dapat memiliki wirausaha sendiri dan memiliki kepercayaan diri dengan memiliki suatu keahlian sehingga bisa bekerja di perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki”.<sup>36</sup>

Setelah warga binaan sosial mengikuti PBK, ia akan diadakan penyaluran. Penyaluran adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan kedalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat secara normatif baik di lingkungan keluarga, masyarakat daerah asal maupun kejalur-jalur lapangan kerja dan berwirausaha secara mandiri. Tujuan penyaluran adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan penerima

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan SN pada tanggal 23 Oktober 2012.

pelayanan yang diliputi suasana rasa percaya diri, harga diri, tanggung jawab sosial, kemandirian dalam mata pencaharian layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pekerja sosial berinisial SW yang menjabat sebagai pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Kegiatan penyaluran ini bertujuan agar warga binaan tumbuh rasa percaya diri dan tanggung jawab untuk merubah nasibnya lebih baik dengan bekerja penuh kemandirian dalam mata pencaharian layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat”.<sup>37</sup>

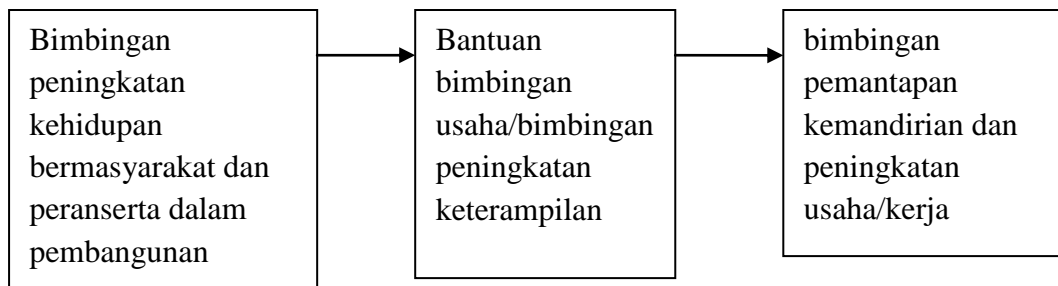
Evaluasi terminasi merupakan pengakhiran pelayanan dilaksanakan untuk memastikan hasil evaluasi umum terhadap klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dipersiapkan WBS dalam proses pengakhiran berjalan secara wajar, dimana pemutusan pelayanan tidak memutuskan konflik psikologis yang dapat mengganggu WBS tersebut dan akan dibuat kesepakatan pemutusan hubungan kontrak antara pekerja sosial/lembaga dengan klien dalam bentuk surat pernyataan. Adanya kegiatan ini juga supaya administrasi penanganan kasus dapat berlangsung dengan tertib, dibuatkan surat pemberitahuan formal bahwa proses pembinaan kepada WBS sudah berakhir, kepada pihak-pihak terkait, nantinya Warga Binaan Sosial akan diberikan paket bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penutupan pencatatan kasus klien. Pekerja sosial berinisial IG selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 4 Desember 2012.

“Evaluasi ini dilakukan agar dapat diketahui hambatan dan permasalahan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial”.<sup>38</sup>

#### **Bagan III.4 Tahap Bimbingan Lanjut**



Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2013

Berdasarkan bagan III.4 merupakan tahap bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta penghidupannya secara layak. Tahap bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peranserta dalam pembangunan, bantuan bimbingan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan, bimbingan pemantapan kemandirian dan peningkatan usaha/kerja. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peranserta dalam pembangunan merupakan kegiatan bimbingan/tuntunan untuk lebih memantapkan kemampuan penyesuaian diri dalam tata hidup bermasyarakat dan keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dalam

<sup>38</sup> Wawancara dengan IG pada tanggal 24 Oktober 2012.

bentuk pemberian bantuan ulang baik berupa peralatan dan bahan permodalan maupun pemantapan keterampilan, sehingga jenis dan jumlah usaha/ kerjanya lebih berkembang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi usaha/kerja yang mantap dan pemekaran usaha/kerja dengan memanfaatkan bantuan pengembangan usaha/kerja, sehingga lebih memungkinkan perbaikan kualitas hidup penerima pelayanan menuju kemandirian. Bimbingan pemantapan usaha/kerja adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan guna dapat meningkatkan usaha ekonomis, produktif, sehingga dapat mengembangkan jenis dan jumlah penghasilannya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan usaha kerja para eks penerima pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Pekerja sosial berinisial NM selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Tujuan kegiatan tersebut agar terwujudnya peningkatan, kemantapan kemauan dan kemampuan penerima pelayanan dalam hidup bermasyarakat secara mandiri dan mampu berperanserta dalam pembangunan”.<sup>39</sup>

### **C. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Pekerja Sosial**

Pekerja Sosial terdiri dari Pekerja Sosial terampil dan pekerja sosial madya. Pekerja sosial terampil yang ada di PSBK sebanyak 13 orang, terdiri dari : pekerja sosial pelaksana lanjutan ada 4 orang, pekerja sosial penyelia sebanyak 9 orang yang pendidikannya dari SMA dan pekerja sosial Madya ada 2 orang. Pekerja sosial madya merupakan pekerja sosial tingkat ahli. Pekerja sosial madya

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan NM pada tanggal 23 Oktober 2012.

ada 2 orang yaitu LA dan AM yang memiliki pendidikan S1 kesejahteraan sosial sehingga menjadi pekerja sosial tingkat ahli.

Pekerja sosial tingkat ahli adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis dibidang pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial madya memiliki pendidikan S1 kesejahteraan sosial. Satu-satunya Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di Indonesia yang berada di bawah naungan Departemen sosial yang menyelenggarakan pendidikan profesional adalah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Pekerja sosial telah kuliah dari STKS memiliki kesempatan lebih besar menjadi pekerja sosial di lingkungan Kementerian sosial sebagai pekerja sosial ahli. Pekerja sosial yang berpendidikan kesejahteraan sosial telah diberikan pengajaran tentang penanganan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pekerja sosial berinisial LA selaku pekerja sosial madya mengungkapkan.

“Peluang saya menjadi pekerja sosial sangatlah besar karena saya dulu kuliah di STKS bandung dan memiliki pendidikan dibidang kesejahteraan sosial akan tetapi walaupun saya memiliki pendidikan kesejahteraan sosial tetap aja saya ikut tes CPNS itu ada soal *essay* sama test wawancara seputar bagaimana cara membina, dan menangani PMKS”.<sup>40</sup>

Pekerja sosial yang memiliki pendidikan kesejahteraan sosial dari STKS termasuk pekerja sosial madya atau ahli ini mengetahui akan ketentuan tugas dan fungsinya seharusnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan membentuk internalisasi dengan baik. Dalam tugasnya sendiri pekerja sosial

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan LA pada tanggal 20 Mei 2013.

madya atau ahli diantaranya pengungkapan dan pemahaman masalah, evaluasi terminasi dan rujukan, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial barulah melakukan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara prakteknya terlihat bahwa ada salah satu pekerja sosial madya yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dalam membuat laporannya tidak secara tepat waktu dan mengalami keteteran. Dalam membuat laporan tersebut merupakan sebagai satuan hasil yang dipersyaratkan setelah selesai melaksanakan kegiatan agar nantinya dapat dievaluasi secara nilai-nilai ilmiah kesejahteraan sosial yang dapat di pertanggung-jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan secara *valid* dikarenakan ia harus melakukan pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, dan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial. “Suatu kegiatan dapat dinyatakan kegiatan profesional yakni kegiatan tersebut berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai ilmiah yang akan mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan menjadi kegiatan ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan secara *valid*”.<sup>41</sup>

Pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial bisa diangkat sebagai pembina pekerja sosial agar dapat membantu kepala panti dalam mengatur dan membina pekerja sosial yang terampil. Ia juga harus dapat

---

<sup>41</sup>Dwi heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1991, hlm. 10.

melaksanakan tugas secara ilmiah dan maksimal yang nantinya akan menjadi panutan untuk para pekerja sosial terampil. Sikap yang ditunjukkan pekerja sosial tersebut belum membentuk internalisasi dengan baik karena ia dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dan tidak semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial atau disebut juga sebagai pekerja sosial ahli madya yang ada di PSBK ini terbilang kurang.

Ia pun menjadi tidak dapat mentransfer ilmu yang dimiliki secara efektif dalam menjalankan kinerja ke dalam kehidupan sehari-hari karena muncul kemalasan dalam dirinya untuk melakukan pengembangan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. Sikap pekerja sosial tersebut terlihat bahwa belum membentuk internalisasi dengan baik. Proses internalisasi dimana seseorang mengetahui, paham, sadar dari segi berbuat sesuai ketentuan dan tuntutan yang diperlukan dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya kedalam kehidupan sehari-hari selama ia bekerja dan menjadi pegawai di PSBK.

Pekerja sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya telah mengetahui dan menerima peraturan khusus selama bekerja melaksanakan uraian kegiatan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Seharusnya ia dapat menyandang peran-peran yang ditetapkan baginya dan memahami identitasnya sendiri dalam menjalankan peran-peran yang harus dilakukannya. Secara prakteknya sendiri terlihat bahwa pekerja sosial terampil belum dikatakan pekerja sosial profesional karena latar belakang yang dimiliki pekerja sosial tidak dilatarbelakangi bidang



kesejahteraan sosial maka dalam membimbing dan memberikan pengajarannya terbilang kurang.

Salah satu pekerja sosial yang menjadi instruktur dalam terlihat jarang sekali berada di dalam ruang keterampilan untuk memberikan pengajaran kepada Warga Binaan Sosial. Ia pun menjadi tidak tahu perkembangan WBS dalam menyerap ilmu keterampilan yang didapatkannya. Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial tersebut perlu mengutamakan profesi pekerja sosial selain dilengkapi dengan profesi instruktur keterampilan dari luar. Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, mereka akan mengalami berbagai kendala ketika bertugas dilapangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kesejahteraan sosial dan kurangnya kemampuan yang dimiliki menjadi seorang pekerja sosial yang profesional dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pada saat panti membangun poliklinik baru dan renovasi pondok anggrek, Warga Binaan Sosial dimanfaatkan dan dipekerjakan sebagai pekerja bangunan. Seharusnya pekerja sosial menegur WBS untuk mengikuti keterampilan dengan maksimal bukan dijadikan sebagai pekerja bangunan. WBS selama berada di dalam panti tersebut diikutsertakan dalam belajar keterampilan akan tetapi karena mereka bekerja jadi pekerja bangunan maka belajarnya pun menjadi terhambat. Para pekerja sosial melihat kondisi tersebut cenderung membiarkan begitu saja WBS yang menjadi anak didiknya bekerja sebagai pekerja bangunan.

Ia hanya memantau warga binaannya dan melakukan pendekatan dengan mereka pada saat jam kerja saja. Di luar jam kerja, dia tidak berinisiatif untuk mengunjungi tiap pondok, memantau aktifitas yang dilakukan para WBS. Salah satu contoh disaat masih dalam jam kerja bahkan ada salah satu pekerja sosial penyelia yang berinisial IG lalai dan kurang bertanggung jawab dalam bekerjanya. Di dalam ketentuan jadwal kegiatan rehabilitasi sosial IG diharuskan memberikan bimbingan kewirausahaan akan tetapi ia terlihat lebih mengutamakan melakukan aktivitas memancing ikan yang merupakan salah satu hobinya ditempat pemancingan yang khusus disediakan untuk keterampilan perikanan yang ada di PSBK ketimbang memberikan bimbingan kewirausahaan. Adnya kondisi tersebut, maka pekerja sosial lain terpaksa turut andil menggantikan pekerja sosial yang tidak melaksanakan bimbingan kewirausahaan tersebut.

Masing-masing jabatan Pekerja Sosial mengetahui akan ikhtisar jabatan dan uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh para Pekerja Sosial. Tugas yang selama ini dilaksanakan oleh pekerja sosial berdasarkan uraian tugas yang tertera di Panti Sosial Bina Karya dan berdasarkan dengan ketentuan jadwal kegiatan rehabilitasi sosial. Dalam unsur kegiatan uraian tugas pekerja sosial terampil pelaksana lanjutan dan penyelia ini memiliki perbedaan dalam uraian tugasnya. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M. PAN/1/ 2004 bahwa Pekerja sosial terampil pelaksana lanjutan memiliki 24 kegiatan dan Pekerja Sosial Penyelia ada 14 kegiatan uraian tugas. Pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya menyederhanakan uraian tugas pekerja sosial pelaksana lanjutan dan penyelia menjadi 7 uraian tugas. Berikut kutipan wawancara dengan

pekerja sosial berinisial ND selaku pekerja sosial pelaksana lanjutan mengungkapkan:

“Saya sejauh ini melaksanakan 7 uraian tugas sesuai yang tertera di Panti Sosial Bina Karya saja. Walaupun, didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/03/M. PAN/1/2004 bahwa Pekerja sosial terampil pelaksana lanjutan memiliki 24 kegiatan”.<sup>42</sup>

Sebenarnya di dalam uraian tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/03/M. PAN/1/2004, uraian tugas pekerja sosial pelaksana lanjutan dan penyelia tidak sama, karena uraian kegiatan pekerja sosial penyelia tersebut tidak melakukan pendekatan awal mengidentifikasi calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial melalui pertemuan dengan masyarakat. Kegiatan pekerja sosial penyelia adalah melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial terhadap pihak yang berpengaruh terhadap program penerima pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan kegiatan pemberian motivasi kepada calon warga binaan sosial, melaksanakan wawancara penentuan kelayakan menerima pelayanan kesejahteraan sosial. Setelah itu barulah ia melaksanakan rujukan calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga lain lagi.

Pekerja sosial penyelia seharusnya langsung memberikan supervisi dalam kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja sosial, melaksanakan evaluasi kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, menyusun rencana pemecahan bersama penerima pelayanan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan ND Pada tanggal 30 November 2012.

kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan bimbingan fisik. Peksos tersebut barulah menyusun rencana pemecahan masalah bersama penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan bimbingan keterampilan. Setelah itu menyusun rencana pemecahan masalah bersama penerima program kesejahteraan sosial dalam rencana kegiatan resosialisasi.

Pekerja sosial penyelia juga melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima pelayanan kesejahteraan sosial sebagai penyaji rencana kegiatan bimbingan fisik, keterampilan dan resosialisasi, melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta. Ia juga diharuskan dapat memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bimbingan sosial, melaksanakan kegiatan bimbingan sosial terhadap penerima program penerima kesejahteraan sosial, memberikan supervisi kepada pekerja sosial dibawahnya dalam resosialisasi. Peksos setelah itu akan melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk menggali dan mengkaitkan dengan sistem sumber yang tersedia. Berikut petikan wawancara dengan pekerja sosial berinisial CK Selaku Pekerja Sosial penyelia mengungkapkan:

“Uraian tugas pekerja sosial yang tertera dalam peraturan kemenpan no 3, seharusnya saya sebagai pekerja sosial penyelia tidak melakukan proses identifikasi klien dalam pendekatan awal lagi. Akan tetapi, saya hanya memberikan supervisi kepada pekerja sosial yang dalam kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja sosial. Namun, selama ini jika pekerja sosial pelaksanaanya

sedang tidak ada ditempat, jadinya saya yang melakukan proses identifikasi klien dalam pendekatan awal”<sup>43</sup>.

Tugas dan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh pekerja sosial terampil berdasarkan ketentuan uraian tugas di Panti Sosial Bina Karya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial tersebut. Para Pekerja Sosial telah bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab dan proksi yang diembannya. Mulai dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusun rencana pemecahan masalah (rencana intervensi), pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi), evaluasi terminasi dan rujukan, bimbingan dan pembinaan lanjutan. Seperti DR yang menjabat sebagai pekerja sosial pelaksana lanjutan menuturkan:

“Sejauh saya sebagai anggota peksos dan pekerja sosial lainnya sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan baik sesuai dengan ketentuan yang ada di PSBK. Namun hasilnya belum menjamin secara maksimal pula dikarenakan adanya permasalahan seperti banyak warga binaan sosial yang berbohong memalsukan identitas contohnya pendidikan dan alamat”<sup>44</sup>.

Pengungkapan dan penelaahan masalah dengan cara melakukan kunjungan kerumah WBS. Kunjungan rumah sebagai upaya untuk mengetahui latar belakang, kondisi obyektif tata kehidupan dan penghidupannya. Kunjungan rumah ini dilakukan agar nantinya bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang identitas WBS. Pengungkapan dan penelaahan masalah juga dilakukan untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penempatan dalam program pelayanan rehabilitasi sosial. Salah satu proses

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan CK pada tanggal 24 Oktober 2012.

<sup>44</sup> Wawancara dengan DR pada tanggal 23 Oktober 2012.

identifikasi dan motivasi warga binaan sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar III.1**  
**Proses Identifikasi dan Motivasi Warga Binaan Sosial**



Sumber: Dokumentasi Penulis pada tanggal 5 oktober 2012

Pada gambar III.1 merupakan kegiatan pendekatan awal proses identifikasi dan motivasi yang dilakukan oleh TR salah satu pekerja sosial pelaksana lanjutan. Identifikasi merupakan kegiatan upaya untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang potensi lingkungan, termasuk sumber-sumber pelayanan, pasaran kerja dan usaha, serta fasilitas. Calon Warga Binaan Sosial (WBS) akan diterima di Panti Sosial Bina Karya ini telah memenuhi persyaratan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Identifikasi sistem sumber disini calon WBS yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikannya untuk memilih minat dan bakatnya mengikuti keterampilan.

Pekerja sosial akan melakukan seleksi. Kegiatan Seleksi yaitu kegiatan pengelompokan/klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak diterima menjadi calon penerima pelayanan. WBS yang telah

diseleksi dan diterima menjadi WBS di panti akan dilakukan registrasi sebagai suatu teknik pekerjaan sosial untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi warga binaan sosial melalui penggalian latar belakangnya, riwayat permasalahan, keadaan keluarga dan orang-orang terdekat dengannya, keinginannya, kekecewaan potensi dan kekurangan yang dihadapinya. Tujuannya diadakan seleksi untuk memperoleh calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial yang kesadaran dan tanggung jawabnya tidak diragukan lagi, sehingga dalam mengikuti program pelayanan dibekali kemauan dan kemampuan yang mantap dalam upaya memperbaiki kualitas hidupnya secara normatif.

Pekerja sosial penyelia seharusnya tidak melakukan proses pendekatan awal dengan melakukan registrasi dan mengkompilasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan data penerima pelayanan lengkap dengan segala informasi atau biodatanya. Proses pendekatan awal penerimaan tertera dalam uraian tugas PSBK maka ia harus melaksanakan tugas tersebut. Walaupun di dalam buku pedoman keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 tidak ada pendekatan awal menyeleksi penerimaan akan tetapi melakukan supervisi kepada pekerja sosial yang melakukan seleksi penerimaan.

**Gambar III.2**  
**Pengungkapan dan Penelaahan Masalah**



Sumber : Dokumentasi Penulis pada tanggal 11 Oktober 2012

Pada Gambar III.2 merupakan Pengungkapan dan penelaahan masalah (asesmen) yang dilakukan oleh NY. Pengungkapan dan penelaahan masalah merupakan sebuah upaya untuk menelusuri, menggali data penerima pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, dalam upaya untuk melakukan proses rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi penerima pelayanan. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, pekerja sosial yang bertugas di panti sosial, perlu secara bijaksana mengetahui dan memahami akar permasalahan yang ada pada warga binaan sosial di pantinya.

Caranya, dengan cara para pekerja sosial menggali dan mengukur kondisi yang ada pada WBS baik yang berkaitan dengan masalahnya maupun kemampuan yang mereka miliki bahkan termasuk upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Peksos tersebut barulah melakukan analisa terhadap kondisi yang ada, guna menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam membantu klien mengatasi masalahnya. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memegang ketentuan peraturan pelayanan profesional, seperti memberikan kesempatan dan kesadaran penuh bahwa klien adalah pihak



yang paling berhak untuk memutuskan hal-hal yang baik bagi dirinya. Perlu pula disadari batas-batas kewenangan profesi, dan secara profesional tetap menjaga kerahasiaan klien.

Guna mencapai tujuan tersebut, digunakanlah satu pendekatan yang melihat permasalahan dan pemilihan alternatif penyelesaiannya dari berbagai aspek. Pendekatan semacam ini dalam pekerjaan sosial dikenal dengan istilah intervensi atau praktek pekerjaan sosial menyeluruh. Adapun aspek yang ditelaah meliputi: fisik yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah seperti kondisi kesehatan klien, riwayat sakit, adanya pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan adanya alergi berikut pengobatan yang pernah atau masih dijalani.

Mental spritual atau psikologis yang perlu dipahami oleh pekerja sosial adalah mencakup kepribadian, kecerdasan, kemampuan, kematangan emosi klien termasuk bakat, minat, persepsi diri dan aspirasi dalam menjalani hidupnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, kepribadiannya, bakat dan minat serta kematangan emosionalnya. Sosial yang perlu dipahami pekerja sosial mencakup kondisi keluarga, sekolah, lingkungan tempat klien tinggal. Keterampilan, yang perlu dipahami oleh pekerja sosial mencakup pendidikan formal maupun non formal, keterampilan yang telah dikuasai WBS termasuk pekerjaan yang pernah ditekuni sebelum menjadi WBS di dalam panti sosial.

Pengumpulan data itu pun dilakukan pekerja sosial dengan melalui wawancara langsung dan bertatap muka dengan eks WBS. Setelah selesai

menjalani proses seleksi menjadi peserta program pelayanan, barulah WBS akan ditempatkan disebuah pondok. Penempatan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja berdasarkan pengelompokan data tentang minat dan bakat serta kemungkinan penempatan di lapangan kerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat ditentukannya jenis program pelayanan yang diberikan secara tepat.

Pekerja sosial melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah yang telah dilakukan. Hasil pengungkapan dan pemahaman masalah tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil asesmen dilakukan tidak hanya diawal proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil asesmen tersebut meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial. Kegiatan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan yang dilakukan oleh para pekerja sosial. Seperti SW, ND, IG, NS, MT merupakan pekerja sosial yang menjadi pendamping instruktur keterampilan. Proses pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar III.3**  
**Bimbingan Fisik : SKJ/olahraga**



Sumber : Dokumentasi Penulis pada tanggal 10 Oktober 2012

Gambar III.3 tersebut merupakan bimbingan SKJ/OR yang dilakukan oleh DR. SKJ/OR ialah suatu kegiatan bimbingan fisik. Olah raga tersebut dilakukan setiap hari jumat. Yang menjadi instruktur senam SKJ/OR ini adalah DR salah satu pekerja sosial pelaksana lanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk kesegaran jasmani para karyawan Panti Sosial Bina Karya dan para WBS agar jasmaninya selalu sehat.

Kegiatan ini bisa meminimalisasi terjangkitnya penyakit-penyakit warga binaan sosial. Bimbingan fisik ialah kegiatan bimbingan/tuntutan untuk pengenalan klien praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina klien memupuk kemampuan dan kemauan klien untuk memelihara kesehatan fisik dan disiplin dari dalam tatanan hidup bermasyarakat secara normatif yang diwarnai suasana kemandirian dalam kebersamaan. Tujuan kegiatan ini adalah agar setiap klien memiliki kemauan

dalam memelihara kondisi kesehatan fisik, harga diri dan kepercayaan diri serta tanggung jawab sosial untuk dapat berintegrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat.

**Gambar III.4**  
**Bimbingan Mental Keagamaan Acara pengajian**



Sumber: Dokumentasi penulis pada tanggal 18 Oktober 2012

Gambar III.4 merupakan aktivitas warga binaan sosial pada waktu proses bimbingan mental Keagamaan dengan salah satu Ustad. Bimbingan mental keagamaan ialah kegiatan bimbingan untuk memahami dan mendalami serta praktek tentang mental yang sehat agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungannya secara mantap, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Bimbingan mental dimaksudkan untuk melatih, membina, memupuk kemauan dan kemampuan WBS supaya bermental sehat dan disiplin diri secara mantap dalam bermasyarakat secara normatif yang diwarnai suasana kemandirian.

Tujuan kegiatan ini adalah agar terciptanya kondisi WBS yang menghayati harkat dan martabat kemanusiaan terpulihnya harga diri kepercayaan

diri dan integrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja sosial adalah dengan memberikan ceramah tentang keagamaan dan melakukan kegiatan proses pengajian agar klien dapat terbiasa membaca al Quran dengan baik. Disini pekerja sosial penyelia yang berinisial NY bertugas memberikan bimbingan mental keagamaan, dengan cara memberikan pengarahan pengajian yang baik dan benar kepada warga binaan sosial yang beragama Islam. NY juga memberikan sebuah motivasi agar warga binaan mau melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Setiap hari rabu, kamis dan jumat sekitar jam 8 malam ada pengajian dengan mengundang ustad di sekitar daerah panti untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Cara tersebut dipilih karena selama ini masyarakat selalu beranggapan bahwa gaya hidup wbs sangat bebas dan melanggar kaidah agama. Para warga binaan sosial yang beragama Islam tersebut, melaksanakan pengajian tujuannya agar nantinya mereka terbiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca al Quran.

**Gambar III.5**  
**Bimbingan Sosial: Membersihkan halaman pondok**



Sumber : Dokumentasi Penulis pada tanggal 24 Oktober 2012

Gambar III.5 adalah Kegiatan bimbingan sosial yang diberikan oleh NY salah satu pekerja sosial. Kegiatan bimbingan sosial yang diberikan salah satunya yaitu kegiatan kebersihan lingkungan panti yang dilaksanakan pada hari selasa, kamis, sabtu dan minggu. Kegiatan kebersihan lingkungan tersebut berfungsi agar para Warga Binaan Sosial (WBS) selalu menjaga kebersihan lingkungan di panti. Seluruh WBS diwajibkan untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan selama di dalam panti.

Bimbingan sosial adalah serangkaian bimbingan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat WBS sendiri. Bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan dan tanggung jawab sosial serta kemampuan diri dengan lingkungan sosial/tata kehidupan. Kegiatan ini adalah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berintegrasi, berdedikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif, yang diliputi suasana kerukunan dan kebersamaan/ kegotong royongan dalam kemandirian.

**Gambar III.6**  
**Bimbingan Keterampilan Pembuatan tempe dan tahu.**



Sumber : Dokumentasi Penulis pada tanggal 25 September 2012

Pada gambar III.6 merupakan aktivitas klien pada saat mengikuti keterampilan pembuatan tempe dan tahu yang diajarkan oleh salah satu pekerja sosial yang menjadi pendamping instruktur berinisial NS. Keterampilan tempe dan tahu ini merupakan salah satu keterampilan yang ada di PSBK yang dilaksanakan setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. NS ditugaskan untuk mengajarkan bagaimana cara membuat tempe, tahu dan susu kedelai apabila instruktur khusus keterampilan pembuatan tempe dan tahu berhalangan hadir. Dalam keterampilan pembuatan tempe dan tahu tersebut memiliki instruktur khusus.

Sebelum warga binaan sosial yang mengikuti keterampilan pembuatan tempe dan tahu tersebut memulai praktek, terlebih dahulu instruktur memberikan teori bagaimana cara membuat tempe dan tahu. Bahan dan alat yang digunakan seperti kedelai, ragi, air, tempat penampungan tempe, tungku, mesin penggiling, dll. Alat-alat yang digunakan untuk membuat tempe dan tahu ini sudah disediakan

oleh Panti Sosial Bina Karya. Tujuan dengan adanya keterampilan ini memiliki efektivitas kepada para WBS nantinya dapat memiliki keahlian tata cara membuat tempe dan tahu yang dapat dikembangkan dengan bekerja ditempat orang lain yang memiliki usaha olahan tempe dan tahu atau dengan berwirausaha secara mandiri.

Warga Binaan Sosial yang mengikuti keterampilan, kemudian melakukan kegiatan resosialisasi. Kegiatan resosialisasi ini diadakan ketika WBS kembali ke kampung halamannya. Pekerja sosial akan melaporkan ke dinas sosial tempat WBS tersebut itu tinggal, kalau warganya ingin pulang. Pada tahap resosialisasi disini, Warga Binaan Sosial setelah mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di PSBK selama 6 bulan akan diberikan paket keterampilan, dan peksos meminta kerjasama ke dinas sosial untuk memantau apakah paket keterampilan dapat dikembangkan dan digunakan dengan baik atau tidak.

Warga Binaan sosial akan diikutsertakan dalam Praktek Belajar Kerja (PBK) juga menjadi bagian dari resosialisasi. Kegiatan PBK ini bagi WBS dilaksanakan selama 30 hari dan diikuti oleh 50 orang warga binaan sosial dengan jenis keterampilan sebagai berikut: keterampilan las sebanyak 5 orang, keterampilan tata rias ada 5 orang, keterampilan sablon 5 orang, keterampilan montir motor ada 5 orang. Kemudian, keterampilan menjahit sebanyak 5 orang, keterampilan pertukangan kayu ada 5 orang, keterampilan pengolah kedelai ada 10 orang, keterampilan montir mobil ada 5 orang dan keterampilan pertanian ada 5 orang.



Lokasi yang biasanya dipakai untuk kegiatan PBK sendiri yaitu di Temmy salon, resty motor las, pal pro sablon, ray motor, kursus menjahit “Tuti”, jatimulya indah kayu, bengkel mobil timur jaya, perusahaan tahu H. Lukman, perusahaan tempe dan penangkar bibit kitri jaya. Awalnya, Peksos selaku pembimbing dan pendamping instruktur menyeleksi warga binannya yang memang layak untuk mengikuti PBK dan magang di perusahaan yang bersangkutan. Setelah dilakukan penyeleksian, Pekerja sosial bekerja sama dengan seksi Program Advokasi Sosial (PAS) mengunjungi usaha-usaha mandiri untuk menjalin kemitraan seputar penerimaan mereka terhadap WBS terpilih menjadi karyawan magang. Apabila para pengusaha masih meragukan kemampuan klien, maka Peksos bertugas untuk menyakinkan pihak pengusaha bahwa warga binaannya memang pantas untuk bekerja di sana selama 30 hari.

Warga binaan sosial mengikuti PBK, efektivitasnya adalah nantinya mereka bisa mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan bimbingan di Panti. Tidak hanya itu, WBS diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta tumbuh rasa percaya diri, semangat, kemauan dan minat kerja. Demi untuk menjalani kehidupan di masa depan setelah mereka kembali ke masyarakat/keluarga. Berikut kutipan wawancara dengan pekerja sosial yang berinisial SN selaku pekerja sosial penyelia:

“WBS akan diikuti dalam PBK berdasarkan hasil seleksi. Dalam proses seleksi tersebut yang dilihat adalah terlihat dia berbakat dibidang keterampilan yang ia ikuti dan dalam penyerapan ilmu yang didapatkan selama mengikuti keterampilan itu udah bisa menguasai dan hasil yang dibuatnya itu memang bagus. Selain itu dilihat dari kehadiran ia mengikuti ketrampilan secara rajin dan sungguh-sungguh mengikuti keterampilan dengan tidak pernah bolos”. Misalnya aja wbs yang ikut keterampilan salon banyak kok wbs yang awalnya diikutsertakan dalam PBK , sampe sekarang bisa

bekerja di temmy salon. Bahkan ada juga wbs yang bernama pak kasman setelah keluar dari PSBK, dia berwirausaha secara mandiri membuka usaha tanaman ”.<sup>45</sup>

Setelah WBS mengikuti PBK akan dilakukan terminasi. Terminasi merupakan suatu tindakan/kegiatan pengakhiran atau pemutusan secara resmi dalam proses pemberian bantuan, pemecahan masalah ataupun pengembangan kepada klien, yang dinilai sudah berhasil atau sudah mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat lingkungannya. Pekerja sosial membuat kesepakatan pemutusan hubungan kontrak antara pekerja sosial/lembaga dengan klien dalam bentuk surat pernyataan agar administrasi penanganan kasus berlangsung dengan tertib. Selanjutnya, barulah diadakan penyerahan paket bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penutupan pencatatan kasus klien. Seperti halnya, pekerja sosial yang berinisial IG selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Terminasi ini dilakukan pada saat perpisahan waktu diakhir warga binaan sosial mendapatkan pembinaan. terminasi dilakukan agar dapat diketahui kliennya telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu berwirausaha secara mandiri setelah diberikan bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif ”.<sup>46</sup>

Warga binaan sosial yang telah mengikuti proses pembinaan sosial selama 6 bulan, barulah dilakukan bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan penerimaan pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan secara layak. Adanya bimbingan lanjutan ini bertujuan dan berimplikasi agar warga binaan sosial dapat berwirausaha secara mandiri dan berpenghasilan secara normatif guna membiayai

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan SN pada tanggal 23 Oktober 2012.

<sup>46</sup> Wawancara dengan IG pada tanggal 24 Oktober 2012.

diri dan keluarganya. Tahap bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan tiga kegiatan, yaitu: bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan ialah kegiatan bimbingan atau tuntunan untuk lebih memantapkan kemampuan penyesuaian diri dalam tata hidup bermasyarakat dan keikutsertaan mereka dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan. Seperti yang diungkapkan oleh pekerja sosial yang berinisial NM yang menjabat sebagai pekerja sosial penyelia:

“warga binaan sosial setelah selesai menjalani proses pembinaan selama 6 bulan akan diberikan bantuan berupa paket alat keterampilan. Kemudian akan dilakukan tahap bimbingan lanjut itu yang sudah selesai pelatihan kembali ke masyarakat ditindaklanjuti setelah bantuan itu dikasih, maka akan dimonitoring selama 3 bulan dan apabila usaha yang mereka buka itu dapat berkembang maka akan diberikan uang jaminan hidup (jadup) sebesar Rp. 4,5 juta dengan mentransfer ke nomor rekening masing-masing”.<sup>47</sup>

Pekerja sosial selain menjalankan peranan tugas pokok, namun mereka pun menjalankan peranan dan tugas lain dengan menjadi pengajar di Taman Anak Sejahtera (TAS), menjadi pembimbing di tiap pondok, menjadi pembimbing kewirausahaan dan etika budi pekerti. Seperti penuturan pekerja sosial yang berinisial CK selaku pekerja sosial penyelia:

“Para pekerja sosial selain menjalankan tugas dan fungsinya, namun pekerja sosial juga menjalankan peranan-peranan lain seperti saya, YW dan NM. IG sebagai pembimbing etika budi pekerti dan kewirausahaan dan DR sebagai pengajar SD di TAS. kemudian SN sebagai pembimbing kesehatan masyarakat”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan NM pada tanggal 23 Oktober 2012.

<sup>48</sup> Wawancara dengan CK pada tanggal 24 Oktober 2012.

**Gambar III.7**  
**Proses pengajaran SD di Taman Anak Sejahtera (TAS)**



Sumber: Dokumentasi Penulis Pada tanggal 23 Oktober 2012

Gambar III.7 merupakan kegiatan proses pengajaran SD di Taman Anak Sejahtera ini dilaksanakan pada hari rabu dan jumat. Kegiatan tersebut diadakan oleh Panti Sosial Bina Karya sebagai sebuah program untuk proses pembelajaran bagi anak-anak agar bisa baca tulis dan menghitung. Guru SD di Taman Anak Sejahtera tersebut adalah pekerja sosial yang berinisial DR dikarenakan seorang pekerja sosial juga harus mempunyai disiplin ilmu/menguasai semua dibidang ilmu agar dapat memberikan pengajaran dengan berbagai wawasan ilmu yang dimiliki kepada anak-anak SD di TAS.

TAS ini merupakan sekolah non formal yang diberikan kepada anak-anak warga binaan sosial yang putus sekolah supaya bisa mengenyam pendidikan. Di dalam proses pengajaran sendiri, DR mengajarkan anak-anak membaca, menulis dan menghitung agar nantinya mereka bisa membaca, menulis dan menghitung. Ketika nanti mereka kembali ke masyarakat bisa mempunyai bekal ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri.

**Gambar III.8**  
**Bimbingan Diskusi Kelompok**



Sumber : Dokumentasi Penulis Pada tanggal 11 Oktober 2012

Pada gambar III.8 merupakan kegiatan sebuah bimbingan diskusi kelompok warga binaan sosial pondok cempeda. Diskusi kelompok dilakukan setiap hari kamis. Yang menjadi pembimbing pondok cempeda adalah yang menjabat sebagai pekerja sosial berinisial KM, Ibu SW, dan NS.

Kegiatan ini berisikan mengenai pembahasan apa saja yang terjadi dilingkungan pondok WBS masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah apa yang terjadi dalam suatu kelompok. Jika terjadi suatu masalah maka akan dipecahkan secara bersama-sama dengan hasil yang telah dimusyawarahkan antara para WBS dengan Pekerja Sosial yang menjadi pembimbing pada pondok tempat WBS tinggal tersebut.

Dalam kegiatan ini sebagai upaya kelompok penyembuhan WBS umumnya terdiri dari anggota-anggota yang memiliki masalah-masalah dan emosi yang lebih parah/mendalam. Pekerja sosial memberikan bimbingan diskusi kelompok dengan cara mengumpulkan Warga Binaan Sosial bimbingannya dalam

suatu kelas untuk menceritakan permasalahan yang terjadi yang menimpa WBS tersebut. Pekerja sosial yang menjadi pembimbing pondok akan melakukan diskusi dengan rekan pekerja sosial yang menjadi pembimbing pondok tersebut dalam upaya pemecahan masalahnya dengan melakukan pertukaran informasi. Tujuan kegiatan ini juga sebagai upaya untuk melakukan pengembangan kemampuan anggota kelompok WBS tersebut dalam melakukan perubahan nilai-nilai dan perubahan sikap normatif. Di dalam diskusi kelompok ini pekerja sosial yang menjadi pembimbing pondok memiliki kemampuan, persepsi dan pengetahuan yang luas seperti konseling dan kemampuan dalam mengadakan perubahan perilaku WBS yang menjadi anak bimbingannya.

**Gambar III.9**  
**Bimbingan Kewirausahaan dan Etika Budi Pekerti**



Sumber : Dokumentasi Penulis pada tanggal 15 Oktober 2012

Pada gambar III.9 merupakan bimbingan etika budi pekerti, kewirausahaan dan kesehatan masyarakat. Bimbingan etika budi pekerti dan kewirausahaan ini dilakukan setiap hari senin, selasa, rabu. Yang bertugas menjadi pembimbing etika budi pekerti dan kewirausahaan adalah yang menjabat sebagai pekerja sosial berinisial NM, IG, CK dan YW.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembinaan etika dan budi pekerti, kewirausahaan kepada para WBS. Disini para WBS diberikan penjelasan oleh pekerja sosial yang bertugas memberikan bimbingan etika dan budi pekerti tersebut di dalam suatu kelas tentang perilaku yang baik di dalam suatu masyarakat. Tujuan dari kegiatan kewirausahaan ini dimaksudkan untuk pembinaan kreatifitas kewirausahaan secara teori.

Disini para WBS diajarkan tentang bagaimana cara memulai suatu usaha yang baru agar bisa mengembangkan salah satu usaha. Mereka nantinya bisa menjadi mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Diadakan kegiatan bimbingan tersebut, warga binaan sosial bisa mendapatkan pengetahuan ilmu bagaimana cara beretika budi pekerti dengan baik, serta bagaimana berwirausaha dengan baik.

#### **D. Proses Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Pekerja Sosial**

##### **1. Pimpinan Panti**

Pekerja Sosial yang ada di PSBK telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dan maksimal, namun belum secara profesionalisme. Pekerja sosial tingkat terampil dan ahlinya tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Profesionalisme para pekerja sosial di lingkungan PSBK perlu ditingkatkan.

Baik buruknya kinerja suatu pelayanan kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah sangat tergantung pada kinerja yang ditampilkan oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial dapat dilakukan

melalui suatu pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang baik dan profesional. Pekerja sosial belum dapat dikatakan profesional, karena idealnya pekerja sosial harus memiliki latar belakang di bidang kesejahteraan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh AR yang menjabat sebagai Kepala Panti:

“Menurut saya, pekerja sosial itu belum dikatakan profesional, karena idealnya pekerja sosial harus berlatar belakang bidang kesejahteraan sosial, tapi hanya dua orang yang latar belakangnya di bidang kesejahteraan sosial itu yang jadi peksos. Sehingga, kompetensinya menjadi tidak merata di antara para pegawai. Namun mereka sejauh ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mengikuti peraturan dengan baik dan disiplin kerja juga sudah bagus sesuai dengan disiplin PNS. Dikarenakan jika mereka tidak disiplin ada sanksinya yakni teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administratif, tidak dinaikkan gaji berkala, tidak naik pangkat, kemudian terakhir adalah pemecatan”.<sup>49</sup>

Kepala panti akan memberikan hukuman tegas bagi karyawan yang tidak taat pada peraturan. Apabila karyawan tersebut tetap tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan maka akan dimutasikan. Seperti ada salah satu Pekerja sosial berinisial TH yang dimutasikan ke panti Tresna Werdha Budhi Dharma yang merupakan panti jompo yang ada di Kementerian Sosial RI Bekasi dikarenakan diberikan tugas dinas ke luar kota, namun ia selalu menolaknya. Hal inilah yang akhirnya ia dimutasi oleh kepala panti.

Upaya meningkatkan kinerja para pekerja sosial ini diikutsertakan dalam pusat pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Sosial, seminar serta diberikan pembekalan membaca peraturan atau buku-buku lainnya. Pekerja sosial tersebut, jika ingin naik pangkat ada angka-angka kredit dalam tiap jenjangnya harus dicapai oleh para pekerja sosial. Selain itu, laporannya nantinya diserahkan ke Departemen Sosial Pusat.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan AR pada tanggal 25 oktober 2012.



Bentuk pendidikan dan pelatihan tergantung dari lembaga diklatnya. Dengan adanya Diklat tersebut, sebagai upaya peningkatan profesionalisme para pekerja sosial. Tujuan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pekerja sosial adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penguasaan profesi Pekerja sosial dasar. Disamping itu juga diingatkan untuk selalu semangat dan giat dalam menjalankan tugas. Seperti AR menuturkan bahwa:

“Para pekerja sosial diupayakan untuk mengikuti pendidikan profesional dengan latar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial yang diadakan oleh Balai Diklat Kementerian Sosial RI. Dikarenakan PSBK tidak pernah mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja sosial. Tujuan mengikuti Diklat agar dapat menguasai ilmu pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial dan mampu mempraktekkan pekerjaan sosial secara profesional. Upaya dalam meningkatkan profesionalisme para pekerja sosial di lingkungan Panti Sosial Bina Karya, dengan cara para pekerja sosialnya mengikuti Diklat, mengikuti seminar, profesi atau dia kuliah jurusan kesejahteraan sosial”<sup>50</sup>.

Para Pekerja Sosial dalam meningkatkan optimalitas pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka Kepala Panti Sosial Bina Karya membolehkan para pekerja sosial melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan pendidikan khusus dibidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial yang profesionalisme haruslah dilatarbelakangi pendidikan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pekerja sosial yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti AR mengungkapkan:

“Para pekerja sosial dibolehkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan pendidikan khusus dibidang kesejahteraan sosial agar menjadi pekerja sosial yang berkompeten dan profesional”<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan AR pada tanggal 15 oktober 2012.

<sup>51</sup> Wawancara dengan AR pada tanggal 15 Oktober 2012.

## 2. Pembina

Kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 6 pada peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor : 106/HUK/2009 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di lingkungan departemen sosial menyebutkan bahwa kelompok Jabatan Fungsional dalam panti terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada kepala panti dan disesuaikan dengan kebutuhan serta beban kerja panti dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Panti.<sup>52</sup> Selama ini koordinator merupakan pembina yang membantu kepala panti bertugas untuk memberikan pembinaan kepada para pekerja sosial yang ada dibawahnya. Latar belakang pendidikan yang dimiliki Koordinator Pekerja sosial adalah bergelar S1 Kesejahteraan Sosial sehingga menguasai ilmu pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial dan mampu mempraktekkan pekerjaan sosial secara profesional.

Pembina memberikan pembinaan kepada para pekerja sosial dengan cara membimbing mereka sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang didapatkan pembina selama kuliah S1 STKS Bandung kesejahteraan sosial dan ilmu yang didapatkan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Seorang pejabat yang ditetapkan menjadi koordinator oleh kepala panti tersebut dilihat berdasarkan dari kinerja, pengalaman, memiliki wawasan yang luas dan latar belakang pendidikan yang menunjang sehingga layak menjadi seorang

---

<sup>52</sup> Dokumentasi milik Program Advokasi Sosial (PAS).

koordinator pekerja sosial. Pembina harus dapat mengatur dan membina pekerja sosial yang ada dibawahnya dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tugas koordinator adalah salah satunya melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial serta mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial. Jika diketahui ada salah satu pekerja sosial tidak melaksanakan tugas maka akan diberikan teguran supaya mereka dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan optimal. Pembina akan membimbing mereka agar lebih termotivasi giat bekerja, semangat dalam melaksanakan tugas dengan semestinya. Berikut penuturan dari pekerja sosial yang berinisial LA yang menjabat sebagai pekerja sosial madya:

“Latar belakang pendidikan yang dimiliki para pekerja sosial bukan dari lulusan kesejahteraan sosial maka kemampuan dalam penyerapan dan pelaksanaan ilmu yang mereka miliki tidak dapat terlaksana secara profesionalisme. Ada salah satu pekerja sosial yang lalai dalam kerjanya maka akan diingatkan supaya meningkatkan kinerjanya sebagai pekerja sosial dan tidak lalai lagi dengan tugas. Namun, saya tidak pernah mendampingi ketika mereka melaksanakan tugas dilapangan”.<sup>53</sup>

Pekerja sosial dalam membuat laporan terlihat keteteran sehingga pembina berkewajiban untuk terus mengingatkan dan membina mereka. selain itu, ia pun harus terus membimbing mereka agar kerja lebih baik lagi. Jika pekerja sosial selama melaksanakan tugas menghadapi suatu permasalahan dan tidak mampu mengatasinya maka pembina turut membantu menyelesaikannya. Sejauh ini pembina pekerja sosial terlihat bahwa sering keteteran juga dalam membuat laporan.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan LA pada tanggal 17 oktober 2012.

### **3. Kementerian Sosial RI**

Dalam upaya peningkatan kinerja pekerja sosial dalam mengoptimalkan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka dipandang perlu dilaksanakan program pembinaan karier pekerja sosial. Salah satunya Kementerian Sosial dalam melaksanakan pembinaan kinerja pekerja sosial adalah dengan mengadakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Pada proses awal seseorang menjadi Pekerja Sosial yang tidak berlatar belakang Pekerjaan Sosial, wajib mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS). Sedangkan bagi mereka yang telah berlatar belakang Kesejahteraan sosial, jika ingin menjadi anggota Pekerja sosial tetap harus mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS) dan diklat penjurusan.

Tujuan mengikuti diklat PDPS supaya bisa berguna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat tentang dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Sedangkan diklat sertifikasi JFPS bertujuan meningkatkan keterampilan peserta diklat dalam melaksanakan kegiatan pekerja sosial. Terakhir, diklat penjurusan mempunyai maksud meningkatkan pengetahuan peserta dalam melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan.

Selama pelatihan tersebut, anggota Peksos yang mengikuti diklat melakukan praktek kerja lapangan baik di masyarakat maupun di lembaga-lembaga Departemen dan non Departemen. Setelah diklat, mereka wajib membuat laporan akhir berdasarkan pelatihan yang diikutinya. Setelah selesai, barulah hasilnya diuji oleh “Widyaiswara” yang berasal dari Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian Sosial juga telah menerbitkan materi peningkatan kompetensi

Pekerja Sosial di dalam penguasaan ketentuan, metode dan teknik pekerjaan sosial guna mendukung pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan unit kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh KK selaku kepala kepegawaian di Kementerian Sosial:

“Kementerian Sosial dalam melaksanakan pembinaan kinerja pekerja sosial adalah dengan mengadakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Pada proses awal seseorang menjadi pekerja sosial yang tidak berlatar belakang Pekerjaan Sosial, wajib mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS). Sedangkan bagi mereka yang telah berlatar belakang Kesejahteraan sosial, jika ingin menjadi anggota pekerja sosial tetap harus mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFPS) dan diklat penjurangan yang berorientasi kepada materi ilmu pekerjaan sosial serta diberikannya ilmu pengetahuan tentang penanganan masalah PMKS. Ketiga diklat tersebut dilakukan selama tiga minggu. Namun lama atau tidaknya pendidikan dan pelatihan khusus Peksos ini tetap disesuaikan dengan anggaran yang tersedia”.<sup>54</sup>

Upaya yang dilakukan Kementerian Sosial tersebut, salah satunya dengan mengadakan Diklat, kompetensi dan integritas pekerja sosial secara profesional dapat melaksanakan tugas dan peranannya selama memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosial. Peningkatan kompetensi dan integritas pekerja sosial perlu dukungan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi kerja profesionalnya antara lain: peningkatan keterlibatan pekerja sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial baik sebagai pelaksana ataupun perencana, peningkatan kesejahteraan pekerja sosial melalui kenaikan tunjangan jabatan, dan pemberian kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan pekerjaan sosial yang lebih tinggi. Serta, penyediaan dukungan anggaran penelitian dalam rangka pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan KK pada tanggal 13 November 2012.

## **E. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam melaksanakan Tugas**

### **1. Faktor Penghambat dalam melaksanakan Tugas**

Penggalan awal pekerja sosial adalah melakukan pengamatan dan dapat mengetahui karakteristik orang lain. Dalam menjalankan tugas dan peranan pasti memiliki hambatan yakni dikarenakan belum adanya kurikulum yang ideal dan adanya permasalahan-permasalahan seperti faktor klien dan waktu dalam menangani kliennya tidak dapat ditentukan karena tergantung situasi dan permasalahannya. Warga Binaan yang dibina tersebut kebanyakan notaben pendidikannya rendah dan bahkan tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan. Mereka perlu diberikan pembelajaran keaksaraan fungsional sebagai wujud pemberantasan buta huruf. Kegiatan ini sama seperti program paket A setara dengan SD dan paket B setara dengan SMP yang diadakan oleh pemerintah guna memberantas buta huruf.

Disini mereka yang belum bisa baca tulis diajarkan secara baik yang pada nantinya mereka akan mengikuti ujian kesetaraan dan mendapatkan ijazah sesuai paket apa yang mereka ikuti. Para Warga Binaan Sosial wajib mengikuti kegiatan belajar keaksaraan fungsional agar nantinya bisa membaca, menulis dan menghitung. Apabila WBS sudah bisa membaca, menulis dan menghitung, para pekerja sosial dapat mudah mengarahkan mereka dalam program pemberdayaan untuk mengikuti salah satu kegiatan keterampilan yang ada di Panti Sosial Bina Karya (PSBK). Seperti salah satu persyaratan mengikuti keterampilan jahit, keterampilan sablon, keterampilan las, keterampilan service motor, keterampilan

service mobil, dan pertukangan kayu para warga binaan harus bisa membaca, menulis dan menghitung.

Dalam pengadaan klien/WBS surat dari PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi sendiri terkadang terlambat sampai ketempat tujuan atau bahkan tidak sampai pada instansi yang bersangkutan, sehingga pihak Dinas mendapatkan kesulitan dalam mencari klien, ini dikarenakan Dinas harus koordinasi dengan lembaga dibawahnya seperti kecamatan bahkan sampai tingkat Desa. Banyaknya gelandangan dan pengemis menolak untuk ikut program pelayanan di Panti juga yang menyebabkan terhambatnya pengadaan klien/WBS. Padahal, pekerja sosial sudah melakukan sistem jemput dengan mendatangi langsung ke kantung-kantung gelandangan dan pengemis. Pada dasarnya prinsip para gelandangan dan pengemis tersebut masih ingin hidup bebas tanpa aturan-aturan seperti pada sistem panti, itulah yang mendasari para gepeng, sebagian ada yang menolak untuk ikut pelayanan di Panti. Seperti penuturan pekerja sosial yang berinisial TH selaku pekerja sosial pelaksana lanjutan:

“Kendala dan kesulitannya dikarenakan klien yang dibina tersebut terbiasa hidup keras jadi agak susah untuk dibina. Proses dalam pembinaan gepeng di Panti Sosial selama 6 bulan tersebut jadi terbilang belum cukup karena dilihat dari permasalahan para gepeng yang komplek tersebut seperti salah satu warga binaan sosial yang ikut keterampilan olahan tempe jika ditanya setelah keluar dari panti mau mengembangkan usaha tempe atau tidak. Dia malah menjawab ingin kembali kejalanan lagi minta-minta ngemis dialun-alun enak bisa dapet duit tanpa perlu cape-cape usaha tempe ribet ngolahnya”.<sup>55</sup>

Bimbingan keterampilan juga mengalami kendala. Bimbingan keterampilan yang ada di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi ada 10 macam, tetapi alat-alat keterampilan yang ada kurang memadai, ruang keterampilan yang sempit

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan TH pada tanggal 15 oktober 2012.

tidak memenuhi standarisasi, pengajuan bahan baku keterampilan sebaiknya diajukan pada saat awal kegiatan, dan instruktur yang belum mempunyai standarisasi sertifikasi. Dalam konsultasi keluarga, alamat yang diberikan oleh WBS tidak jelas/tidak lengkap sehingga sulit menemukan lokasi tempat tinggal keluarganya, penyaluran dan terminasi dalam rangka pemulangan WBS ke daerah asal sebaiknya ada koordinasi dengan instansi setempat untuk memberikan pembinaan dan bimbingan lebih lanjut. Dalam kegiatan bimbingan lanjut eks WBS yang dikunjungi tidak berada ditempat dikarenakan sedang bekerja, berpergian atau pindah alamat. Seperti pekerja sosial yang berinisial NM yang menjabat sebagai pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Kendalanya alat-alat keterampilan yang ada di PSBK banyak yang sudah rusak jadi hanya bisa menggunakan peralatan yang tersedia di PSBK yang kondisi peralatannya tidak rusak bisa dipakai oleh warga binaan untuk belajar keterampilan, ruang keterampilan yang sempit tidak memenuhi standarisasi. Sehingga, klien dalam proses belajar keterampilan tidak secara optimal dan maksimal. Selain itu, banyak klien yang bohong dengan memalsukan identitasnya”.<sup>56</sup>

Ada salah satu pekerja sosial yang lalai dalam melaksanakan tugas, akibatnya banyak pekerjaan yang terbengkalai. Latar belakang pendidikan yang dimiliki kebanyakan tidak berlatar belakang kesejahteraan sosial, maka dalam membuat laporan menjadi tidak tepat waktu dan bahkan ada yang menyalin hasil laporan milik sesama teman pekerja sosial. Setiap laporan yang dibuat para pekerja sosial akan dilihat dari seksi Program Advokasi Sosial (PAS), Rehabilitasi Sosial (Rehsos). Seksi PAS dan Rehsos memeriksa kesesuaian hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para pekerja sosial dengan rincian kegiatan yang ada.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan NM pada tanggal 9 November 2012.



Tata Usaha (TU) melihat isi laporannya seperti tanggal, waktu. Sedangkan, PAS, melihat jam kegiatan (rehsos) dalam proses pelaksanaan tiap-tiap kegiatan. Apabila terdapat ketidaksesuaian di dalam laporannya, maka pekerja sosial harus memperbaiki laporan tersebut. Padahal, seluruh anggota Peksos mempunyai buku yang berisi keputusan Menteri Sosial RI Nomor 10/HUK/2007 tentang pembinaan teknis jabatan fungsional pekerja sosial yang ditulis oleh biro organisasi dan kepegawaian Departemen Sosial RI. Dalam buku tersebut terdapat pedoman dalam bekerja menjadi seorang pekerja sosial dan petunjuk teknis dalam pembuatan laporan. Adanya buku itu pekerja sosial dapat mempelajari dan mengetahui pedoman dalam bekerja sebagai Pekerja Sosial dan petunjuk teknis dalam pembuatan laporan.

Setiap tahunnya Pekerja sosial selalu kesulitan untuk membuat laporan kerjanya. Pada akhir tahun mereka selalu disibukkan dalam pembuatan surat tugas rutin yang berdasarkan prosedur seharusnya dikumpulkan setiap 6 bulan sekali. Adanya kondisi tersebut, maka kementerian sosial memberikan perpanjangan waktu menjadi 1 tahun dalam mengumpulkan laporannya. Pekerja sosial memiliki alasan mengapa ia mengalami keteteran dalam membuat laporannya diakhir periode dikarenakan mereka sibuk harus dinas ke luar kota bahkan terkadang keluar pulau jawa untuk melakukan bimbingan lanjut dan transmigrasi.

Alasan itulah yang membuat mereka terhambat dalam pengerjaan laporan kerjanya. Dalam 1 tahun mereka tidak mengumpulkan laporannya, maka ia pun akan diberhentikan sementara dan tidak boleh menjadi Pekerja sosial kembali dan mereka akan dipindahkan ke seksi lain. Jika ia mengumpulkan

laporannya lagi, maka dapat menjadi Pekerja sosial kembali. Seperti yang diungkapkan oleh LA menjabat sebagai pekerja sosial madya mengungkapkan bahwa:

“Para pekerja sosial suka keteteran membuat laporannya Di akhir tahun pekerja sosial disibukkan dalam pembuatan laporan yang berdasarkan prosedur secara idealnya seharusnya dikumpulkan setiap enam bulan sekali. Akan tetapi, kementerian sosial memberikan perpanjangan waktu menjadi 1 tahun dalam mengumpulkan laporannya. Alasan kenapa pekerja sosial sering keteteran dalam membuat laporannya diakhir periode dikarenakan mereka sibuk. Di sebabkan pekerja sosial harus dinas ke luar pulau jawa untuk melakukan bimbingan lanjut dan transmigrasi. Akan tetapi, jika dalam 1 tahun tidak mengumpulkan laporan, maka akan diberhentikan sementara dan tidak boleh menjadi Pekerja sosial kembali dan mereka akan dipindahkan ke seksi lain. Akan tetapi, jika mengumpulkan laporannya lagi, maka dapat menjadi pekerja sosial kembali”.<sup>57</sup>

Pada waktu dulu, menjadi seorang pekerja sosial peminatnya terbilang kurang dikarenakan tidak ada Surat keputusan dari pemerintah yang mengharuskan menjadi seorang pekerja sosial. Pada saat sekarang ini, pekerja sosial sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan diterbitkannya surat keputusan. Pekerja sosial yang ada di Panti sosial Bina karya tersebut, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan sosialnya.

Pekerja sosial yang ada di PSBK sebanyak 15 orang ini terdiri dari pekerja sosial yang terampilnya sebanyak 13 orang dan yang menjadi pekerja sosial ahlinya sebanyak 2 orang. Berdasarkan klasifikasi idealnya satu pekerja sosial itu membina 10 warga binaan. Pekerja sosial terampilnya hanya ada 13 orang maka 1 pekerja sosial membina 30 warga binaan sosial. Warga binaan yang ada di Panti Sosial Bina Karya pada saat ini sebanyak 268 orang. Jadi seharusnya ada 30 pekerja sosial. Berikut penuturan pekerja sosial yang berinisial AM menjabat sebagai pekerja sosial madya:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan LA pada tanggal 17 oktober 2012.

“Pekerja sosial yang ada di PSBK cuma ada 15 orang. WBSnya ada 268, peksos trampilnya sendiri yang membina WBS secara teknis di lapangan ada 13 orang sehingga tidak sebanding. Pekerja sosial yang bagian pembinaannya terbilang kurang, karena tidak semua dapat mengawasi pondok warga binaan dan ada juga pekerja sosial yang jarang masuk kerja. Maka, mau tidak mau pekerja sosial ahli pun harus terjun kelapangan. Tetapi, pekerja sosial ahli tidak pernah mendampingi dan membimbing pekerja sosial dilapangan jadi para pekerja sosial dalam mengerjakan tugas hanya berdasarkan kemampuan mereka sendiri”.<sup>58</sup>

Faktor penghambat di dalam melaksanakan peran dan tugas sebagai pekerja sosial adalah dikarenakan latar belakang pendidikannya rendah dan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidangnya yakni kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalam meningkatkan kinerja para pekerja sosial diadakan pelatihan atau seminar. Peksos profesional (latar belakang kesos) harus ada sertifikasi setiap 1 tahunnya untuk menentukan bisa atau tidaknya naik pangkat.

## **2. Faktor Pendukung dalam melaksanakan Tugas**

Pada dasarnya seluruh kegiatan pekerja sosial dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya dikarenakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para pekerja sosial dalam melaksanakan tugas di Panti Sosial Bina Karya sudah cukup memadai. Sehingga, dengan adanya dukungan sarana dan prasarana tersebut sangat membantu kelancaran para pekerja sosial dalam proses pelaksanaan tugasnya tersebut. Seperti pekerja sosial berinisial TH selaku pekerja sosial pelaksana lanjutan menuturkan:

“Sarana dan prasarana yang ada di PSBK ini terbilang cukup memadai. Sehingga, Proses melaksanakan tugas tetap dapat berjalan terus”.<sup>59</sup>

Faktor pendukungnya berupa tersedianya buku panduan tentang pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dalam pelaksanaan tugas.

<sup>58</sup> Wawancara dengan AM pada tanggal 15 Oktober 2012.

<sup>59</sup> Wawancara dengan TH pada tanggal 15 Oktober 2012.

Dengan adanya buku panduan tersebut maka akan memberikan kejelasan bagi Pekerja Sosial dalam mengoptimalkan kontribusi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di PSBK. Serta, pekerja sosial pun memiliki sebuah pedoman dalam meningkatkan pekerjaan pekerja sosial dengan kinerja yang berkompeten dan profesional. Seperti pekerja sosial SN selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Dengan adanya buku panduan pedoman pekerja sosial ini sangat membantu saya sekali sebagai pekerja sosial jadi lebih tau bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi seorang pekerja sosial”.<sup>60</sup>

Warga binaan sosial yang didapatkan dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepolisian Resort Bekasi, setelah itu, dikirim ke Dinas Sosial. Maka, anggaran dana untuk menjalankan proses program pembinaan tersebut ditanggung oleh Dinas Sosial Bekasi. Sebelum para warga binaan sosial dikirim ke Panti Sosial Bina Karya, pihak Dinas Sosial memberikan bimbingan rohani kepada warga binaan sosial selama 3 hari. Setelah itu, barulah warga Binaan Sosial ditempatkan di Panti Sosial Bina Karya untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Ning pada tanggal 23 Oktober Oktober 2012.

**Gambar III.10**  
**Dinas Sosial Dalam Melakukan Pendataan**



Sumber: Dokumentasi milik Rehabilitasi Sosial Pantii Sosial Bina Karya  
Pada Tanggal 5 Juni 2012

Gambar III.10 merupakan proses pendataan warga binaan sosial yang dilakukan oleh salah satu pegawai Dinas Sosial berinisial L di ruang isolasi Pantii Sosial Bina Karya. Warga Binaan sosial tersebut diberikan pembinaan di Pantii Sosial Bina Karya selama 3 atau bahkan bisa sampai seminggu. Proses pembinaan tersebut berlangsung disesuaikan dengan kesediaan anggaran dana Dinas Sosial.

Proses pembinaan yang diberikan yakni Dinas Sosial mendatangkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan rohani dan mendatangkan tentara untuk memberikan bimbingan mental. Pekerja sosial PSBK memberikan motivasi agar mereka bersedia untuk dibina lebih lanjut dengan mengikuti program rehabilitasi di PSBK. Akan tetapi, karena kebanyakan para gelandangan dan orang telantar tidak betah berlama-lama dibina maka ketika mereka dilepaskan akan kembali menggelandang lagi. Berikut kutipan wawancara dengan AF selaku Kepala Bagian PMKS Dinas Sosial Bekasi menuturkan:

“Dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial adalah warga binaan sosial (WBS) selama 3 hari diberikan bimbingan rohani terlebih dahulu, lalu menanggung biaya makan sehari-hari mereka juga. setelah dilakukan pembinaan selama 3 hari, barulah WBS diserahkan ke PSBK untuk menjalankan proses rehabilitasi lebih lanjut. Kemudian, pelayanan teknis yang diberikan oleh tim Dinas Sosial seperti mendatangkan tentara untuk memberikan

bimbingan mental, memanggil salah satu guru agama untuk memberikan bimbingan rohani ”.<sup>61</sup>

Anggota dari Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Kapolres Bekasi juga turut mendukung dalam memberikan penyuluhan dan memberikan bimbingan kedisiplinan. Bentuk penyuluhan yang diberikan anggota Kantibmas yakni penyuluhan agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban umum. Selama dua hari Kantibmas memberikan bimbingan kedisiplinan.

Bimbingan kedisiplinan tersebut diberikan pada saat awal para gelandangan dan orang telantar resmi menjadi warga binaan sosial mengikuti program rehabilitasi di Panti Sosial Bina Karya. Karyawan yang sering bekerja sama dengan Kantibmas terjun langsung dalam memberikan pembinaan tersebut adalah pekerja sosial yang aktif menjadi anggota Tim Reaksi Cepat (TRC).

## **F. Upaya Pekerja Sosial dalam mengatasi hambatan kerja**

### **1. Dari Diri Sendiri**

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi ada berbagai kendala yang akan dihadapi. Adanya kondisi tersebut, maka para pekerja sosial berupaya mengatasinya. Upaya mengatasi hambatan dari diri sendiri adalah menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan para pekerja sosial lain dalam melaksanakan tugas dan saling berkoordinasi dengan tiap seksi dari rehabilitasi sosial maupun dari seksi Program advokasi sosial dalam membina warga binaan sosial tersebut. Seperti pekerja sosial yang berinisial TH selaku pekerja sosial pelaksana lanjutan mengungkapkan:

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan AF pada tanggal 11 Desember 2012.

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada itu apabila saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada maka saya melakukan interaksi dengan menjalin kerja sama dengan pekerja sosial lainnya dan melakukan koordinasi dengan setiap seksi dalam upaya pemecahannya”.<sup>62</sup>

Upaya yang dilakukan dari diri sendiri dalam mengatasi hambatan yakni dengan cara mempelajari hambatan dan permasalahan yang ada. Ia juga melakukan identifikasi masalah, agar nantinya dapat diketahui cara penyelesaiannya. Seperti faktor penghambatnya adalah salah satunya permasalahan mengenai klien dalam notaben pendidikannya terbilang rendah bahkan belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan, pekerjaan yang mereka miliki pun tidak layak dan tidak tetap. Upaya yang dilakukan dari diri sendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni berusaha memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan semaksimal mungkin dan dengan baik guna untuk memajukan taraf hidup warga binaan agar bisa mandiri membuka usaha sendiri dengan terus memotivasi mereka. Ia juga terus melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan dan pengajaran kepada mereka. Pekerja sosial yang berinisial SN yang menjabat sebagai pekerja sosial penyelia mengungkapkan:

“Dengan cara mengidentifikasi sistem sumber dan potensi WBS disini WBS yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikannya untuk memilih minat dan bakatnya mengikuti keterampilan. Sehingga, calon WBS dapat mengikuti kegiatan sesuai potensi dan sumber yang digunakan. Selain itu, dapat memudahkan pekerja sosial memberikan pengarahan dan pengajaran kepada mereka”.<sup>63</sup>

Perlu adanya upaya peningkatan kinerja dari diri sendiri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yakni menaati perintah kedinasan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan TH pada tanggal 15 Oktober 2012.

<sup>63</sup> Wawancara dengan SN pada tanggal 23 Oktober 2012.

dengan surat perintah penugasan yang diberikan Pimpinan Unit ataupun Pejabat Struktural yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Ia juga diharuskan menyusun satuan hasil yang dipersyaratkan setelah selesai melaksanakan kegiatan yang akan dilaporkan kepada atasan setelah melaksanakan kegiatan. Disebabkan, Pengawasan kinerja para pekerja sosial berada di bawah naungan Kepala Panti. Pekerja sosial mengadakan relasi (pendekatan) dengan Kepala Panti. Seperti pekerja sosial yang berinisial IG selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja dari diri saya sendiri sebagai pekerja sosial harus siap kapan pun diperlukan, karena jika kita tidak mengikuti tugas dengan baik dari atasan maka nantinya akan diberikan sanksi”.<sup>64</sup>

Pekerja sosial berusaha untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugas pekerja sosial maupun instansi tempat bekerja. Pekerja sosial juga harus lebih berupaya meningkatkan prestasi kerja selama Panti Sosial Bina Karya agar kinerja mereka menjadi seorang pekerja sosial dalam proses pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan profesionalitas. Pekerja sosial berinisial ND yang menjabat sebagai pekerja sosial pelaksana lanjutan menuturkan:

“Saya akan berusaha melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dengan maksimal”.<sup>65</sup>

Perlu adanya upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sosial fungsional. Pekerja sosial diberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perjenjangan yang berorientasi kepada materi ilmu pengetahuan pekerjaan sosial tentang penanganan masalah PMKS. Seperti pekerja sosial berinisial SW selaku pekerja sosial penyelia mengungkapkan:

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan IG pada tanggal 24 Oktober 2012.

<sup>65</sup> Wawancara dengan ND pada tanggal 30 November 2012.



“Kalau upaya yang saya lakukan itu dengan mengikuti Diklat sebaik mungkin”.<sup>66</sup>

Pekerja Sosial memiliki buku panduan teknis jabatan fungsional pekerja sosial guna meningkatkan optimalitas kinerja Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional. Adanya buku pedoman pembinaan teknis Jabatan Fungsional pekerja sosial tersebut bermanfaat untuk memberikan kejelasan bagi pekerja sosial dalam mencapai angka kredit guna kenaikan jabatan dan pangkat. Pedoman pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dimaksudkan sebagai acuan dalam pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Seperti pekerja sosial yang berinisial MT selaku pekerja sosial penyelia mengungkapkan:

“Mempelajari buku panduan dan pedoman yang ada agar dapat mengetahui tentang kejelasan tugas dan fungsi pekerja sosial yang seharusnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional”.<sup>67</sup>

## **2. Dari Lembaga PSBK**

Dalam upaya mengatasi hambatan, Kepala Panti memberikan bimbingan dan arahan kepada pekerja sosial agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Koordinasi antara karyawan Seksi rehabilitasi, Seksi Program Advokasi Sosial dengan pekerja sosial terjalin dengan baik. Para Pejabat struktural juga telah turut mendukung pekerja sosial dalam menjalankan tugas. Begitupun pihak Tata Usaha telah membantu dari segi materil dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas para pekerja sosial.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan SW pada tanggal 4 Desember 2012.

<sup>67</sup> Wawancara dengan MT Pada Tanggal 6 Desember 2012.

Kepala panti juga melakukan upaya pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh tiap pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh para pekerja sosial tersebut akan dievaluasi. Apabila semua kegiatan pegawai tersebut tidak disiplin, maka akan diberikan peringatan, dan bagi pegawai-pegawai yang kinerjanya kurang bagus, kompetensinya terbilang kurang, akan diingatkan untuk memperbaiki diri. Seperti pekerja sosial berinisial NM selaku pekerja sosial penyelia menuturkan:

“Pekerja Sosial menjalin kerja sama dengan antar seksi dalam melaksanakan dan menjalankan program tugas dan fungsi yang telah dibuat oleh seksi rehabilitasi sosial dan Program Advokasi Sosial (PAS). Udah gitu, pada sekarang ini anggarannya transparan untuk melakukan kegiatan. Maka, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena sarana dan prasarannya lebih lengkap”.<sup>68</sup>

Pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dalam setiap permasalahan, pekerja sosial dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri, tetapi ada juga yang tidak mampu diselesaikan sendiri. Adanya kondisi tersebut, perlu diadakan rapat konferensi kasus atau pertemuan pembahasan kasus untuk membahas solusi yang akan diambil agar permasalahannya dapat terpecahkan.

Pertemuan pembahasan kasus dilaksanakan sebagai rencana intervensi dari sejumlah petugas intern. Pertemuan pembahasan kasus idealnya dilakukan sebulan sekali atau dapat juga diselenggarakan pada saat mengalami suatu permasalahan yang besar terjadi pada WBS yang memang perlu dilakukan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan NM pada tanggal 23 Oktober 2012.

penanganan secara intensif dalam pemecahannya. Rapat konferensi kasus dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar III.11**  
**Rapat Konferensi Kasus**



Sumber: Dokumentasi milik Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya pada tanggal 9 november 2012

Gambar III.11 merupakan rapat konferensi kasus. Konferensi kasus adalah sebuah rapat yang dilakukan oleh para pekerja sosial dengan melibatkan pejabat struktural seperti kepala panti, kepala bagian TU, kepala bagian Resos, kepala bagian PAS, Poliklinik, Psikolog dan pembimbing agama dalam rangka pembahasan kasus yang dihadapi warga binaan sosial dikarenakan pekerja sosial yang menjadi pembimbing warga binaan tersebut sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Rapat konferensi kasus itu ditempuh sebagai upaya penetapan alternatif kebijaksanaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar didapatkan solusi pemecahannya. Hasil dari keputusan dari kesepakatan bersama dalam rapat konferensi kasus, akan dijadikan sebagai solusi akhir dalam upaya pemecahan masalah tersebut.

Konferensi kasus merupakan forum berkumpulnya para tenaga ahli atau tenaga profesional yang berfungsi sebagai tenaga pendamping dan pembantu pimpinan panti didalam mengemban tanggung jawab dan tugas pengelolaan rehabilitasi sosial sehingga seluruh pelaksanaan program panti dapat lebih ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan demi suksesnya penyelenggaraan program Panti Sosial Bina Karya yang dipimpinnya. Penyelenggaraan suatu konferensi kasus ini perlu dilakukan demi terciptanya suatu mekanisme kerja yang berperan di bidang seleksi, pemastian sistem pelayanan, pengungkapan dan pemecahan masalah, penggalian dan pengolahan data permasalahan, menetapkan rumusan pelayanan dan rehabilitasi atau rencana program bimbingan dan pembinaan. Serta, menyelenggarakan program pemantauan, penilaian dan evaluasi antara lain terhadap ketetapan program, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan sasaran. Berikut kutipan wawancara dengan pekerja sosial berinisial LA yang menjabat sebagai pekerja sosial Madya :

“Diadakan rapat sebulan sekali rutinnnya,tergantung dari kasus yang dihadapi. Jika kasus wbs terbilang ringan akan diselesaikan oleh pekerja sosial sendiri sebagai pembimbing. Tetapi kalau kasusnya terbilang berat maka akan dirapatkan dengan melibatkan seluruh pekerja sosial. Kalau emang masalahnya gak terselesaikan juga barulah melibatkan pejabat struktural seperti kepala panti, kepala bagian TU, kepala bagian Resos, kepala bagian PAS,Poliklinik,Psikolog dan pembimbing agama dalam mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan tersebut.”<sup>69</sup>

Peksos dalam setiap akhir masa dalam memberikan pembinaan kepada WBS tiap angkatan pun juga sering diadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja. Evaluasi merupakan serangkaian proses pengukuran, penilaian dan perbandingan terhadap hasil pelaksanaan program kegiatan yang dicapai secara langsung dan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan LA pada tanggal 25 Januari 2013.

nyata dengan hasil yang seharusnya dicapai sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan. Tujuan diadakan evaluasi tersebut demi terciptanya tujuan Panti Sosial Bina Karya dalam memberikan pelayanan secara berdayaguna dan berhasil secara efisien dan efektif dengan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta untuk memperbaiki apabila ada penyimpangan sejak tahap persiapan, pelaksana dan selesainya proses rehabilitasi sosial.

Evaluasi dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pekerja sosial melaksanakan tugas dan apabila ditemukan suatu kekurangan maka para pekerja sosial dapat segera memperbaikinya. Jika terdapat suatu kendala maka akan coba diselesaikan dan jika ingin dilakukan pergantian pembimbing maka akan dibicarakan secara bersama-sama dalam suatu forum. Hasil dari evaluasi tersebut, nantinya akan dilaporkan kepada atasan sebagai kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan staf, sebagai kegiatan pertanggungjawaban penugasan atau totalitas gerak pelaksanaan bimbingan.

## **H. Kesimpulan**

Pembahasan pada bab ini setidaknya bisa menggambarkan bahwa Para Pekerja Sosial di Panti Sosial Bina Karya telah mengetahui tugas pokok dan fungsi pada umumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Unsur uraian tugas Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari 7 uraian tugas meliputi: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah/asesman, penyusunan rencana pemecahan masalah/rencana intervensi, pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan,

bimbingan dan pembinaan lanjut. Uraian tugas yang selama ini diketahui dan dilaksanakan para pekerja sosial berdasarkan uraian tugas yang ada di Panti Sosial Bina Karya dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial tersebut.

Pekerja sosial telah kuliah dari STKS memiliki kesempatan lebih besar menjadi pekerja sosial di lingkungan Kementerian sosial sebagai pekerja sosial ahli. Peksos yang berpendidikan kesejahteraan sosial telah diberikan pengajaran tentang penanganan dan pembinaan PMKS. Pekerja sosial yang memiliki pendidikan kesejahteraan sosial dari STKS termasuk pekerja sosial madya atau ahli ini mengetahui akan ketentuan tugas dan fungsinya seharusnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan membentuk internalisasi dengan baik. Dalam tugasnya sendiri pekerja sosial madya atau ahli diantaranya pengungkapan dan pemahaman masalah, evaluasi terminasi dan rujukan, pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial.

Ia juga harus melakukan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial dan melakukan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial. Secara prakteknya terlihat bahwa pekerja sosial madya yang memiliki latar belakang Pendidikan Kesejahteraan sosial yang menjabat sebagai pembina dalam membuat laporannya tidak secara tepat waktu dan mengalami keteteran. Dalam membuat laporan tersebut merupakan sebagai satuan hasil yang dipersyaratkan setelah selesai melaksanakan kegiatan agar nantinya dapat dievaluasi secara nilai-nilai ilmiah kesejahteraan sosial yang dapat di pertanggung-jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan secara *valid* dikarenakan ia harus melakukan pengkajian

kebijakan dan penyusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial, dan evaluasi program pelayanan kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial bisa diangkat sebagai pembina pekerja sosial agar dapat membantu kepala panti dalam mengatur dan membina pekerja sosial yang terampil. Ia juga harus dapat melaksanakan tugas secara ilmiah dan maksimal yang nantinya akan menjadi panutan untuk para pekerja sosial terampil. Sikap yang ditunjukkan pekerja sosial tersebut belum membentuk internalisasi dengan baik karena ia dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dan tidak semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial atau disebut juga sebagai pekerja sosial ahli madya yang ada di PSBK ini terbilang kurang.

Ia pun menjadi tidak dapat mentransfer ilmu yang dimiliki secara efektif dalam menjalankan kinerja ke dalam kehidupan sehari-hari karena muncul kemalasan dalam dirinya untuk melakukan pengembangan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. Sikap pekerja sosial tersebut terlihat bahwa belum membentuk internalisasi dengan baik. Proses internalisasi dimana seseorang mengetahui, paham, sadar dari segi berbuat sesuai ketentuan dan tuntutan yang diperlukan dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ke dalam kehidupan sehari-hari selama ia bekerja dan menjadi pegawai di PSBK.

Pekerja sosial yang menjadi instruktur dalam terlihat jarang sekali berada di dalam ruang keterampilan untuk memberikan pengajaran kepada warga binaan sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan peksosnya menjadi tidak tahu

perkembangan warga binaan sosial dalam menyerap ilmu keterampilan yang didapatkannya. Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, mereka akan mengalami berbagai kendala ketika bertugas dilapangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kesejahteraan sosial dan kurangnya kemampuan yang dimiliki menjadi seorang pekerja sosial yang profesional dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Ia hanya memantau warga binaannya dan melakukan pendekatan dengan mereka pada saat jam kerja saja. Di luar jam kerja, dia tidak berinisiatif untuk mengunjungi tiap pondok, memantau aktifitas yang dilakukan para WBS. Disaat masih dalam jam kerja bahkan ada salah satu pekerja sosial yang lalai dan kurang bertanggung jawab dalam bekerjanya.

Dalam ketentuan jadwal kegiatan rehabilitasi sosial diharuskan memberikan bimbingan kewirausahaan. Ia terlihat lebih mengutamakan melakukan aktivitas memancing ikan yang merupakan salah satu hobinya ditempat pemancingan yang khusus disediakan untuk keterampilan perikanan yang ada di PSBK ketimbang memberikan bimbingan kewirausahaan. Pekerja sosial lain terpaksa turut andil menggantikan pekerja sosial yang tidak melaksanakan bimbingan kewirausahaan tersebut.

Pekerja sosial di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dihadapkan dengan berbagai kendala. Peksos di dalam upaya mengatasi hambatan yang ada perlu adanya upaya dari diri sendiri. Lembaga Pantis sosial Bina Karya juga turut serta berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan cara kepala Pantis memberikan bimbingan dan arahan kepada pekerja sosial agar dapat mengatasi



permasalahan yang terjadi. Koordinasi antara karyawan Seksi rehabilitasi, Seksi Program Advokasi Sosial dengan pekerja sosial terjalin dengan baik.

Para Pejabat struktural juga telah turut mendukung pekerja sosial dalam menjalankan tugas. Begitupun pihak TU telah membantu dari segi materil dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas para pekerja sosial. Dalam upaya meningkatkan kinerjanya sebagai pekerja sosial secara profesional, Kementerian Sosial RI memberikan peluang kepada pekerja sosial untuk mengikuti diklat penjenjangan yang berorientasi kepada materi ilmu pekerjaan sosial serta diberikannya ilmu pengetahuan tentang penanganan masalah PMKS.

## **BAB IV**

### **INTERNALISASI PEKERJA SOSIAL TERHADAP TUGAS DAN FUNGSINYA**

#### **A. Pengantar**

Pada bab ini akan memaparkan mengenai definisi tugas dan fungsi pekerja sosial dan prinsip dasar pekerjaan sosial. Untuk tugas dan fungsi pekerja sosial umumnya yang diketahui oleh pekerja sosial telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu menolong dan membantu para klien yang mengalami masalah dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan maupun pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi Pekerja sosial tersebut bisa sebagai broker (perantara) dalam mengkaitkan klien dengan sistem sumber-sumber seperti pelayanan kesehatan. Kemudian, fungsi pekerja sosial bisa sebagai supervisor, moderator, fasilitator, dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat struktural dan instansi terkait. Pekerja sosial juga, sebagai motivator pendorong dan pemberi motivasi serta menjadi pendamping instruktur memberikan bimbingan kepada warga binaan. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan mental spiritual dan bimbingan keterampilan.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, masing-masing jabatan Pekerja Sosial memiliki ikhtisar jabatan dan uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh para Pekerja Sosial. Tugas yang selama ini dilaksanakan oleh pekerja sosial berdasarkan uraian tugas yang tertera di Panti Sosial Bina Karya. Tugas dan

fungsi yang telah dipaparkan bab II, menunjukkan bahwa pekerja sosial yang telah kuliah di STKS dan mendapatkan gelar S1 kesejahteraan sosial memiliki kesempatan lebih besar menjadi pekerja sosial di lingkungan Kementerian sosial sebagai pekerja sosial ahli. Pekerja sosial yang berpendidikan kesejahteraan sosial telah diberikan pengajaran tentang penanganan dan pembinaan PMKS..

Seharusnya pekerja sosial yang memiliki pendidikan kesejahteraan sosial dari STKS bisa menjadi tenaga profesional dan membentuk internalisasi dengan baik dikarenakan ia termasuk pekerja sosial madya atau ahli. Oleh sebab itu, pada bab ini akan dilihat lebih dalam mengenai tugas dan fungsi pekerja sosial, bentuk interaksi sosial antar pekerja sosial, tindakan sosial yang dilakukan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas, dan internalisasi pekerja sosial terhadap tugas dan fungsinya.

### **B. Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial**

Status kepegawaian pekerja sosial yang ada di PSBK selama ini telah resmi ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil. Dengan demikian pekerja sosial yang ada di PSBK adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial selama bekerja dan menjadi pegawai PSBK. Seperti halnya pekerja sosial menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/3/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya pada pasal 1 disebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi lainnya.

Pekerja sosial yang ada di Panti Sosial Bina Karya bertugas untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada warga binaan sosial yang bersifat represif, preventif dan rehabilitatif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan, keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut agar warga binaan sosial dapat mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pelayanan kesejahteraan sosial tersebut, merupakan pekerjaan sosial sebagai aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Serta, bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial gelandangan dan orang telantar supaya mereka bisa mampu berubah cara hidup dan cara mencari penghasilannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dengan mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya ketika kembali kemasyarakat. Sama halnya yang dikemukakan oleh Zastrow mendefinisikan pekerjaan sosial adalah “aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.<sup>70</sup>

Pelaksanaan tugas pekerja sosial yang bersifat represif dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan orang telantar yang

---

<sup>70</sup> Abu Huraerah, *Loc. Cit.*, hlm. 38.

ditujukan kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan. Usaha represif tersebut, dapat dilakukan dengan cara merazia kekantong-kantong “gepeng”, melakukan penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi merupakan tahap pendekatan awal yang kegiatannya pengkelompokan/klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak dapat diterima menjadi calon penerima pelayanan.

Dalam fungsi pencegahan dalam konteks pekerjaan sosial berupa kegiatan untuk menemukan secara awal, mengontrol dan menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tidak mampu berfungsi sosial. Usaha preventif yang dilakukan pekerja sosial Panti Sosial Bina Karya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan orang telantar di dalam masyarakat, ditunjukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan orang telantar. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial. Leonora Serafica- de Guzman di dalam bukunya “Fundamental of social work” menyatakan fungsi pokok pekerjaan sosial, yaitu “fungsi preventif/pencegahan”.<sup>71</sup>

Selama ini, pekerja sosial melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari 7 uraian tugas meliputi: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah/asesman, penyusunan rencana pemecahan masalah/rencana intervensi, pelaksanaan pemecahan

---

<sup>71</sup>Dwi Heru Sukoco, *Loc. Cit*, hlm 55.

masalah/intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, bimbingan dan pembinaan lanjut. Uraian tugas yang selama ini diketahui para pekerja sosial berdasarkan uraian tugas yang ada di Panti Sosial Bina Karya. Tujuan pekerja sosial diberikan tugas tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan warga binaan sosial dengan sumber-sumber lingkungannya. Seperti halnya menurut Carel Germain dalam Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, “tujuan pekerja sosial dioperasionisasikan melalui dua fungsi professional yang saling berkaitan diantaranya:

“(1)membantu orang-orang mengarahkan dan menggunakan sumber-sumber pribadi dan lingkungan untuk menghadapi masalah secara efektif dalam rangka mengurangi sumber-sumber ketegangan kehidupan. (2) mempengaruhi kekuatan-kekuatan lingkungan sosial dan fisik agar tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan orang”.<sup>72</sup>

Ia juga dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial haruslah sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial. Dalam pelaksanaannya terlihat pekerja sosial terampil secara prakteknya tidak sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial dikarenakan ia tidak pernah ikut mendampingi dan memberikan arahan kepada warga binaan sosial secara langsung. Prinsip dasar dalam pekerjaan sosial diantaranya:

“Pekerjaan sosial harus dapat menghargai dan memberikan perhatian kepada manusia sebagai individu tapi juga sebagai anggota kelompok dan warga masyarakat, pekerja sosial yang menangani harus mampu mengidentifikasi diri pada situasi klien, mengarahkan serta tidak mendikte kegiatan-kegiatan klien”.<sup>73</sup>

Pekerja sosial dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial. Jika pekerja sosial melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar, maka ia pun menjadi tidak pernah tahu

---

<sup>72</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene terjemahan Juda Damanik., Op. Cit., hlm. 160.

<sup>73</sup>Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

perkembangan warga binaan sosial yang mengikuti proses pembinaan dan pembelajaran keterampilan selama di PSBK tersebut. Misalnya saja warga binaan sosial yang ikut keterampilan pertanian setiap pagi diharuskan mengambil rumput untuk pakan sapi oleh pekerja sosial yang menjadi instruktur dalam pertanian.

Seharusnya, warga binaan tersebut belajar keterampilan pertanian. Akan tetapi, mereka diperintahkan oleh instruktur dalam pertanian untuk mengambil rumput maka dalam belajar keterampilan pertaniannya menjadi tidak maksimal. Pekerja sosialnya sendiri tidak pernah mendampingi warga binaan dalam mengambil rumput, ia cenderung hanya mendikte saja dan tidak pernah terlihat terjun langsung kelapangan. Jika, pekerja sosial melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar. Ia pun menjadi tidak pernah tahu perkembangan warga binaan sosial yang mengikuti proses pembinaan dan pembelajaran keterampilan selama di PSBK tersebut.

### **C. Interaksi Sosial Antar Pekerja Sosial, Warga Binaan Sosial dan Staf Lainnya**

Pekerja sosial PSBK, jika ingin melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, maka harus dapat menjalin interaksi dengan pimpinan panti, seluruh staf dan pegawai. Seperti menurut Gillin dan Gillin, yang dikutip oleh Soekanto<sup>74</sup> “Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia”. Begitupun di dalam tugas dan fungsi Pekerja Sosial dalam melakukan pekerjaan sosial tujuannya

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 61.

adalah mengembangkan interaksi antar warga binaan sosial agar nantinya WBS dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya. Bahkan tidak hanya itu, Pekerja Sosial juga lebih banyak melakukan kontak langsung dengan WBS sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan cara melakukan pendekatan awal kepada warga binaan sosial (WBS) terlebih dahulu agar dapat menangani masalah interaksi sosial antara WBS dengan lingkungan sosialnya.

Suatu komunikasi tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan WBS dan memahami permasalahan yang dihadapi WBS tidak dapat melaksanakan fungsionalitas sosial dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Kegiatan tersebut difokuskan kepada interaksi sosial antara warga binaan sosial dengan lingkungannya agar mereka dapat melaksanakan fungsionalitas sosial dan tugas-tugas kehidupannya baik ia sebagai perorangan maupun sebagai anggota kelompok.

Pekerja Sosial perlu berinteraksi dengan para WBS yang menjadi warga binaan sosial di PSBK sebagai salah satu cara untuk memahami klien tersebut dan bagaimana orang tersebut bertingkah laku dengan orang lain di dalam asosiasinya. Pekerjaan sosial memusatkan perhatiannya kepada warga binaan sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan membantu memecahkan permasalahan yang mereka miliki dan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Tidak semua pekerja sosial bisa mengatasi permasalahan yang dialami warga binaan sosial. Ia pun harus dapat membangun interaksi dengan pekerja



sosial lain dalam berbagi pemahaman ilmu kesejahteraan sosial dan saling membantu memecahkan permasalahan yang ada.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan, pekerja sosial perlu melakukan kerja sama tim. Interaksi yang dinamis, individu-individu yang mempunyai beragam pengetahuan atau keahlian seharusnya ada proses transfer keahlian untuk mencapai keseragaman standard penyelesaian masalah. Pengetahuan professional spesialis dan teknis yang diterapkan, nantinya akan menjadi kontribusi efektif dalam melayani WBS. Oleh karena itu, pekerja sosial harus menjadi anggota tim yang kompeten agar terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial dengan baik.

Interaksi yang dilakukan para pekerja sosial tersebut terjalin dengan baik. Terlihat pekerja sosial antar pembimbing pondok saling berkoordinasi dalam melakukan bimbingan dan pemantauan aktivitas WBS yang menjadi anak bimbingannya. Pekerja sosial dalam melaksanakan tugas, harus berkoordinasi dengan antar pekerja sosial demi terciptanya kelancaran akan tugas tersebut. Seperti yang terdapat di dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa “wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing”.<sup>75</sup> Apabila ada permasalahan yang besar dan rumit maka peksos pun harus berkonsultasi dengan Pembina. Jika, Pembina tidak bisa

---

<sup>75</sup>Bachtiar Chamsyah, *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2003, hlm. 9.

menyelesaikannya maka pembina dan pekerja sosial perlu mengadakan rapat konferensi kasus.

Awal mulanya sebelum diadakan konferensi kasus tersebut, permasalahan WBS diselesaikan terlebih dahulu dengan berkomunikasi antara pembimbing yang bersangkutan dengan Ketua RT dari pondok terkait dan Ketua RW. Apabila tidak ditemui solusi, maka dibicarakan oleh seluruh anggota Peksos. Jika seluruh anggota Peksos tidak bisa mengatasinya, barulah mengadakan konferensi kasus dengan melibatkan pejabat struktural seperti kepala panti, kepala bagian TU, kepala bagian Resos, kepala bagian PAS, Poliklinik, Psikolog dan pembimbing agama dalam rangka pembahasan kasus yang dihadapi warga binaan sosial dikarenakan pekerja sosial yang menjadi pembimbing warga binaan tersebut sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya.

Tidak selamanya ilmu yang dimiliki pekerja sosial dapat diaplikasikan secara baik dalam pelaksanaan tugasnya. Pekerja sosial akan dihadapkan dengan berbagai kendala baik itu dari masalah WBS sendiri, sarana dan prasarana serta pendanaan untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Ia pun memerlukan kontribusi langsung dari tiap seksi baik itu dari seksi rehabilitasi sosial, seksi program advokasi sosial dan tata usaha dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga binaan sosialnya. Pekerja sosial sendiri berada di PSBK menerima tanggung jawab dalam memastikan kelancaran kelanjutan suatu mekanisme pelaksanaan tugas-tugas. Cara ini dapat mendukung mereka dalam kelanjutan suatu mekanisme pemberian pelayanan yang kolaboratif yang sesuai dengan lingkungan berdasarkan teori praktik pekerjaan sosial.

#### **D. Tindakan Sosial Pekerja Sosial Dalam Melaksanakan Tugas**

Setiap tindakan yang dilakukan pekerja sosial PSBK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan tidak hanya semata-mata bermanfaat untuk kepentingan diri sendiri demi mendapatkan upah semata dan ia menganggap bahwa tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya adalah hal yang harus dilakukan demi membantu warga binaan sosial agar menjadi berdaya maka tindakan tersebut merupakan tindakan sosial. Menurut weber, “suatu tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain”.<sup>76</sup> Secara prakteknya terlihat bahwa pekerja sosial di PSBK dalam melaksanakan pekerjaannya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dengan mendapatkan upah, maka dapat dikatakan tindakannya bukanlah tindakan sosial.

Pekerja sosial juga dalam bertindak harus mempertimbangkan secara rasional dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial demi terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang baik. Salah satu contohnya ketika ada salah satu klien yang mengalami masalah maka dalam upaya pemecahan masalah klien, pekerja sosial perlu bertindak secara rasional. Kegiatan pemecahan masalah tersebut menghendaki dan menuntut adanya partisipasi aktif dari kliennya agar ketika menentukan solusi yang akan diputuskan disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan tidak memberatkan klien tersebut.

---

<sup>76</sup>Kamanto Sunarto, *Loc. Cit.*, hlm. 12.

Adanya kerjasama dalam proses pertolongan tersebut maka WBS diharapkan dapat diikutsertakan mengasesmen dan menganalisis permasalahan. Supaya ia mampu berpartisipasi aktif di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pemecahan masalah. Keterlibatan WBS tersebut, nantinya akan mampu dan dapat menentukan secara obyektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan kehidupan dilingkungan masyarakat dan melaksanakan kegiatan secara mandiri secara nilai normatif pada umumnya selama hidup dimasyarakat.

Tindakan yang dilakukan pekerja sosial dalam membina para klien ini memang tidaklah mudah karena masing-masing warga binaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pula bahkan mereka ada yang tinggal dijalanan karena tidak memiliki tempat tinggal dan ada pula yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali. Adanya kondisi tersebut, pekerja sosial harus dengan penuh kesabaran dalam membina dan membimbing mereka. Pekerja sosial ditugaskan setiap harinya untuk mendidik dan membimbing warga binaan sosial agar bisa hidup secara normatif semana mestinya ketika kembali ke masyarakat.

Anggota Peksos harus tegas dalam mendidik WBS agar tidak melanggar tata tertib yang ada di PSBK. Ia juga jangan menjaga jarak dengan WBS, dikarenakan akan membuat mereka menjadi tidak berkenan untuk mengikuti proses pembinaan rehabilitasi sosial dan dekat dengan peksos tersebut. WBS di PSBK sebenarnya kebanyakan berbohong akan latar belakang kehidupannya dengan memperlihatkan kondisi yang terlihat memperhatikan

dengan mengatakan tidak memiliki apa-apa untuk menarik simpati dari para pekerja sosial. Pada kenyataannya terlihat tak sesuai dengan apa yang mereka katakan.

Pekerja sosial kadang-kadang menemukan bahwa nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai-nilai pekerjaan sosial atau kedudukan resmi pimpinan kepala panti. Hal ini bisa terjadi misalnya apabila pekerja sosial tidak sepakat dengan afiliasi atau kedudukan politik pimpinan kepala panti tentang kebijakan publik yang diberikan. Pekerja sosial juga bisa menghadapi situasi di mana nilai-nilai pribadinya bertentangan dengan nilai yang dianut klien. Ini biasanya terjadi apabila klien terlibat dalam kegiatan ilegal atau cenderung amoral.

Pada saat pekerja sosial menghadapi kondisi tersebut, maka ia harus mengambil keputusan secara rasionalitas nilai dengan mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus misalnya pekerja sosial harus mengetahui teori dan prinsip etika nilai-nilai kesejahteraan sosial, dan pedoman ketentuan yang berlaku di PSBK terkait dengan praktik profesional dengan berkonsultasi dengan rekan atau pakar yang tepat (seperti staf lembaga, supervisor, pimpinan lembaga). “Tindakan rasionalitas nilai terkait dengan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran berikut tak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, juga berbagai bentuk nilai lainnya”.<sup>77</sup>

#### **E. Internalisasi Pekerja Sosial Terhadap Tugas Fungsinya**

Pekerja sosial terampil yang ada di PSBK latar belakang Pendidikan yang dimiliki bukan berlatarbelakang pendidikan dibidang Kesejahteraan Sosial.

---

<sup>77</sup>George Ritzer terjemahan oleh Saut Pasaribu , *Loc. Cit.*, hlm. 216.

Ia ditugaskan membina Warga Binaan Sosial secara langsung dilapangan. Jika, ia ingin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, maka ia harus mengetahui kode etik menjadi seorang pekerja sosial yang semestinya. Menurut Carel Germain dalam Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, “Tugas professional ialah mewakili secara serentak misi organisasi, kebutuhan-kebutuhan klien, dan kode etik profesi”.<sup>78</sup>

Awal mula seseorang menjadi pekerja sosial ini pertama-tama ia harus melakukan proses penyesuaian diri di lembaga Panti Sosial Bina Karya sebagai seorang pekerja sosial Pegawai Negeri Sipil yang ditempatinya. Proses penyesuaian diri tersebut merupakan proses eksternalisasi. Setelah itu, ia akan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menginternalisasinya sebagai suatu kenyataan obyektif. Setelah ia menyandang menjadi seorang pekerja sosial, ia akan dihadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepala unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disandangnya produk-produk pekerja sosial tersebut merupakan proses obyektivasi.

Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dari kesejahteraan sosial bisa melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial secara efektif dan mendapatkan pengetahuan akan ilmu kesejahteraan sosial berasal dari transfer ilmu yang diberikan oleh rekan pekerja sosial lain yang memiliki latar belakang di bidang kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, apabila ia

---

<sup>78</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene terjemahan Juda Damanik., Op. Cit., hlm. 164.

dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan terus menerus melakukan pengulangan pada aktivitas yang dilakukannya maka ia pun akan menjadi terbiasa dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut dan akan menjadi suatu kesadaran subyektif. “Internalisasi adalah sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subyektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna subyektif bagi diriinya”.<sup>79</sup>

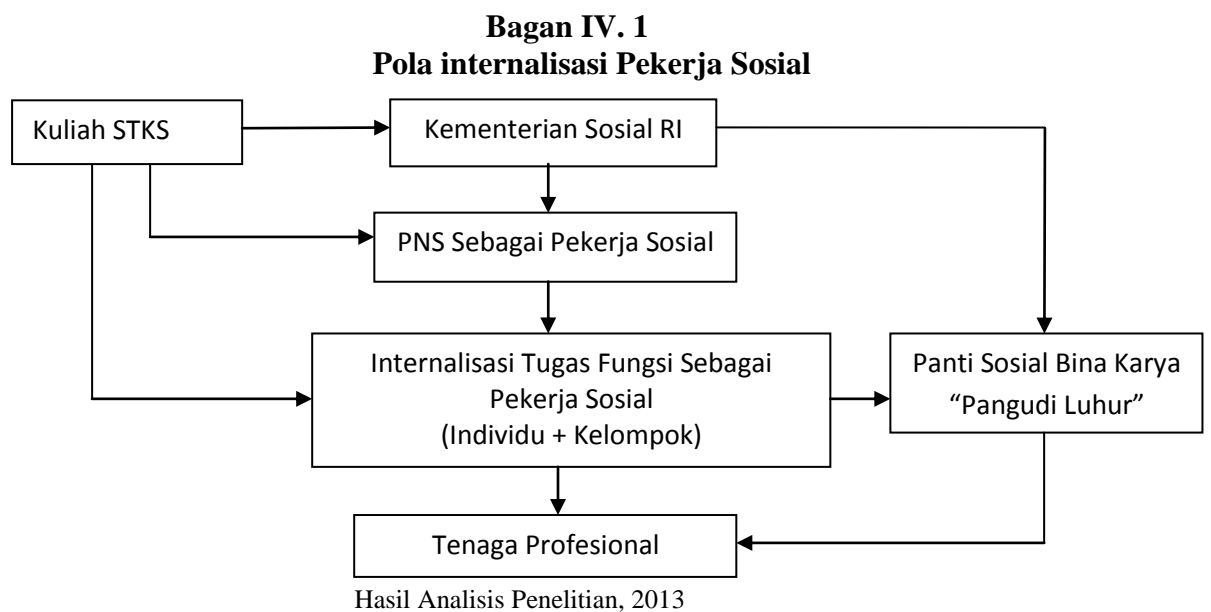
Internalisasi disini juga bisa dikatakan berhasil jika bisa belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain secara professional yang kemudian menumbuhkan kesadaran akan melakukan kegiatannya tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal sehingga bermakna bagi dirinya. Apabila ada pekerja sosial yang tidak mampu melaksanakan tugas secara sendiri, maka pekerja sosial lain akan turut membantu. Jika rekan pekerja sosial lain tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut, ia harus segera berkonsultasi dan melaporkan kepada pembina pekerja sosial. Pembina akan turut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pekerja sosial tersebut dalam merumuskan masalah dan dalam melaksanakan tugas-tugas yang meliputi perencanaan dan peninjauan ulang tugas.

Pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial seharusnya dapat meneladani sebagai pekerja sosial yang semestinya bermakna untuk dirinya sendiri sebagai pekerja sosial dan bisa membentuk internalisasi yang baik apabila proses eksternalisasi dan proses obyektivasi tersebut dapat

---

<sup>79</sup>Peter L. Berger dan Thomas Lucman diterjemahkan oleh Hasan Basari, *Op. Cit.*, hlm. 117.

dilaksanakan dengan baik. Secara prakteknya, pekerja sosial yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial tersebut, belum melaksanakan tugas secara efektif dan membentuk internalisasi secara baik dikarenakan tidak mendapatkan pembinaan dari atasan, kerjasama dengan pekerja sosial lain kurang karena kemampuan yang dimiliki berbeda-beda dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Pola internalisasi tugas dan fungsi pekerja sosial yang terbentuk dapat dilihat pada bagan dibawah ini



Pada bagan IV.1 memperlihatkan bahwa pola internalisasi pekerja sosial yang telah kuliah dari STKS menjadi PNS di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" dapat dikatakan sebagai tenaga yang profesional apabila dapat membentuk internalisasi dengan baik sebagai pekerja sosial yang tahu dan paham, sadar dari segi bertindak dalam melaksanakan tugas berdasarkan tuntutan dan ketentuan dari lembaga PSBK menjadi PNS. Pekerja sosial yang kuliah di STKS,



nantinya akan menjadi pekerja sosial ahli madya. Ia akan diberikan pembekalan dan pembinaan profesionalisme, dengan cara pekerja sosial mengikuti diklat jabatan fungsional pekerja sosial (JFPS) yang diadakan oleh balai pusdiklat kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI. “Kurikulum yang diberikan diantaranya tata cara melakukan kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial, metode dan teknik pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi mikro, meso dan makro”.<sup>80</sup>

Internalisasi akan berhasil apabila, pekerja sosial tersebut memiliki dedikasi dan motivasi yang tinggi menjadi pekerja sosial untuk membimbing para warga binaan sosial mengatasi persoalannya dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari STKS kedalam kehidupan sehari-hari selama bekerja maka pekerja sosial tersebut dapat dikatakan sebagai tenaga profesional. Sebagai pekerja sosial profesional, harus terus membina diri menjadi seorang yang tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi menjadi seorang pekerja sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku yang merasa menjadi lingkup seorang pegawai negeri sipil PSBK semata. Melainkan, ia harus memiliki pribadi sosial pengabdian yang tinggi karena ia bekerja sebagai pekerja sosial dimana ia bekerja.

Ia juga harus memperlihatkan peranan yang berbeda dengan tugas PNS biasa. Peter L. Berger menuturkan tentang proses internalisasi adalah “proses-proses yang juga menginternalisasi identitas-identitas yang ditetapkan secara sosial dan individu disosialisasi menjadi pribadi dan menempati dunia yang

---

<sup>80</sup> Biro Organisasi dan Kepegawaian, *Op.Cit.*, hlm. 52.

ditetapkan”.<sup>81</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa sikap dan perilaku dirinya menghayati dan berusaha untuk mengaktualisasikan jati dirinya sebagai tenaga professional dibidangnya dalam hal ini sebagai pekerja sosial.

## **F. Kesimpulan**

Bab ini telah menguraikan analisis pelaksanaan kerja tugas dan fungsi pekerja sosial. Pekerja sosial yang ada di PSBK adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial selama bekerja dan menjadi pegawai PSBK. Pekerja sosial bertugas untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada warga binaan sosial yang bersifat represif, preventif dan rehabilitatif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan, keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut agar warga binaan sosial dapat mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Selama ini, pekerja sosial melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari 7 uraian tugas meliputi: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah/asesman, penyusunan rencana pemecahan masalah/rencana intervensi, pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, bimbingan dan pembinaan lanjut. Terlihat bahwa pekerja sosial terampil secara prakteknya tidak sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial dikarenakan ia tidak pernah ikut mendampingi dan memberikan arahan kepada warga binaan sosial secara

---

<sup>81</sup> Peter L. Berger terjemahan oleh Hartono, *Loc. Cit.*, hlm. 20

langsung. Ia juga cenderung hanya mendikte saja dan tidak pernah terlihat terjun langsung kelapangan.

Jika, pekerja sosial melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar. Ia pun menjadi tidak pernah tahu perkembangan warga binaan sosial yang mengikuti proses pembinaan dan pembelajaran keterampilan selama di PSBK tersebut. Pekerja sosial dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prinsip dasar pekerjaan sosial. Pekerja sosial PSBK, jika ingin melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, maka harus dapat menjalin interaksi dengan pimpinan panti, seluruh staf dan pegawai.

Pekerja Sosial lebih banyak melakukan kontak langsung dengan WBS sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan cara melakukan pendekatan awal kepada warga binaan sosial (WBS) terlebih dahulu agar dapat menangani masalah interaksi sosial antara WBS dengan lingkungannya. Suatu komunikasi tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan WBS dan memahami permasalahan yang dihadapi WBS tidak dapat melaksanakan fungsionalitas sosial dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Kegiatan tersebut difokuskan kepada interaksi sosial antara warga binaan sosial dengan lingkungannya agar mereka dapat melaksanakan fungsionalitas sosial dan tugas-tugas kehidupannya baik ia sebagai perorangan maupun sebagai anggota kelompok.

Ia pun harus dapat membangun interaksi dengan pekerja sosial lain dalam berbagi pemahaman ilmu kesejahteraan sosial dan saling membantu memecahkan permasalahan yang ada. Interaksi yang dilakukan para pekerja sosial

tersebut terjalin dengan baik. Terlihat pekerja sosial antar pembimbing pondok saling berkoordinasi dalam melakukan bimbingan dan pemantauan aktivitas WBS yang menjadi anak bimbingannya.

Secara prakteknya terlihat bahwa pekerja sosial di PSBK dalam melaksanakan pekerjaannya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dengan mendapatkan upah, maka dapat dikatakan tindakannya bukanlah tindakan sosial. Pekerja sosial juga dalam bertindak harus mempertimbangkan secara rasional dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial demi terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang baik. Pekerja sosial juga harus mengambil keputusan secara rasionalitas nilai dengan mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus misalnya pekerja sosial harus mengetahui teori dan prinsip etika nilai-nilai kesejahteraan sosial, dan pedoman ketentuan yang berlaku di PSBK terkait dengan praktik profesional dengan berkonsultasi dengan rekan atau pakar yang tepat (seperti staf lembaga, supervisor, pimpinan lembaga).

Pekerja sosial terampil yang ada di PSBK latar belakang Pendidikan yang dimiliki bukan berlatarbelakang pendidikan dibidang Kesejahteraan Sosial. Ia ditugaskan membina Warga Binaan Sosial secara langsung dilapangan. Jika, ia ingin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, maka ia harus mengetahui kode etik menjadi seorang pekerja sosial yang semestinya.

Awal mula seseorang menjadi pekerja sosial ini pertama-tama ia harus melakukan proses penyesuaian diri di lembaga Panti Sosial Bina Karya sebagai seorang pekerja sosial Pegawai Negeri Sipil yang ditempatinya. Proses penyesuaian diri tersebut merupakan proses eksternalisasi. Setelah itu, ia akan

melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menginternalisasinya sebagai suatu kenyataan obyektif. Setelah ia menyandang menjadi seorang pekerja sosial, ia akan dihadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepala unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disandangnya produk-produk pekerja sosial tersebut merupakan proses obyektivasi.

Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dari kesejahteraan sosial bisa melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial secara efektif dan mendapatkan pengetahuan akan ilmu kesejahteraan sosial berasal dari transfer ilmu yang diberikan oleh rekan pekerja sosial lain yang memiliki latar belakang di bidang kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, apabila ia dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan terus menerus melakukan pengulangan pada aktivitas yang dilakukannya maka ia pun akan menjadi terbiasa dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut dan akan menjadi suatu kesadaran subyektif. Internalisasi disini juga bisa dikatakan berhasil jika bisa belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain secara profesional yang kemudian menumbuhkan kesadaran akan melakukan kegiatannya tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal sehingga bermakna bagi dirinya.

Secara prakteknya, pekerja sosial yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial tersebut, belum melaksanakan tugas secara efektif dan membentuk internalisasi secara baik dikarenakan tidak mendapatkan pembinaan dari atasan, kerjasama dengan pekerja sosial lain kurang karena kemampuan yang dimiliki berbeda-beda dan sarana dan prasarana yang tersedia

kurang memadai sehingga menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial seharusnya dapat meneladani sebagai pekerja sosial yang semestinya bermakna untuk dirinya sendiri sebagai pekerja sosial. Ia dapat membentuk internalisasi dengan baik apabila proses eksternalisasi dan proses obyektivasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Peksos yang telah kuliah dari STKS menjadi PNS di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” dapat dikatakan sebagai tenaga yang profesional apabila dapat membentuk internalisasi dengan baik sebagai pekerja sosial yang tahu dan paham, sadar dari segi bertindak dalam melaksanakan tugas berdasarkan tuntutan dan ketentuan dari lembaga PSBK menjadi PNS.

Pekerja sosial yang kuliah di STKS, nantinya akan menjadi pekerja sosial ahli madya. Ia akan diberikan pembekalan dan pembinaan profesionalisme, dengan cara pekerja sosial mengikuti diklat jabatan fungsional pekerja sosial (JFPS) yang diadakan oleh balai pusdiklat kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI. Sebagai pekerja sosial profesional, harus terus membina diri menjadi seorang yang tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi menjadi seorang pekerja sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku yang merasa menjadi lingkup seorang pegawai negeri sipil PSBK semata. Melainkan, ia harus memiliki pribadi sosial pengabdian yang tinggi karena ia bekerja sebagai pekerja sosial dimana ia bekerja. Ia juga harus memperlihatkan peranan yang berbeda dengan tugas PNS biasa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sikap dan perilaku dirinya menghayati dan berusaha untuk mengaktualisasikan jati dirinya sebagai tenaga profesional dibidangnya dalam hal ini sebagai pekerja sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penulisan hasil penelitian. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini para pekerja sosial sudah mengetahui tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Panti Sosial Bina Karya. Pekerja sosial tidak memperoleh pembekalan dan pembinaan kinerja tugas dan fungsi dari atasan untuk meningkatkan kinerja secara profesional. Masing-masing pekerja sosial melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan jenjang jabatan yang diembannya. Tiap perjenjang jabatan Pekerja Sosial memiliki ikhtisar jabatan dan uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh para Pekerja Sosial. Pekerja sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti memiliki hambatan di karenakan peksos yang ada di Panti sosial Bina karya tersebut, tidak sebanding dengan jumlah warga binaan sosialnya. Jumlah pekerja sosial yang ada di PSBK sebanyak 15 orang ini terdiri dari pekerja sosial yang terampilnya sebanyak 13 orang dan yang menjadi pekerja sosial ahlinya sebanyak 2 orang.

Pekerja sosial PSBK, jika ingin melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, serta berupaya mengatasi berbagai hambatan. Peksos di dalam upaya mengatasi hambatan, perlu adanya upaya dari diri sendiri. Lembaga Panti sosial Bina Karya juga turut serta berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan cara kepala Panti memberikan bimbingan dan arahan kepada pekerja sosial agar dapat

mengatasi permasalahan yang terjadi. Koordinasi antara karyawan Seksi rehabilitasi, Seksi Program Advokasi Sosial dengan pekerja sosial juga terjalin dengan baik.

Para Pejabat struktural juga telah turut mendukung pekerja sosial dalam menjalankan tugas. Begitupun pihak TU telah membantu dari segi materil dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas para pekerja sosial. Kementerian Sosial RI memberikan peluang kepada pekerja sosial untuk mengikuti diklat penjenjangan yang berorientasi kepada materi ilmu pekerjaan sosial serta diberikannya ilmu pengetahuan tentang penanganan masalah PMKS dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai pekerja sosial secara profesional.

Pekerja sosial terampil ditugaskan membina warga binaan sosial secara langsung dilapangan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki pekerja sosial trampil tersebut, kebanyakan bukan dari latar belakang pendidikan S1 dibidang kesejahteraan sosial maka tidak bisa dikatakan sebagai tenaga profesional. Pekerja sosial terampil bertugas di lapangan untuk membina para warga binaan sosial secara profesional tidaklah mudah disesuaikan dalam menangani masalah klien yang kompleks. Pekerja sosial harus mengetahui gambaran secara keseluruhan klien agar pelaksanaan tugas dan fungsi terlaksana dengan baik. Apabila ada yang tidak mampu diselesaikan sendiri, pekerja sosial segera berkonsultasi dan melaporkan kepada pembina pekerja sosial. Pembina akan turut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pekerja sosial tersebut.



Awal mula seseorang menjadi pekerja sosial ini pertama-tama ia harus melakukan proses penyesuaian diri di lembaga Panti Sosial Bina Karya sebagai seorang pekerja sosial Pegawai Negeri Sipil yang ditempatinya. Proses penyesuaian diri tersebut merupakan proses eksternalisasi. Setelah itu, ia akan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menginternalisasinya sebagai suatu kenyataan obyektif. Setelah ia menyandang menjadi seorang pekerja sosial, ia akan dihadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepala unit kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disandangnya produk-produk pekerja sosial tersebut merupakan proses obyektivasi.

Pekerja sosial yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dari kesejahteraan sosial bisa melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial secara efektif dan mendapatkan pengetahuan akan ilmu kesejahteraan sosial berasal dari transfer ilmu yang diberikan oleh rekan pekerja sosial lain yang memiliki latar belakang di bidang kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, apabila ia dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan terus menerus melakukan pengulangan pada aktivitas yang dilakukannya maka ia pun akan menjadi terbiasa dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut dan akan menjadi suatu kesadaran subyektif. Internalisasi disini juga bisa dikatakan berhasil jika bisa belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh orang lain secara profesional yang kemudian menumbuhkan kesadaran akan melakukan kegiatannya tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal sehingga bermakna bagi dirinya.

Pekerja sosial yang memiliki latar belakang kesejahteraan sosial seharusnya dapat meneladani sebagai pekerja sosial yang semestinya bermakna untuk dirinya sendiri sebagai pekerja sosial dan bisa membentuk internalisasi yang baik apabila proses eksternalisasi dan proses obyektivasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Secara prakteknya, pekerja sosial yang memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial tersebut, belum melaksanakan tugas secara efektif dan membentuk internalisasi secara baik dikarenakan tidak mendapatkan pembinaan dari atasan, kerjasama dengan pekerja sosial lain kurang karena kemampuan yang dimiliki berbeda-beda dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Peksos yang telah kuliah dari STKS menjadi PNS di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” dapat dikatakan sebagai tenaga yang profesional apabila dapat membentuk internalisasi dengan baik sebagai pekerja sosial yang tahu dan paham, sadar dari segi bertindak dalam melaksanakan tugas berdasarkan tuntutan dan ketentuan dari lembaga PSBK menjadi PNS.

Pekerja sosial yang kuliah di STKS, nantinya akan menjadi pekerja sosial ahli madya. Ia akan diberikan pembekalan dan pembinaan profesionalisme, dengan cara pekerja sosial mengikuti diklat jabatan fungsional pekerja sosial (JFPS) yang diadakan oleh balai pusdiklat kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI. Sebagai pekerja sosial profesional, harus terus membina diri menjadi seorang yang tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi menjadi seorang pekerja sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku yang merasa menjadi lingkup seorang pegawai negeri sipil PSBK semata. Melainkan, ia harus memiliki pribadi sosial

pengabdian yang tinggi karena ia bekerja sebagai pekerja sosial dimana ia bekerja. Ia juga harus memperlihatkan peranan yang berbeda dengan tugas PNS biasa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sikap dan perilaku dirinya menghayati dan berusaha untuk mengaktualisasikan jati dirinya sebagai tenaga profesional dibidangnya dalam hal ini sebagai pekerja sosial.

### **B. Saran**

Dari temuan penulis di lapangan, penulis sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Panti Sosial Bina Karya sebaiknya memberikan pembinaan, pelatihan dan pendidikan kesejahteraan sosial kepada para pekerja sosial sebagai tenaga profesional agar mampu mempraktekkan pekerjaan sosial secara profesional terkait secara fungsional.
2. Pekerja sosial diharapkan bekerja secara profesional dan pihak panti diharapkan dapat menambah pekerja sosial ahli agar pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial berjalan secara intensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basari, Hasan. 1990. *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan*/Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. LP3ES. Jakarta.
- Biro Organisasi dan Kepegawaian. 2007. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/2007 Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*. Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Biro Organisasi dan Kepegawaian. 2008. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 Jabatan fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya*. Departemen Sosial R.I. Jakarta.
- Biro Organisasi dan Kepegawaian. 1998. *Panduan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen sosial RI*. Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Chamsyah, Bachtiar. 2003. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial*. Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Damanik, Juda. 2008. *Buku pintar pekerja sosial*/Roberts, R Albert dan Gilbert J. Greene. Gunung Mulia. Jakarta.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. 2011. *Buku Pedoman Program Desaku Menanti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Terpadu Berbasis Desa*. Kementerian Sosial RI. Jakarta.
- Direktorat Rehabilitasi tuna sosial. 1994. *Petunjuk Teknis Penanganan Gelandangan dan Pengemis Melalui Sistem Panti*. Departemen sosial RI. Jakarta.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial. 2000. *Standardisasi pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya*. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Jakarta.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern*, Arr-Russ Media. Yogyakarta.
- Hartono. 1991. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*/Peter L. Berger. LP3ES. Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Humaniora buku pendidikan anggota IKAPI. Bandung.
- John, W Creswell. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Lawang, M.Z Robert. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*/Johnson Paul Doyle. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Pasaribu, Saut. 2012. *Teori Sosiologi Dari sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*/George Ritzer. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Samuel, Hanneman. 2012. *Sebuah Pengantar Ringkas/Peter L Berger*. Kepik. Depok.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sukoco, Heru Dwi. 1991. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Bandung.

### **Tesis:**

- Marsaoly, Ali Yusuf. 2001. *Peranan Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Lanjut Usia (Studi Di Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Mulia" Jakarta Timur)*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suminto. 2001. *Peranan Pekerja Sosial dalam Proses Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh (Studi Di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. soeharso" Surakarta)*. Universitas Indonesia. Depok.

### **Sumber lain:**

- Dokumentasi Advokasi Sosial Panti Sosial Bina Karya  
 Dokumentasi Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Karya  
 Dokumentasi Pekerja Sosial  
 Dokumentasi Kementerian Sosial R.I  
 Dokumentasi Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Karya  
 Dokumentasi Tata Usaha Panti Sosial Bina Karya